



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi public dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071););

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2011 tentang Cara Penyediaan Arsip Dinamis sebagai informasi Publik;
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 7 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
5. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
6. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
7. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
8. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
9. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

10. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
12. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
13. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
14. Prosedur pengaksesan informasi public adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi ilegal pemanfaatan informasi publik.
15. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
16. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Deli Serdang ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Deli Serdang ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan akan dengan menerapkan asas gabungan huruf dan angka.
- (2) Asas gabungan sebagai mana tersebut pada ayat(1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - b. keempat tingkat klasifikasi sebagai mana tersebut padah uruf a,berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggipula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a,berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;dan
 - d.publik dapat mengakses informasi yang dikatagorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana system klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *fillingca binet*/rakarsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, danbrangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representative sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan huruf dan angka.

- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, dengan menggunakan gabungan huruf dan angka serta kode klasifikasi arsip menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

BAB III

PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1). Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2). Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
- a.pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b.pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari:
- a.penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - 2.pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - 3.pimpinant ingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
 - b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi,

pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan

- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 ayat(2) huruf b terdiri dari:
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa / terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat(1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. katagori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - b. katagori arsip terbatas disimpan pada *filling cabinet*; dan
 - c. katagori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.

- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 030.B Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdangn dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
Ttd
DARWIN ZEIN

Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021
Nomor 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERA PERMATA SARI, SH, MM
NIP. 19710223 199503 2 003

**Lampiran :
Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Pedoman
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
Nomor :
Tanggal :**

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
SUBTANTIF URUSAN AGRARIA DAN TATA RUANG**

KLASIFIKASI						SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP					MASUKAN DAERAH	
KODE KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS ARSIP/DOKUMEN	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR		UNIT PENGO LAH
										PERTI MBAN GAN		
1	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
SO		AG	v		AGRARIA DAN TATA RUANG							
					KEBIJAKAN							
	SO.00	AG.00		v	Rumusan Kebijakan Bidang Tata Ruang, Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Infrastruktur Keagrariaan, Bidang Pengaturan, Penetapan dan Pendaftaran Hak Tanah, Pembinaan Pejabat Pembuat Akte Tanah, serta pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Bidang Penatagunaan Tanah, Penataan, Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir, Pulau Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu,	Arsip yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan urusan Bidang Tata Ruang, dan Pertanahan, mulai dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan kebijakan, harmonisasi/pemberian masukan, dan penetapan dalam bentuk NSPK	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			AG.00.00		v	a.	Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan		biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.00.01		v	b.	Penyiapan Kebijakan		biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.00.02		v	c.	Perumusan Kebijakan		biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			AG.00.03		v	d.	Harmonisasi/pemberian masukan			biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			AG.00.04		v	e.	Penetapan dalam bentuk NSPK			biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
						TATA RUANG								
						A. Perencanaan dan Kemitraan								

			AG.01		v	1.	Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi Bidang Tata Ruang	Arsip mengenai perencanaan umum serta monitoring evaluasi bidang tata ruang	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.01.00		v	a.	Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional	Arsip mengenai Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.01.01		v	b.	Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional	Arsip mengenai Rencana Program, monitoring dan evaluasi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			AG.01.02		v	c.	Rencana Program, monitoring dan evaluasi bidang penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru	Arsip mengenai Rencana Program, monitoring dan evaluasi bidang penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			AG.01.02		v	d.	Rencana program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah wilayah 1, pembinaan wilayah II, pembinaan wilayah III, dan pembinaan wilayah IV	Arsip mengenai Rencana program, monitoring dan evaluasi bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah wilayah 1, pembinaan wilayah II, pembinaan wilayah III, dan pembinaan wilayah IV	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	
SO.01			AG.02		v		Data, Informasi dan Kemitraan		biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

		SO.01.03												
			AG.02.03			v	d.	Data dan informasi bidang pemanfaatan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru	Arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan Data dan informasi bidang pemanfaatan dan pengembangan kawasan perkotaan, penataan kawasan pedesaan, penataan kawasan ekonomi dan penataan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		SO.01.04												
			AG.02.04			v	e.	Kemitraan bidang tata ruang dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi non pemerintah	Arsip mengenai Kemitraan bidang tata ruang dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi non pemerintah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.02.05			v	f.	Pemberdayaan masyarakat di bidang tata ruang	Arsip yang berkaitan dengan Pemberdayaan masyarakat di bidang tata ruang	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		SO.02						Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang						

		SO.02.00	AG.03	v	1.	Perencanaan Tata Ruang	Arsip yang berkaitan dengan Perencanaan Tata Ruang dimulai dari wilayah nasional, pulau dan kepulauan, dan kawasan perbatasan negara, serta wilayah strategis nasional I dan II	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		SO.02.01	AG.03.00	v		a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah nasional, pulau dan kepulauan, dan kawasan perbatasan negara	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional, khususnya di wilayah nasional, pulau dan kepulauan, dan kawasan perbatasan nasional	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		SO.02.02	AG.03.01	v		b. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah I	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan dan strategi nasional, pada wilayah nasional I	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			AG.03.02					c. Kebijakan dan strategi nasional di bidang perencanaan tata ruang dan peninjauan kembali tata ruang kawasan strategis nasional di wilayah II	Arsip mengenai kebijakan dan strategi nasional di wilayah strategis nasional wilayah II	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.03		AG.04		v	Pemanfaatan Ruang									
	SO.03.00	AG.04.00						a. Kebijakan dan strategi nasional di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau dan kepulauan dan kawasan perbatasan negara	Arsip mengenai pemanfaatan ruang pada bidang kebijakan dan strategi nasional, di wilayah nasional, pulau, dan kepulauan dan kepulauan dan kawasan perbatasan negara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	SO.03.01	AG.04.01						b. Rencana Terpadu Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah Pulau/Kepulauan	Arsip pemanfaatan ruang mengenai rencana terpadu program investasi untuk wilayah pulau atau kepulauan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			AG.04.05		v		f.	Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional di Wilayah II	Arsip mengenai Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional di Wilayah II	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.04		AG.05		v		Penataan Kawasan								
	SO.04.00		AG.05.00		v			Roadmap Penataan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	Arsip penataan kawasan khususnya pada tahap roadmap penataan dan pengembangan kawasan ekonomi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.05.01		v			Kajian Teknis Penataan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	Arsip mengenai kajian teknis yang diterapkan pada teknis penataan dan pengembangan kawasan ekonomi, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			AG.05.02					Rencana Induk Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	Arsip mengenai rencana induk kawasan ekonomi, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.05.03					Perancangan dan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	Arsip mengenai perancangan dan kelembagaan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.05.04					Kesepakatan Lintas Sektor, Lintas Wilayah, dan Lintas Pemangku Kepentingan di Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	Arsip mengenai Kesepakatan Lintas Sektor, Lintas Wilayah, dan Lintas Pemangku Kepentingan di Kawasan Ekonomi, Kawasan Pedesaan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Baru	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	SO.04.01	AG.06						Pembinaan Perencanaan Tata Ruang							

	SO.05		AG.06.00		v	a.	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten di Wilayah I, II, III, IV	Arsip mengenai pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang Daerah Provinsi dan Kabupaten di Wilayah I, II, III, IV	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	SO.05.00		AG.06.01		v	b.	Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV	Arsip mengenai Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang Daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	SO.05.01		AG.06.02		v	c.	Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten beserta Rencana Rinci	Arsip mengenai Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten beserta Rencana Rinci	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

		SO.05.02															
			AG.06.03			v	d.	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	Arsip mengenai pengembangan Kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait			
			AG.07			v	Pembinaan Perencanaan Tata Ruang										
	SO.06		AG.07.00			v	a.	Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV	Arsip mengenai Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknik Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan ruang daerah serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang di Wilayah I, II, III, IV	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait			
			AG.07.01			v	b.	Pelaksanaan Evaluasi dalam Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota beserta Rencana Rinci	Arsip mengenai kegiatan pelaksanaan evaluasi mengenai persetujuan substansi rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.				

			AG.07.02		v	c.	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	Arsip mengenai kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kota dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	
							INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN						
	SO.07		AG.08		v		SURVEI KEAGARIAAN	Arsip yang berkaitan dengan survei kegiatan, mulai dari perencanaan, pengukuran dan pemetaan, serta laporan dari kegiatan tersebut	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	SO.07.00		AG.08.00		v	1.	Perencanaan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan						
	SO.07.01		AG.08.01		v	2.	Laporan Kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan						
	SO.07.02		AG.09		v		Pengukuran Keagrariaan						

SO.08		AG.09.00		v	1.	Pengukuran	Arsip yang berkaitan dengan berbagai tahapan kegiatan pengukuran keagrariaan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	SO.08.00				a.	Permohonan Pengukuran Pertama Kali						
	SO.08.01				b.	Pemeliharaan Data Pengukuran						
	SO.08.02				c.	Pengembalian Batas Pengukuran						
	SO.08.03				d.	Mengetahui Status Pengukuran						
SO.09		AG.09.01		v	2.	Inventarisasi Pengukuran	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran dalam hal inventarisasi pengukuran	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	SO.09.00	AG.10		v		Pemetaan Infrastruktur Keagrariaan						

		SO.09.01	AG.10.00			v		1.	Peta Indikatif Batas Kawasan dan Wilayah Administrasi	Arsip mengenai Peta yang menjadi indikatif Batas Kawasan dan juga wilayah administrasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

			AG.10.03		v	4. Peta Tematik	Arsip yang memuat peta mengenai suatu tema yang khusus	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
						a. Peta Tematik Penggunaan Tanah						
						d. Peta Tematik Kemampuan Tanah						
						d. Peta Tematik Gambaran Umum Penguasaan Tanah						

							d. Peta Tematik Pemanfaatan Tanah								
							e. Peta Tematik Kepemilikan Tanah (Status Tanah)								
							f. Peta Tematik Sebaran Bidang Tanah								
		SO.09.03					g. Peta Tematik Masalah Pertanahan								
							h. Peta Tematik Sosial Ekonomi								
		SO.09.02					i. Peta Tematik Lainnya								
	SO.10						6. Layanan Informasi/Data	Arsip mengenai Layanan Informasi/Data yang berkaitan dengan Titik Dasar Teknik/titik batas kawasan dan wilayah, serta Layanan Data Epemeris GPS/CORS	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
		SO.10.00					a. Titik Dasar Teknik/titik batas kawasan dan wilayah								
		SO.10.01					b. Layanan Data Epemeris GPS/CORS								
		SO.10.02					Hubungan Hukum Keagrariaan								
		SO.10.03	AG.11		v	A.	Pengaturan dan Penetapan Hak								

			AG.11.00	v	1.	Penetapan Panitia Pelaksanaan, Penguasaan Benda-benda Milik Belanda (P3MB) Prk 5 yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK	Arsip mengenai Penetapan Panitia Pelaksanaan, yang berkaitan dengan penguasaan Benda-benda Milik Belanda yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK	Terbatas	Penentu kebijakan, penguas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	----------	---	----	--	--	----------	---	----------	--	-------------------------	--

SO.11		AG.11.01		v	2.	Data Pendukung Izin Prinsip Pembelian bangunan dan tanah	Arsip mengenai Data Pendukung Izin Prinsip Pembelian bangunan dan tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
-------	--	----------	--	---	----	--	---	----------	--	----------	--	-----------------------	--

		SO.11.00												
			AG.11.02		v	3.	Klarifikasi penjelasan terkait dengan objek P3MB.PRK 5 dan bekas milik asing dari China	Arsip mengenai klarifikasi penjelasan terkait dengan objek P3MB.PRK 5 dan bekas milik asing dari China	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
		SO.11.01												
			AG.11.03		v	4.	Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing atau Cina dan Keputusan yang diterbitkan oleh instansi lain yang terkait	Arsip yang berkaitan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing atau Cina dan Keputusan yang diterbitkan oleh instansi lain yang terkait	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

		SO.11.03										
		AG.11.05		v	6.	Permohonan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (Masih Dalam Proses)	Arsip mengenai Permohonan penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (Masih Dalam Proses)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

			AG.11.06	v	7.	Permohonan perpanjangan/pembaruan HGU/HGB/HP yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (masih dalam proses)	Arsip mengenai Permohonan perpanjangan/pembaruan HGU/HGB/HP yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (masih dalam proses)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
--	--	--	----------	---	----	---	--	----------	--	----------	--	-----------------------

			AG.11.07		v		8. Permohonan penetapan Hak Guna Usaha yang belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SK (Masih dalam proses)	Arsip mengenai Permohonan terhadap penetapan HGU yang belum ditindaklanjuti penerbitan SK	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
--	--	--	-----------------	--	----------	--	--	---	-------------------	---------------------------------	---------	---	-------------------------

			AG.11.08.		v		9. Inventarisasi Data Tanah Hak	Arsip mengenai Inventarisasi terhadap Data Tanah Hak	Terbatas	Penentu kebijakan, penguas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
--	--	--	------------------	--	----------	--	--	--	----------	---	----------	--	-----------------------	--

			AG.11.09		v		10.	Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, Pemberian/Perpanjangan/Pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Pemberian Hak Atas Ruang, Hak Komunal	Arsip mengenai Surat Keputusan Pemberian Hak Milik, Pemberian/Perpanjangan/Pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Pemberian Hak Atas Ruang, Hak Komunal	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
								a. Risalah Pengolahan Data							
								b. Surat Keputusan							
								c. Nota Dinas SK							

								e. Nota Dinas									
								12. Surat Keputusan Penunjukan Badan Hukum Keagamaan yang dapat memperoleh Hak Milik	Arsip mengenai SK penunjukan Hukum Keagamaan yang bisa menjadi Hak Milik, seperti risalah pengolahan data, surat keputusan, Nota dinas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait			
		SO.11.04						a. Risalah Pengolahan Data									
	SO.12							b. Surat Keputusan									
		SO.12.00						c. Nota Dinas									
		SO.12.01						13. Berkas dukungan administrasi/korespondensi	Arsip mengenai berkas yang merupakan dukungan untuk administrasi maupun korespondensi	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait			
								AG.11.11	v								
								AG.11.12	v								

		SO.12.02												
			AG.11.13		v		14.	Kumpulan tembusan surat/SK dari daerah	Arsip mengenai Kumpulan tembusan surat/SK dari daerah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		SO.12.03	AG.12		v	Pendaftaran Hak Tanah								
		SO.12.04	AG.12.00		v		1.	Warkah Penerbitan Hak Atas Tanah	Arsip mengenai Warkah Penerbitan terhadap Hak Atas Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

SO.13		AG.12.01		v		2. Izin Peralihan Hak	Arsip mengenai izin peralihan hak pada pendaftaran hak tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
	SO.13.00	AG.12.02		v		3. Izin Pelepasan Hak	Arsip mengenai Izin Pelepasan Hak pada Pendaftaran Hak Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			SO.13.01	AG.12.03		v	4.	Warkah Pencatatan dan Informasi Pertanahan	Arsip mengenai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut, khususnya pencatatan dan informasi pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
--	--	--	----------	----------	--	---	----	--	---	----------	--	----------	--	-----------------------	--

		SO.13.03										
		AG.12.05	v	6.	Warkah Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	Arsip mengenai dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengkaitkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
SO.14		AG.13	v		Pembinaan Pejabat Pembuat Akt							

		SO.14.00													
			AG.13.00			v		1.	Permohonan Pengangkatan PPAT untuk pertama kali	Arsip mengenai Permohonan Pengangkatan PPAT untuk pertama kalinya menjabat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

			AG.13.02		v		3.	Permohonan Pindah Wilayah Kerja PPAT	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan permohonan untuk pindah wilayah kerja bagi PPAT	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			AG.13.03		v		4.	Permohonan Pengangkatan kembali PPAT karena mengikuti jabatan notaris	Arsip mengenai Permohonan untuk diangkat kembali menjadi PPAT dikarenakan pernah mengikuti jabatan notaris	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

			AG.13.04		v		5. Permohonan Pensiun PPAT	Arsip mengenai Permohonan Pensiun dari PPAT	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.13.05		v		6. Permohonan cuti PPAT	Arsip mengenai Permohonan cuti dari PPAT	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			AG.13.06		v		7. Rekomendasi Kanwil/Kantah terkait dengan PPAT	Arsip mengenai Rekomendasi dari Kantor Wilayah maupun Kantor Tanah terkait dengan berbagai kegiatan PPAT	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.13.07		v		8. Berita acara penyerahan protokol PPAT	Arsip mengenai Berita acara Penyerahan untuk protokol kegiatan PPAT	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			AG.13.08	v	9.	Data Base PPAT	Arsip mengenai database seluruh kegiatan dan anggota PPAT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
			AG.14	v		Pemberdayaan Hak Atas Tanah							

			AG.14.00		v		1.	Data Penerima manfaat untuk kegiatan Pasca Legalisasi Aset	Arsip mengenai Data Penerima manfaat untuk kegiatan Pasca Legalisasi Aset Tanah atas Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		
			AG.14.01		v		2.	Surat Keputusan Kelompok Kerja untuk kegiatan Legislasi aset lintas sektor	Arsip yang berkaitan dengan Surat Keputusan bagi Kelompok Kerja untuk kegiatan Legislasi aset lintas sektor	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		

			AG.14.02		v	3.	Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Legalisasi Aset Lintas Sektor	Arsip mengenai Laporan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Legalisasi Aset Lintas Sektor	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		
			AG.14.03		v	4.	Laporan Kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah	Arsip mengenai Laporan Kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		
						PENATAAN AGRARIA								
			AG.15		v	A. Penatagunaan Tanah								

			AG.15.00		v	1.	Buku A, B, C Kabupaten Kota	Arsip mengenai Penatagunaan Tanah yang berkaitan dengan Buku A, B, C bagi kabupaten kota	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		
			AG.15.01		v	2.	Neraca Penatagunaan Tanah	Arsip mengenai Neraca Penatagunaan tanah yang berupa Buku Laporan, Album Peta, dan Data Digital	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.		
							a. Buku Laporan							
							b. Album Peta							
							c. Data Digital							
			AG.15.02		v	3.	Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanian	Arsip Mengenai permohonan terhadap pertimbangan teknis urusan Pertanian						

							d. Database Peta Tekstual							
			AG.15.05		v		6. Telaah Analisa Dampak Lingkungan	Arsip mengenai Telaah terhadap Analisa Dampak Lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan diatas	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.16		v		B. Penataan Penguasaan dan							

								AG.16.00	v	1.	Inventarisasi dan Identifikasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Arsip yang berisi inventarisasi dan identifikasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, yang berisi Laporan Hasil Kegiatan, Peta P4T WP3WT, Peta Pertanahan WP3WT, dan Peta Digital	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawasan internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolahan terkait
											a. Laporan Hasil Kegiatan						
											b. Peta P4T WP3WT						
											c. Peta Pertanahan WP3WT						
											d. Peta Digital						

			AG,16.02		v		3.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan	Arsip mengenai Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan yang berupa Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Kawasan, Peta Monitoring dan Evaluasi serta Peta Digital	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
								a. Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Kawasan						
								b. Peta Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan						
								c. Peta Digital						

			AG.17		v	C. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah							
			AG.17.00		v	1. Permohonan Konsolidasi Tanah dari Masyarakat/Pemda/Kantah	Arsip mengenai Permohonan Konsolidasi Tanah yang berasal dari Masyarakat, Pemerintah Daerah, Maupun Kantor Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	

			AG.17.01					2. SK Pembentukan TIM	Arsip mengenai kegiatan SK pembentukan tim untuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------------	--	-------------------	---------------------------------	---------	---	-------------------------	--

			AG.17.03			v	4.	Penyusunan Blok Plan dan Desain	Arsip mengenai kegiatan Penyusunan Blok Plan dan Desain untuk Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
								a. Peta Blok Plan dan Desain Konsolidasi Tanah						
			AG.17.04				5.	Musyawarah Kesepakatan	Arsip mengenai Musyawarah terdapat Peta Desain Konsolidasi tanah yang sudah disepakati	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
								a. Peta Desain konsolidasi tanah yang telah disepakati						

			AG.17.05					6.	Pelepasan Hak Atas Tanah	Arsip mengenai Pelepasan Hak Atas Tanah yang berupa Surat Pelepasan, dan Berita Acara Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
									a. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah						
									b. Berita Acara Penerimaan Pelepasan Hak Atas Tanah						
			AG.17.06					7.	Usulan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah	Arsip mengenai Usulan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			AG.17.07					8.	SK Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah	Arsip mengenai SK penegasan tanah sebagai obyek terhadap konsolidasi tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			AG.17.08					9.	SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Arsip mengenai SK Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			AG.17.10					11. Penetapan/pemberian Hak Atas Tanah	Arsip mengenai penetapan maupun pemberian Hak Atas Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			AG.17.11					12. SK Penetapan Hak Atas Tanah	Arsip mengenai kegiatan penetapan SK atas hak tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			AG.17.12					13.	Penerbitan Sertifikat dan Buku tanah	Arsip mengenai penerbitan sertifikat dan buku tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	------------	--------------------------------------	---	-------------------	---------------------------------	---------	---	-------------------------	--

		AG.18	v	D.	Laporan Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Arsip mengenai Laporan Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, yang berupa permohonan keterangan lokasi konsolidasi tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, penguas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
		AG.18.00	v	1.	Permohonan Keterangan Lokasi Konsolidasi Tanah						
		AG.19	v	E.	Sosialisasi Konsolidasi Tanah						

			AG.19.00		v		1. Bukti Sosialisasi/Penyuluhan	Arsip mengenai Bukti dari Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan dari kegiatan Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
							a. Daftar hadir						
							b. Profil calon lokasi konsolidasi tanah						
			AG.19.01		v		2. Buku dan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah	Arsip mengenai Buku dan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.20		v	F.	Pelaporan Kegiatan Konsolidasi Tanah						

			AG.20.00		v		1.	Monitoring Tindak Lanjut KT	Arsip mengenai kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.20.01		v		2.	Hasil Akhir Kegiatan KT	Arsip mengenai pemaparan Hasil Akhir Kegiatan Konsolidasi Tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			AG.21		v	G	Landreform							

			AG.21.00					1.	SK Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai obyek Landreform	Arsip mengenai pemberian SK penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagai obyek reformasi agraria	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			AG.21.01					2.	SK Persetujuan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan partikelir	Arsip mengenai SK yang bersifat Persetujuan pembayaran ganti rugi tanah kelebihan maksimum, absentee dan Partikelir	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
									a. Berkas usulan pembayaran ganti kerugian dan realisasi pembayaran ganti kerugian							

			AG.21.02					3.	Daftar Penerimaan Redis Perdesa	Arsip mengenai Daftar Penerimaan Redistribusi terhadap Peraturan Desa	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------	---------------------------------	---	-------------------	---------------------------------	---------	---	-------------------------	--

			AG.21.03						4. Daftar Tanah-tanah Partikelir dan Eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw yang terkena UU Nomor 1 tahun 1958	Arsip mengenai daftar Tanah partikelir maupun eigendom seperti yang diatur oleh Uu nomor 1 tahun 1958	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	---	---	----------	--	----------	--	-----------------------	--

			AG.21.04					5.	SK Lokasi Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Arsip mengenai SK lokasi kegiatan Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	----	--	---	-------------------	---------------------------------	---------	---	-------------------------	--

			AG.21.05			6.	Data Spasial dan Tekstual IP4T	Arsip mengenai Data Spasial dan Tekstual IP4T	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
					v	Pengadaan Tanah								

			AG.22.06		v	7.	Hasil Penilaian Obyek Pengadaan Tanah							
			AG.22.07		v	8.	Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian							
			AG.22.08		v	9.	Pembayaran Ganti Kerugian							
			AG.22.09		v	10.	Penitipan Ganti Kerugian							
			AG.22.10		v	11.	Pemutusan Ganti Kerugian							
			AG.22.11		v	12.	Eksekusi Lokasi Pengadaan Tanah							
			AG.22.12		v	13.	Penyerahan Lokasi Pengadaan Tanah							
			AG.22.13		v	14.	Laporan Inventarisasi Data Tanah Pemerintah							
							a. Administrasi							
							b. Survei							
			AG.23		v	B.	Penilaian Tanah							

			AG.23.00	v	1. Laporan Nilai Properti Tanah	Arsip mengenai kegiatan pelaporan Nilai Properti Tanah pada kegiatan Penilaian Tanah	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
--	--	--	-----------------	----------	--	--	----------	--	----------	--	-----------------------	--

			AG.23.01					2.	Lisensi Penilai Pertanahan	Arsip mengenai Lisensi Penilai Pertanahan yang berupa Lisensi Perorangan maupun Lisensi Perbadan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
									a. Lisensi Perorangan							
									b. Lisensi Perbadan							

			AG.23.02		v		3.	Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan	Arsip yang berisi informasi Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
--	--	--	-----------------	--	---	--	----	---------------------------------	---	----------	--	----------	--	-----------------------

			AG.23.03		v	4.	Peta Zona Nilai Tanah	Arsip mengenai Peta Zona Nilai Tanah yang didasarkan pada Survei berdasarkan persepsi, peta penyebaran transaksi jual beli tanah Hasil Updating Peta Zona Nilai tanah, Indeks Nilai tanah, Pembaruan Peta ZNT	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait		
							a. Survei berdasarkan persepsi masyarakat								
							b. Peta Penyebaran Transaksi jual beli tanah								
							c. Hasil Updating Peta Zona Nilai tanah, Indeks Nilai tanah, Pembaruan Peta ZNT								

			AG.24	v	C	Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD	Arsip mengenai Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, maupun BUMD, dimulai dari Permohonan hingga penerbitan Surat Keputusan	Terbatas	Penentuan kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
				v	1.	Permohonan Penetapan Hak Pakai, Hak Milik (sesuai ketentuan), Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha							

						v		2. Klarifikasi penjelasan terkait dengan objek Hak Pakai, Hak Milik (sesuai ketentuan), Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha								
						v		3. Perjanjian Kerja Sama Hak Pengelolaan								
						v		4. Persetujuan Memperoleh HGB di atas Hak Pengelolaan								
						v		5. Surat Keputusan Hak Atas Tanah Pemerintah								
						v		6. Permohonan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang ditolak								

			AG.25		v	D	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tanah	Arsip mengenai Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian bagi Pemanfaatan Tanah	Terbatas	Penentuan kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait		
						VII	Pengendalian Pemanfaatan Ruang								
			AG.26		v	A.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang								

			AG.26.00			v	1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Arsip mengenai kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi mengenai Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
								a. Bahan bimbingan teknis dan supervisi							
								b. Bimbingan teknis dan supervisi							
								c. Pemanfaatan dan Evaluasi bimbingan teknis dan supervisi							

								AG.26.01	v		2.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Arsip mengenai kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Penentuan kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegakan hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
												a. Laporan Pemantauan bidang Pengawasan teknis dan khusus							
												b. Laporan Evaluasi bidang Pengawasan Teknis dan Khusus							

							c. Laporan penyelenggaraan pengawasan teknis dan khusus							
			AG.27		v		B. Penertiban dan Pemanfaatan Ruang							
			AG.27.00		v		1. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di bidang penataan Ruang	Arsip mengenai kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Bidang Penataan Ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
							a. Database PPNS penataan ruang							

								b. Laporan Hasil koordinasi nasional, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS								
								c. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS penataan ruang								

			AG.27.03		v		4.	Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Arsip mengenai Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

			AG.27.04		v	5.	Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Arsip mengenai kegiatan Pelaksanaan Penertiban dan Pemanfaatan Ruang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
			AG.27.05			6.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang	Arsip mengenai Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan						

			AG.27.06		v		7.	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	Arsip mengenai kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
								a. Penerimaan Pengaduan Masyarakat						
								b. Persiapan						
								c. Pengamanan dan Penanganan Tempat Kejadian Perkara						
								d. Laporan Pengawasan, pengamanan, penelitian dan pemeriksaan						
			AG.28		v	C	Penertiban dan Pendayagunaan							

			AG.28.00			v	1.	Identifikasi dan Verifikasi Potensi Tanah Terlantar	Arsip mengenai Identifikasi dan Verifikasi Potensi Tanah yang terlantar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
								a. Penyelenggaraan Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Potensi Tanah Terlantar						
								b. Mengendalikan Kegiatan identifikasi dan verifikasi potensi tanah terlantar						

							c. Evaluasi penyelenggaraan identifikasi dan verifikasi potensi tanah							
			AG.28.01		v	2.	Pembangunan Struktur Data Tanah Terlantar	Arsip mengenai Pembangunan Struktur Data Tanah yang Terlantar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	

									a. Pembangunan struktur data penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan data tanah terlantar								
									b. Mengendalikan pembangunan struktur data tanah terlantar								
									c. Mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan struktur data tanah terlantar								
									d. Laporan Hasil penyimpanan struktur data tanah terlantar								

			AG.28.02				v		3. Pemutakhiran Data Tanah Terlantar	Arsip mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pemutakhiran data terbaru mengenai tanah yang terlantar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
									a. Mengelola/mengumpulkan basis data tanah terlantar						
									b. Laporan data tanah terlantar, data berasal dari penertiban tanah terlantar						

			AG.28.03		v		4. Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar	Arsip mengenai kegiatan Penertiban dan Penetapan Status tanah terlantar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
							a. Penertiban dan Penetapan data terlantar						
							b. Mengendalikan penertiban dan penetapan tanah terlantar						
							c. Evaluasi penertiban dan penetapan tanah terlantar						

								d. Laporan Hasil Penertiban dan Penetapan tanah terlantar							
			AG.28.04			v		5. Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar	Arsip mengenai penetapan Surat Keputusan Tanah Terlantar	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			AG.28.05		v	6.	Pendayagunaan Tanah Terlantar	Arsip mengenai Pendayagunaan Tanah terlantar, mulai dari Analisis, hingga laporan peruntukan tanah terlantar tersebut	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
							a. Analisis peruntukan tanah terlantar							
							b. identifikasi ketersediaan dan kapasitas obyek TCUN							
							c. Analisis pemanfaatan tanah terlantar							

								d. Evaluasi Pemanfaatan tanah terlantar							
								e. Laporan Pemanfaatan tanah terlantar							
								f. Analisis obyek tanah negara bekas tanah terlantar							
								g. evaluasi analisis peruntukan tanah terlantar							
								h. Laporan analisis peruntukan tanah terlantar							
			AG.28.06					7. Syarat Keputusan penetapan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	Arsip mengenai berkas Syarat Keputusan untuk menetapkan peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

								AG.28.07				8.	Surat Keputusan penetapan badan hukum penerima tanah cadangan umum negara	Arsip mengenai SK penetapan badan Hukum penerima tanah cadangan umum negara	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
													VIII Penanganan Masalah Agraria,						
								AG.29	v			A.	Penyelesaian Sengketa dan Konflik						

								e. Hasil/analisis sengketa tanah dan ruang							
								f. Hasil Pengkajian Sengketa Tanah dan Ruang							
								g. Notulen dan berita acara gelar/paparan kasus							
								h. Notulen dan berita acara pelaksanaan mediasi							
		SO.14.01						i. Nota Kesepakatan/perdamaian							
								j. Surat Keluar							

			AG.29.01	v	2.	Penyelesaian Konflik Tanah dan Ruang	Arsip mengenai kegiatan Penyelesaian konflik tanah dan ruang, mulai dari Surat pengaduan hingga nota kesepakatan penyelesaian konflik	Terbatas	Penentu kebijakan, penguas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
						a. Surat Pengaduan							
						b. Resume							
						c. Laporan Hasil Penelitian Data Administrasi, Yuridis, dan Fisik							
						d. SK Tim penyelesaian Sengketa							

								e. Hasil/analisis sengketa tanah dan ruang							
								f. Hasil Pengkajian Sengketa Tanah dan Ruang							
								g. Notulen dan berita acara gelar/paparan kasus							
								h. Notulen dan berita acara pelaksanaan mediasi							
								i. Nota Kesepakatan/perdamaian							
								j. Surat Keluar							

			AG.30.05				6.	Memori banding/kontra memori banding, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali							
			AG.31		v		C.	Penanganan, Pencegahan, dan Pembatalan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang	Arsip yang berkaitan dengan Penanganan, Pencegahan, dan Pembatalan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, mulai dari Surat Gugatan, hingga keluarnya nota kesepakatan perdamaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
			AG.31.00		v		1.	Surat Pengaduan							
							2.	Resume							

									3.	Laporan Hasil Penelitian Data Administrasi, Yuridis dan Fisik								
									4.	Hasil Analisis Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang								
									5.	Hasil pengkajian sengketa dan konflik tanah dan ruang								
									6.	Notulen dan Berita Acara Gelar/Paparan Khusus								
									7.	Risalah Pengolahan Data (RPD)/ Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik tanah dan ruang								
									8.	Keputusan Pembatalan Hak/Sertifikat								
									9.	Notulen dan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi								
									10.	Nota Kesepakatan/Perdamaian								
									11.	Surat Keluar								

			AG.32.02					3.	SK Pembatalan penghentian hubungan hukum sebagai tindak lanjut putusan pengadilan							
			AG.32.03					4.	SK Pembatalan penghentian hubungan hukum karena adanya cacat hukum administrasi							
			AG.32.04					5.	Surat Pemberitahuan/pengumuman Pembatalan							

			AG.33.02		v		3.	Permohonan Informasi kasus agraria, ruang dan tanah	Arsip mengenai Permohonan Informasi Kasus Agraria, Ruang dan Tanah						
			AG.33		v		F.	Laporan Kasus Pertanahan	Arsip mengenai kegiatan Pelaporan Kasus Pertanahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawasan internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
			AG.33.00		v		1.	Laporan perkembangan penanganan kasus pertanahan							

								2.	Laporan perkembangan penanganan kasus pertanahan								
								3.	Laporan Penyelesaian Penanganan Kasus Pertanian								

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
URUSAN KEBUDAYAAN**

KLASIFIKASI				JENIS DOKUMEN/ARSIP		URAIAN		SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH
KODE KLASIFIKASI	P	S	T					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10		
BD		V			KEBUDAYAAN								
	BD.13		V		A.	Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman	Arsip berkaitan dengan kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
	BD.13.00			V	1.	Registrasi Nasional	Arsip berkaitan dengan proses register nasional meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan terhadap objek yang akan diusulkan menjadi cagar budaya, meliputi arsip daftar pemohon usulan yang sudah melakukan registrasi melalui sistem registrasi nasional, arsip tentang daftar tim ahli, arsip hasil identifikasi dan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						a. Pendataan dan Penetapan							
						b. Pengelolaan Data							

	BD.13.01		V		2.	Pelindungan	Arsip berkaitan dengan proses penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Perizinan dan Pengamanan						
						b. Pemeliharaan dan Pemugaran						
					3.	Pengembangan dan Pemanfaatan	Arsip berkaitan dengan proses pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Pengembangan						
						b. Pemanfaatan						
	BD.13.02		V		4.	Eksplorasi dan Dokumentasi	Arsip berkaitan dengan proses eksplorasi, dokumentasi cagar budaya dan permuseuman.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Eksplorasi cagar Budaya						
						b. Dokumentasi Cagar Budaya dan museum						
	BD.13		V		B.	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	Arsip berkaitan dengan kegiatan pembinaan kesenian dan perfilman	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	BD.13.03		V		1.	Pembinaan Seni Pertunjukan	Arsip berkaitan dengan fasilitasi pembinaan seni pertunjukan tradisional dan nontradisional.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Seni pertunjukan						
						b. Seni pertunjukan nontradisional						

	BD.13.04		V		2.	Pembinaan Seni Rupa	Arsip berkaitan dengan fasilitasi pembinaan seni rupa murni dan terapan.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						a. Seni rupa murni							
						b. Seni rupa terapan							
	BD.13.05		V		3.	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film	Arsip berkaitan dengan fasilitasi pembinaan seni literasi dan apresiasi film.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.13.06		V		4.	Dokumentasi dan publikasi	Arsip berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan publikasi, meliputi surat izin kegiatan, undangan, hasil liputan, dan laporan kegiatan.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.14		V		C.	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Arsip berkaitan dengan kegiatan pembinaan kepercayaan kepada Tuhan YME	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.14.00		V		1.	Kelembagaan dan kepercayaan	Arsip berkaitan dengan pemberdayaan lembaga dan hubungan antar lembaga.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						a. Pemberdayaan lembaga							
						b. Hubungan antar lembaga							

	BD.14.01		V		2.	Komunitas Kepercayaan	Arsip berkaitan dengan kegiatan komunitas adat dan upacara adat, meliputi perumusan kebijakan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunitas adat, serta pembinaan tenaga kepercayaan dan tradisi.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Komunitas adat						
						b. Upacara adat						
	BD.14.02		V		3.	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional	Arsip berkaitan dengan kegiatan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	BD.14.03		V		4.	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial	Arsip berkaitan dengan lingkungan budaya dan Pranata Sosial dalam rangka pembinaan.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	BD.15		V	D.	Sejarah Dan Nilai Budaya		Arsip berkaitan dengan kegiatan sejarah dan nilai budaya	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

	BD.15.00		V	1.	Sejarah	Arsip berkaitan dengan kegiatan bidang sejarah meliputi arsip penggalian sumber sejarah dan penulisan sejarah.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
					a. Penggalian sumber sejarah						
					b. Penulisan sejarah						
	BD.15.01		V	2.	Pemetaan nilai	Arsip berkaitan dengan kegiatan pemetaan nilai.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	BD.15.02		V	3.	Verifikasi dan Perumusan Nilai	Arsip berkaitan dengan kegiatan verifikasi dan perumusan nilai.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	BD.15.03		V	4.	Dokumentasi dan Publikasi	Arsip berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan publikasi sejarah nilai sejarah.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

						a. Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah							
						b. Publikasi sejarah dan nilai sejarah							
	BD.15		V		E.	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Arsip berkaitan dengan kegiatan internalisasi nilai dan diplomasi budaya	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.15.04		V		1.	Internalisasi nilai budaya	Arsip berkaitan dengan kegiatan internalisasi nilai budaya.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.15.05		V		2.	Kekayaan budaya	Arsip berkaitan dengan kegiatan kekayaan budaya.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.15.06		V		3.	Warisan budaya nasional dan dunia	Arsip berkaitan dengan kegiatan warisan budaya nasional dan dunia.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	BD.15.07		V		4.	Diplomasi budaya	Arsip berkaitan dengan kegiatan diplomasi budaya.	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
URUSAN PERDAGANGAN**

NO	KLASIFIKASI						SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH					
							P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10					
	KEARSIPAN		V														
				V			Terbatas	Eselon III	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas ANPI	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi						
					V		Terbatas	Eselon III		Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas ANPI	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi						
		HK.00	V				Biasa		Terbuka		Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Pembuat Kebijakan					
	DG		V		PERDAGANGAN												

	DG.00		V	A.	Kebijakan Bidang Perdagangan	Arsip pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang perdagangan yang terdiri dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan kebijakan, serta masukan dan dukungan kebijakan, termasuk perumusan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait	
		PW.00.00	V		1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Arsip terkait dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	

		PW.00.01	V	2.	Penyiapan bahan	Arsip terkait dengan pengakajian dan penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
		PW.00.02	V	3.	Perumusan kebijakan	Arsip terkait dengan perumusan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
		PW.00.03	V	4.	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Arsip terkait masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
		PW.00.04	V	5.	Penetapan dalam bentuk NSPK	Arsip terkait penetapan NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	

				V	6.	Perumusan dan penetapan standar	Arsip terkait tentang pembinaan kepariwisataan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait	
	DG.01			V	B.	Perdagangan Dalam Negeri							
					Bina Usaha								
		DG.01.00		V	1.	Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha	Arsip pembinaan kelembagaan usaha perdagangan dan penguatan usaha (sosialisasi, sarasehan, penyuluhan, bimbingan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		DG.01.01		V	2.	Bisa Usaha Jasa Perdagangan	Arsip pembinaan usaha jasa perdagangan berbasis elektronik maupun usaha jasa perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis (sosialisasi, sarasehan, penyuluhan, bimbingan)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						- Perdagangan berbasis elektronik							
						- J36Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis							

		DG.01.02		V	3.	Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan	Arsip pembinaan usaha dagang asing dan keagenan (sosialisasi, sarasehan, penyuluhan, bimbingan teknis, dls.)	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		DG.01.03		V	4.	Informasi Perusahaan	Arsip mengenai informasi yang terdapat pada perusahaan terkait dengan bina usaha perdagangan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						- Pendaftaran Perusahaan							
						- B37Seksi Analisa LKTP							
		DG.01.04		V	5.	Pelaku Pasar	Arsip yang berkaitan dengan berbagai pelaku pasar yang terlibat dalam kegiatan bina usaha	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	
						Pengecer							
						Pemasok							
					Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri								
		DG.01.05		V	1.	Iklm Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah	Arsip tentang iklim usaha dagang kecil menengah dalam negeri dan produk dalam negeri mulai dari monitoring ketersediaan bahan baku, stabilisasi harga pasar, dan bimbingan teknis.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	

		DG.01.06	V	2.	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah	Arsip fasilitasi usaha serta pameran dan pemasaran usaha dagang kecil menengah dan produk dalam negeri.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	
		DG.01.07	V	3.	Pengembangan Produk Lokal	Arsip mengenai pengembangan produk lokal daerah, mulai dari penelaahan potensi produk hingga fasilitasi dalam rangka pengembangan dan penguatan produk.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	
		DG.01.08	V	4.	Pencitraan Produk Dalam Negeri	Arsip mengenai pencitraan produk dalam negeri seperti kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
				Logistik dan Sarana Distribusi								
		DG.01.09	V	1.	Pengembangan Sarana Distribusi	Arsip mengenai pengembangan sarana distribusi mulai dari perencanaan hingga	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
					Perencanaan							
					Bimbingan teknis							
		DG.01.10	V	2.	Pengelolaan Sarana Distribusi	Arsip mengenai pengelolaan sarana distribusi mulai dari himbangan teknis	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
					Bimbingan teknis pengelolaan							

						Evaluasi pengelolaan							
		DG.01.11		V	3.	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik	Arsip kerja sama pengembangan sistem logistik baik dengan pemerintah maupun	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
						Pemerintah							
						Lembaga non pemerintah							
		DG.01.12		V	4.	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik	Arsip mengenai data dan informasi logistik dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	
					Bahan Pokok dan Barang Strategis								
		DG.01.13		V	1.	Informasi Pasar	Arsip mengenai informasi pasar berupa harga dan non harga untuk bahan pokok dan barang penting mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis termasuk operasi pasar.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya	Unit pengolah terkait	

		DG.01.14	V	2.	Informasi Hasil Industri	Arsip data dan informasi mengenai hasil industri gula, tepung, minyak goreng, dan garam, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
		DG.01.15	V	3.	Barang Strategis	Arsip data dan informasi mengenai barang strategis hasil agro maupun barang strategis hasil industri, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
		DG.01.16	V	4.	Bahan Pokok Agro	Arsip data dan informasi mengenai bahan pokok agro baik serelia maupun hewan dan non serelia, mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, hingga hasil analisis.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
	DG.02		V	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen								
				Standarisasi								
		DG.02.00	V	a	Kelembagaan dan informasi standar	Arsip mengenai kelembagaan beserta informasi standar mengenai standarisasi perdagangan termasuk	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
					Hubungan kelembagaan							
					Informasi standar							

		DG.02.01	V	b	Kerjasama Standarisasi	Arsip mengenai data dan informasi serta publikasi dalam rangka pemberdayaan konsumen	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
					Kerjasama regional							
					Kerjasama bilateral dan multilateral							
		DG.02.02	V	c	Perumusan dan penerapan standar	Arsip mengenai perumusan dan juga penerapan standar yang terkait dengan standarisasi perdagangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
		DG.02.03	V	d	Tata usaha	Arsip mengenai ketatausahaan, termasuk didalamnya kepegawaian, keuangan, perencanaan dan program, serta inventaris kantor/BMAN	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
					Kepegawaian							
					Keuangan							
					Perencanaan dan Program							
					Inventaris Kantor/BMAN							
					Pemberdayaan Konsumen							
		DG.02.04	V	a	Kerjasama, informasi, dan publikasi	Arsip mengenai kerjasama maupun informasi dan publikasi yang terkait dengan pemberdayaan	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	

		DG.02.05		V	b	Analisa penyalenggara perlindungan	Arsip yang berkaitan dengan analisa penyelenggaraan dalam rangka perlindungan konsumen, termasuk didalamnya konsultasi hukum dan analisis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Konsultasi Hukum							
						Analisis							
		DG.02.06		V	c	Bimbingan konsumen dan pelaku	Arsip mengenai bimbingan bagi konsumen dan juga pelaku usaha	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
		DG.02.07		V	d	Fasilitas kelembagaan	Arsip yang berkaitan dengan fasilitas kelembagaan termasuk didalamnya pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen							
						Pemberdayaan badan penyelesaian sengketa							
						Pengawasan Barang beredar dan jasa							

		DG.02.08	V	a	Produk pertambangan dan ane	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan barang yang termasuk produk pertambangan dan olahan maupun aneka industri	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
					Produk pertambangan dan olahan							
					Produk aneka industri							
		DG.02.09	V	b	Produk pertanian, kimia dan ke	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan berbagai produk yang didalamnya termasuk produk pertanian, kimia, dan kehutanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
					Produk pertanian dan kehutanan							
					Produk kimia dan olahan							
		DG.02.10	V	c	Jasa	Arsip yang berkaitan pengawasan jasa yang bersifat distribusi maupun bisnis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
					Jasa Distribusi							
					Jasa bisnis							
		DG.02.11	V	d	Kerjasama	Arsip mengenai kerjasama yang dilakukan antara lembaga pemerintah maupun non pemerintah	Biasa/ Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak	Unit pengolah terkait	
					Metrologi							

		DG.02.12		V	a	Sarana dan Kerjasama	Arsip yang berkaitan dengan sarana dan kerjasama metrologi legal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Sarana metrologi legal							
						Kerjasama metrologi legal							
		DG.02.13		V	b	Kelembagaan dan dan penilaian	Arsip mengenai kelembagaan dan juga penilaian terhadap metrologi legal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Kelembagaan metrologi legal							
						Penilaian kelembagaan metrologi legal							
		DG.02.14		V	c	UTTP dan Standar Ukuran	Arsip mengenai UTTP dan standar suhu yang termasuk didalamnya adalah besaran massa, listrik, tekanan suhu, arus, panjang dan volume	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Besaran Massa, Listrik dan tekanan suhu							
						Besaran arus, panjang dan volume							

		DG.02.15		V	d	Pengawasan	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan terhadap berbagai alat ukur, dan juga barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
						Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya							
						Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional							
		DG.02.16		V	e	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran	Arsip mengenai bimbingan mutu dan pelayanan teknis balai pengujian UTPP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
						Bimbingan Mutu							
						Pelayanan Teknis							
		DG.02.17		V	f	Balai Pengujian UTPP	Arsip yang berkaitan dengan bimbingan mutu dan pelayanan teknis pada balai pengujian UTPP	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	

					J		Arsip mengenai Bimbingan kemetrologian dan pelayanan kemetrologian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
							Bimbingan Kemetrologian						
							Pelayanan Kemetrologian						
						v	Perdagangan Berjangka Komoditi						
							Perniagaan						
					v	a.	Pengkajian pasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Kelembagaan dan pelaku penunjang						
							Pelaku Pasar						

					v	b.	Pengawasan Transaksi	Arsip pengawasan transaksi terhadap kelembagaan dan pelaku penunjang serta pelaku pasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
							Kelembagaan dan pelaku penunjang							
							Pelaku Pasar							
					v	c.	Pengawasan Keuangan dan Audit	Arsip pengawasan keuangan dan audit terhadap kelembagaan dan pelaku penunjang serta pelaku pasar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Kelembagaan dan pelaku penunjang							
							Pelaku Pasar							
							Analisis Pasar							

					v	a.	Pengkajian pasar	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian terhadap pasar seperti pasar fisik dan penyerahan, serta posisi dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
							Pengkajian pasar fisik dan penyerahan Posisi dan pelaporan							
					v	b.	Pengembangan Pasar	Arsip pengembangan terhadap pasar yang berupa kelembagaan dan produk serta tata tertib dan kontrak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Kelembagaan dan Produk Tata tertib dan kontrak							
					v	c.	Sistem informasi	Arsip mengenai sistem informasi dalam pasar yang berkaitan dengan teknologi informasi dan data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	

							Teknologi informasi							
							Data							
							Pasar Fisik dan Jasa							
						v	a. Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pasar lelang serta sistem resi gudang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Pembinaan Penyelenggaran dan pelaku pasar lelang							
							Pembinaan pelaku sistem resi							
						v	b. Pengawasan pasar lelang	Arsip mengenai pengawasan pasar lelang terkait dengan pengawasan transaksi dan penyelenggara pelaku pasar lelang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Pengawasan transaksi							
							Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang							
						v	c. Pengawasan sistem gudang	Arsip mengenai pengawasan sistem gudang pada pengelola agunan dan lembaga sertifikasi, serta lembaga penjamin dan agen penjual	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan	Unit pengolah terkait	
							Pengawasan pengelola agunan dan lembaga							

						Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual						
				v		Bimbingan Teknis	Arsip mengenai Bimbingan teknis pada urusan perdagangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
				v		Evaluasi	Arsip mengenai berbagai evaluasi pada kebijakan perdagangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

**SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KLASIFIKASI						SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DARI DAERAH	
KODE KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN		UNIT PENGOLAH
1		2			3	4	5	6	7	8		9
DK		DK	V		PENDIDIKAN							
	DK.00	DK.00		V	A.	Kebijakan						
	DK.00.00	DK.00.00				1. Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan kebijakan (sejak rancangan hingga penetapan), referensi kebijakan nasional	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.00.01	DK.00.01				2. Memory of Understanding (MoU)	Arsip berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian nota kesepahaman, meliputi: tahapan pra kontrak, kontrak, dan pasca kontrak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya	Unit pengolah terkait
					PEMBINAN PENDIDIKAN							
	DK.01	DK.01		V	B.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	Arsip berkaitan dengan pembinaan pendidikan anak usia dini mulai dari bahan ajar hingga bantuan sosial yang dilakukan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

	DK. 01.01	DK. 01.00		V	1.	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	Arsip berkaitan dengan standar dan petunjuk bahan ajar (alat permainan edukatif)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK. 01.02	DK. 01.01		V	2.	Pelatihan Sosial	Arsip berkaitan dengan kegiatan pembinaan pelatihan sosial anak usia dini	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK. 01.03	DK. 01.02		V	3.	Peringatan Hari anak	Arsip berkaitan dengan kegiatan forum anak nasional, puncak peringatan hari anak, dan penganugerahan Kabupaten, Kota Layak Anak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK. 01.04	DK. 01.03		V	4.	Block Grant	Arsip berkaitan dengan bantuan hibah atau bantuan sosial yang diberikan dari Kementerian Pendidikan kepada untuk lembaga pendidikan/panitia pembangunan sekolah yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah/lembaga pendidikan, program PAUDNI dan Kebudayaan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
DK. 02		DK.02		V	C.	Pendidikan Masyarakat	Arsip berkaitan dengan proses kegiatan pendidikan masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 02.01	DK. 02.00		V	1.	Penyelenggaraan Program	Arsip berkaitan dengan penyelenggaraan program kegiatan pendidikan masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

	DK. 03.01	DK. 02.01		V		3.	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	Arsip berkaitan dengan proses penilaian dan pemberian bantuan sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 03.01	DK. 02.02		V		4.	Pembinaan Program	Arsip berkaitan dengan proses pembinaan program pemberian bantuan sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 03.01	DK. 02.03		V		5.	Lomba/Pemberian Penghargaan	Arsip berkaitan dengan proses kegiatan lomba/pemberian penghargaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 03.01	DK. 02.04		V		6.	Pameran	Arsip berkaitan dengan proses kegiatan pameran	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 03.01	DK. 02.05		V		7.	Rakor	Arsip berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi pemberian bantuan sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK. 03.01	DK. 02.06		V		8.	Sosialisasi	Arsip berkaitan dengan proses kegiatan sosialisasi bantuan sosial	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
DK. 04		DK. 02.07		V		9.	Sertifikasi dan Akreditasi	Arsip yang berkaitan dengan program dan penyelenggaraan, sertifikasi, akreditasi, penilaian lembaga kursus dan pelatihan, pembinaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
DK. 06		DK.03		V	D.	Kursus dan Pelatihan		Arsip yang berkaitan dengan standar kursus dan pelatihan (Kurikulum, silabus, bahan ajar)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
DK. 07		DK.03.01		V		1.	Pendidik dan Tenaga Pendidik	Arsip yang berkaitan dengan bahan ajar, modul, Block grant, data pendidik dantenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

DK.08		DK.04		V	E.	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama							
	DK.08.01	DK.04.00		V		1.	Kurikulum, bahan ajar	Arsip penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum sekolah dasar dan menengah pertama, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan norma, standar,	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.08.02	DK.04.01		V		2.	Block Grant	Arsip berkaitan kegiatan Block Grant (hibah/bantuan sosial) di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.08.03	DK.04.02		V		3.	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	Arsip pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.08.04	DK.04.03		V		4.	Lomba, penghargaan, penganugerahan	Arsip berkaitan kegiatan lomba, penghargaan, dan penganugerahan di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.08.05	DK.04.04		V		5.	Bantuan operasional sekolah (BOS)	Arsip berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.08.06	DK.04.05		V		6.	Bantuan Siswa Miskin	Arsip berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Siswa Miskin	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

DK.09		DK.05		V	F.	Pendidikan khusus/Layanan Khusus							
	DK.09.01	DK.05.00		V		1.	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran	Arsip penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum layanan khusus, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.09.02	DK.05.01		V		2.	<i>Block Grant</i>	Arsip berkaitan kegiatan Block Grant (hibah/bantuan sosial) di tingkat layanan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.09.03	DK.05.02		V		3.	Lomba, festival	Arsip berkaitan kegiatan lomba, dan festival di tingkat layanan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.09.04	DK.05.03		V		4.	Sosialisasi, bimtek	Arsip sosialisasi dan bimtek penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.09.05	DK.05.04		V		5.	Pendataan	Arsip berkaitan pendataan pada pendidikan khusus/pelayanan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.09.06	DK.05.05		V		6.	Kelembagaan	Arsip berkaitan kelembagaan pada pendidikan khusus/pelayanan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
DK.10		DK.06		V	G.	Pendidik dan Tenaga Pendidik							
	DK.10.01	DK.06.00		V		1.	Pendataan dan Pemetaan	Arsip berkaitan dengan pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.10.02	DK.06.01		V		2.	Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik	Arsip berkaitan dengan pembinaan guru dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

	DK.10.03	DK.06.02		V		3.	Peningkatan kualitas guru: Uji kompetensi, sertifikasi	Arsip berkaitan dengan proses peningkatan kualitas guru, meliputi kegiatan uji kompetensi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.10.04	DK.06.03		V		4.	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Arsip berkaitan dengan penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.05	DK.06.04		V		5.	Peningkatan kesejahteraan guru	Arsip berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.06	DK.06.05		V		6.	Sosialisasi, bimtek	Arsip berkaitan sosialisasi dan bimtek guru dan tenaga kependidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.07	DK.06.06		V		7.	<i>Block Grant</i>	Arsip hibah/bantuan sosial untuk menunjang pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
DK.10		DK.07		V	H.	Sekolah Menengah Atas							
	DK.10.01	DK.07.00		V		1.	Kurikulum	Arsip penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.02	DK.07.01		V		2.	Bahan Ajar	Arsip bahan ajar di tingkat sekolah menengah atas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

	DK.10.03	DK.07.02		V	3.	Pelatihan	Arsip pelatihan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.04	DK.07.03		V	4.	Block grant	Arsip hibah/bantuan sosial untuk menunjang pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.05	DK.07.04		V	5.	Bimbinganteknis/sosialisasi	Arsip bimbingan teknis atau sosialisasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembelajaran dan penilaian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.06	DK.07.05		V	6.	Lomba , Sayembara, festival	Arsip berkaitan kegiatan lomba, penghargaan, dan penganugerahan di tingkat sekolah menengah atas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.07	DK.07.06		V	7.	Bantuan operasional Sekolah (BOS)	Arsip berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.10.08	DK.07.07		V	8.	Bantuan siswa miskin	Arsip berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Siswa Miskin	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11	DK.08		V	i.	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus						
	DK.11.01	DK.08.00		V	1.	Bahan ajar	Arsip bahan ajar pendidikan khusus di tingkat sekolah menengah atas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.02	DK.08.01		V	2.	Petunjuk Teknis	Arsip petunjuk teknis pada pendidikan khusus di tingkat sekolah menengah atas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

	DK.11.03	DK.08.02		V	3.	Block grant	Arsip berkaitan kegiatan Block Grant (hibah/bantuan sosial) layanan khusus di tingkat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.04	DK.08.03		V	4.	Sosialisasi, bimtek	Arsip bimbingan teknis atau sosialisasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.05	DK.08.04		V	5.	Lomba, sayembara, jambore, festival	Arsip berkaitan kegiatan lomba, sayembara, jambore, festival di pendidikan khusus	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.06	DK.08.05		V	6.	Kurikulum/bahan pembelajaran	Arsip penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan di pendidikan khusus, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penyusunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	DK.11.07	DK.08.06		V	7.	Alat bantu pembelajaran	Arsip berkaitan alat bantu pembelajaran pada pendidikan khusus di tingkat sekolah menengah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.08	DK.08.07		V	8.	Pendataan	Arsip berkaitan pendataan pada pendidikan khusus di tingkat sekolah menengah atas	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.11.09	DK.08.08		V	9.	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adantif pendidikan inklusi	Arsip berkaitan dengan kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adantif	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.12	DK.09		V	J.	Pendidik dan Tenaga Pendidik						
	DK.12.01	DK.09.00		V	1.	Pendataan dan Pemetaan	Arsip berkaitan dengan pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	DK.12.02	DK.09.01		V	2.	Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidik	Arsip berkaitan dengan pembinaan guru dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait

		DK.12.03	DK.09.02			V		3.	Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik: standar, Uji kompetensi, sertifikasi	Arsip berkaitan dengan proses peningkatan kualitas guru, meliputi kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		DK.12.04	DK.09.03			V		4.	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Arsip berkaitan prestasi kerja guru dan pengawas sekolah	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait
		DK.12.05	DK.09.04			V		5.	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Arsip berkaitan dengan penghargaan guru dan tenaga kependidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait
		DK.12.06	DK.09.05			V		6.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik	Arsip berkaitan kegiatan lomba, penghargaan, dan penganugerahan di tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		DK.12.07	DK.09.06			V		7.	<i>Block grant</i>	Arsip hibah/bantuan sosial untuk menunjang pendidik dan tenaga pendidik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		DK.12.08	DK.09.07			V		8.	Bimbingan teknis/sosialisasi	Arsip berkaitan sosialisasi dan bimtek guru dan tenaga kependidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait
			DK.14			V		K.	Penilaian Pendidikan						
			DK.14.00			V		1.	Penilaian Akademik	Arsip mengenai penilaian akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolahan terkait

DK.14.01			V		2.	Penilaian Non Akademik	Arsip mengenai penikaian non akademik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
DK.14.02			V		3.	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian	arsip mengenai analisis dan sistem informasi penilaian	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
DK.15		V		L.	Data dan Statistik Pendidikan							
DK.15.00			V		1.	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Arsip mengenai data peserta didik, pendidik dan tenaga pendidik meliputi validasi dan integrasi data	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						a. Validasi dan integrasi data peserta didik						
						b. Validasi dan integrasi data pendidik dan tenaga kependidikan						

DK.15.01			V	2.	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran	Arsip mengenai data satuan pendidikan dan proses pembelajaran meliputi validasi dan integrasi data	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
					a. Validasi dan integrasi data satuan pendidikan						
					b. Validasi dan integrasi data proses pembelajaran						
DK.16		V		Prasarana dan Sarana Pendidikan							
DK.16.00			V		Prasarana Pendidikan	Arsip mengenai data dan informasi prasarana pendidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
DK.16.01			V		Sarana Pendidikan	Arsip mengenai data dan informasi sarana pendidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
DK.16.02			V		Monitoring dan Evaluasi	Arsip mengenai monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KLASIFIKASI						JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DARI DAERAH	
KODE KLASIFIKASI			KODE KLASIFIKASI	P	S			T	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN		UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5			6	7	8	12	13		14
DL			DL	V			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	DL.00		DL.00		V		A. Kebijakan Bidang Diklat	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang terdiri dari Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan Kebijakan, Perumusan Kebijakan, dan Masukan dan Dukungan Kebijakan						
		DL.00.00	DL.00.00			V	Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan	Unit Pengolah Terkait	
		DL.00.01	DL.00.01			V	Penyiapan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan	Unit Pengolah Terkait	

		DL.00.02	DL.00.02		V		Perumusan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.00.03	DL.00.03		V		Masukan dan Dukungan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
												Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	DL.01		DL.01		V	B.	Pengembangan Program Dan Pembinaan Diklat							
		DL.01.00	DL.01.00		V		Standarisasi	Arsip yang berkaitan dengan Standarisasi Program	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.01.01	DL.01.01		V		Akreditasi Program/ Institusi yang dinilai	Arsip yang berkaitan dengan Akreditasi Program atau Institusi yang dinilai	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

		DL.01.02	DL.01.02		V		Kurikulum dan Modul	Arsip yang berkaitan dengan Kurikulum/ Silabus dan modul atau bahan ajar diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.01.03	DL.01.03		V		Sistem Informasi	Arsip yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kediklatan tentang Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat yang terdiri dari Data Lembaga Diklat, Data Prasarana Diklat, Data Sarana Diklat, Data Pengelola Diklat, Data Standararisasi Program, Data Akreditasi Program/Institusi, Data Program Diklat Data Kurikulum dan Data Modul	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.01.04	DL.01.04		V		Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.01.05	DL.01.05		V		Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat	Arsip yang berkaitan dengan Konsultasi, Advokasi, Asistensi Diklat dalam rangka Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	DL.02		DL.02	V		C.	Pembinaan Widyaiswara							

		DL.02.00	DL.02.00		V			Seleksi dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan Seleksi dan Pengembangan dalam rangka Pembinaan Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
		DL.02.01	DL.02.01		V			Sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan Sertifikasi Widyaiswara dalam rangka Pembinaan Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
		DL.02.02	DL.02.02		V			Monitoring dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembinaan Widyaiswara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas Internal/Eksternal, Penegak Hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

		DL.02.03	DL.02.03	V		Penilaian	Arsip yang berkaitan dengan Penilaian Widyaiswara dalam rangka Pembinaan Widyaiswara	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait	
		DL.02.04	DL.02.04	V		Konsultasi, advokasi dan asistensi	Arsip yang berkaitan dengan Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara dalam rangka Pembinaan Widyaiswara	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara	Unit Pengolah Terkait	
		DL.02.05	DL.02.05	V		Sistem Informasi	Arsip yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kediklatan tentang Pembinaan Widyaiswara yang terdiri dari Data Seleksi Widyaiswara, Data Widyaiswara, Data Pengembangan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	DL.03		DL.03	V		Penyelenggaraan Diklat							
		DL.03.00	DL.03.00	V		Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan	Arsip yang berkaitan dengan Perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan Diklat seperti Perencanaan Peserta, Pengajar dan Penjadwalan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara	Unit Pengolah Terkait	

		DL.03.01	DL.03.01	V			Penyelenggaraan	Arsip yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Diklat yang terdiri dari Pemanggilan Peserta, Tim Penyelenggara Diklat, Tim Pengajar Diklat, Panduan Diklat, Laporan Panitia Penyelenggara Diklat, Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat, Daftar Peserta Diklat, Bahan Ajar Diklat, Daftar Hasil Peserta Diklat, Daftar Hadir Widyaiswara, Formulir Evaluasi Diklat, Formulir Evaluasi Widyaiswara, Laporan Magang Peserta Diklat, Hasil Formulasi Evaluasi ppeserta Diklat,	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
		DL.03.02	DL.03.02	V			Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat	Arsip yang berkaitan dengan Konsultasi, advokasi dan asistensi Diklat dalam rangka Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

		DL.03.03	DL.03.03		V			Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Arsip yang berkaitan dengan tentang Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran	Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas Internal/ Eksternal, Penegak Hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan n negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait	
		DL.03.04	DL.03.04		V			Sistem Informasi Diklat	Arsip yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kediklatan tentang Penyelenggaraan Diklat yang terdiri dari Data Peserta, Data Tim Penyelenggara Diklat, Data Tim Pengajar Diklat, Data Evaluasi Diklat, Data Evaluasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	DL.04		DL.04		V			Monitoring dan Evaluasi							
		DL.04.00	DL.04.00		V			Penyelenggara	Arsip yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

	DL.00.01	DL.00.01		V		Pasca diklat	Arsip yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	DL.05	DL.05		V		Alumni	Arsip yang berkaitan dengan alumni dari daftar alumni sampai evaluasi alumni pasca diklat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

KLASIFIKASI					JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH
KODE KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	P	S	T			KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
BD		EM	V		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
	EM.13	EM.00		V	A.	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan dibidang geologi, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenaga listrikan, mineral dan batu bara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		EM.13.00			V	1. Pengusulan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengusulan kebijakan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			EM.00.01		V	2.	Penyiapan bahan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan bahan penyusunan kebijakan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.00.02		V	3.	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan	Arsip yang berkaitan dengan pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.00.03		V	4.	Pengumpulan dan pengolahan data	Arsip yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan kebijakan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.00.04		V	5.	Penetapan dalam bentuk NSPK	Arsip yang berkaitan dengan penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

						GEOLOGI								
		EM.13.01	EM.01		V	B. Rekomendasi Kegeologian								
			EM.01.00		V	1. Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah	<p>Arsip yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah/Tanah Longsor dan Banjir Bandang</p> <p>b. Mitigasi Bencana Geologi (Letusan Gunungapi, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah)</p> <p>c. Rencana Kontijensi Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Tsunami dan Gerakan Tanah)</p> <p>d. Analisis Risiko Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Tsunami dan Gerakan Tanah)</p> <p>e. Penetapan Status Aktivitas Gunungapi, Klasifikasi Gunungapi, Kawasan Rawan Bencana Gunungapi, Zona Kerentanan Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Gempabumi, dan Kawasan Rawan Bencana tsunami</p>	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		

			EM.01.01		V	2.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Cekungan Air Tanah dan Teknis Air Tanah Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi dan Lintas Negara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.01.02		V	3.	Pertambangan	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Cekungan Air Tanah dan Teknis Air Tanah Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi dan Lintas Negara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.01.03		V	4.	Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Penentuan Kawasan Panas Bumi dan Pengklasifikasian dan Penghitungan Potensi Mineral dan Panas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.01.04		V	5.	Geosains	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Geologi, Geofisika, dan Geokimia	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	EM.13.02	EM.01.05			V	6.	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.01.06		V	7.	Kelayakan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penetapan Cagar Alam Geologi b. Penyelidikan Geologi Teknik Untuk TPA Sampah c. Penentuan dan Kriteria Kelayakan Geologi Lingkungan Untuk Kelayakan Penambangan d. Penetapan Kawasan Lindung Geologi e. Kajian Wilayah Keprospekan Untuk Penyiapan WUP/WKP Panas Bumi. Mineral dan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.02		V	C.	Penelitian Kegeologian								
EM.13			EM.02.00		V	1.	Administrasi pelaksanaan penelitian	Surat ijin survei/penelitian dan arsip yang berkaitan dengan Pemetaan, Penelitian, Pengkajian, Perencanaan, Survei Pendahuluan, Studi Kelayakan, Pengembangan Wilayah, dan Inventarisasi (proposal, persiapan survei, rencana operasional termasuk jadwal kegiatan, dan presentasi kegiatan)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		

		EM.13.03	EM.02.01		V	2.	Administrasi tenaga penelitian	Arsip yang berkaitan dengan administrasi tenaga ahli internal, eksternal (permohonan dan persetujuan), dan luar negeri (perizinan kedatangan tenaga ahli luar negeri, bantuan teknik/kerjasama penelitian, surat	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.02.02		V	3.	Administrasi penggunaan peralatan penelitian	Arsip yang berkaitan dengan administrasi penggunaan peralatan penelitian	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.02.03		V	4.	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	Arsip yang berkaitan dengan log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
		EM.13.04	EM.02.04		V	5.	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian	Arsip yang berkaitan dengan penelitian dan penyelidikan kegeologian	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.02.05		V	6.	Sumber Daya Geologi	Arsip yang berkaitan dengan penelitian sumber daya geologi (data lapangan, data laboratorium, laporan hasil penelitian, dan peta)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.02.06		V	7.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan penelitian Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (data lapangan, data laboratorium, peta, laporan hasil penelitian dan penyelidikan)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
	EM.13.05		EM.02.07		V	8.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Arsip yang berkaitan dengan penelitian Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (data lapangan, data laboratorium, peta, laporan hasil pengamatan, penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
	EM.13.06		EM.02.08		V	9.	Survei Geologi	Arsip yang berkaitan dengan survei geologi (data lapangan, data laboratorium, peta, laporan hasil penelitian, dan publikasi ilmiah)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
EM.14			EM.03		V	D. Inventarisasi dan evaluasi kegeologian								
	EM.14.00		EM.03.00		V	1.	Sumber Daya Geologi	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi dan evaluasi kegeologian sumber daya geologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.03.01		V	2.	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi dan evaluasi kegeologian vulkanologi dan mitigasi bencana geologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.03.02		V		3.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi dan evaluasi kegeologian air tanah dan geologi tata lingkungan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
		EM.14.01	EM.03.03		V		4.	Survei Geologi	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi dan evaluasi kegeologian survei geologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.03.04		V		5.	Konservasi	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi dan evaluasi kegeologian konservasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.04		V	E.	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi								
		EM.14.02	EM.04.00		V		1.	Peta potensi dan sebaran	Arsip yang berkaitan dengan peta potensi dan sebaran mineral logam, mineral non logam, batubara, gambut, bitumen padat, panas bumi, dan konservasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	

		EM.14.03	EM.04.01		V	2.	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pelayanan Jasa dan Informasi Air Tanah b. Pelayanan Jasa dan Informasi Geologi Lingkungan c. Pelayanan Jasa dan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
	EM.15		EM.04.02		V	3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pelayanan Informasi Bencana Geologi (Gunungapi, Gempabumi, Gerakan Tanah, dan Tsunami b. Pelayanan Foto & Film	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
		EM.15.00	EM.04.03		V	4.	Survei Geologi	Arsip yang berkaitan dengan administrasi pelayanan kegeologian dan penyajian data dan informasi survei geologi (penyajian data dan informasi, analisis cekungan, permodelan, dan kajian prospek, data spasial berbasis geosains, SIM data dan informasi digital geologi dan geofisika, peta topografi, dan pelayanan jasa museum	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
						MINYAK DAN GAS BUMI							
			EM.05		V	A. Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi							

		EM.15.01	EM.05.00		V	1.	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Rencana Jangka Panjang b. Rencana Strategis c. Rencana Tahunan d. Evaluasi dan Pelaporan e. Laporan Tahunan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
		EM.15.02	EM.05.01		V	2.	Rencana dan Realisasi Investasi	Arsip yang berkaitan dengan Rencana dan Realisasi Investasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
		EM.15.03	EM.05.02		V	3.	Penetapan Harga Minyak Mentah	Arsip yang berkaitan dengan: a. Harga <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) b. Formula <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) c. LNG dan LPG <i>Price Reference</i> d. Data Harga Minyak Dunia	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.05.03		V	4.	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Monitoring Lifting b. Prognosa Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi c. Data Estimasi Distribusi <i>Revenue</i> dan <i>Entitlement</i> Pemerintah d. Berita Acara Bagi Hasil SDA Minyak dan Gas Bumi e. Data Ekspor LNG, LPG, Natural Gas f. SK Penetapan Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
			EM.05.04		V	5.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Arsip yang berkaitan dengan bahan pendukung manajemen laporan dan laporan satuan kerja	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait
			EM.05.05		V	6.	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Besaran TKDN lelang b. Verifikasi Penilaian Besaran TKDN Proyek c. Surat pemberitahuan pelaksanaan kerja TKDN (SPPK) d. Laporan Verifikasi TKDN	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

			EM.05.06		V		7.	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri	Arsip yang berkaitan dengan Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Buku Apresiasi Domestik Product (ADP)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.05.07		V		8.	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKBI) dan Rencana Impor Barang (RIB)	Arsip yang berkaitan dengan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKBI) dan Rencana Impor Barang (RIB)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.06		V		B Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi								
			EM.06.00		V		1.	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Berkas Penyiapan, Penawaran, dan Permohonan Wilayah Kerja b. Penetapan Pemenang (Surat Keputusan Menteri) c. Dokumen Kontrak Kerja Sama Migas	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	

			EM.06.01		V	2.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	<p>Arsip yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri</p> <p>b. Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi</p> <p>c. Rekomendasi Pengalihan <i>Interest</i></p> <p>d. Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi</p> <p>e. Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak</p> <p>f. Laporan Data Survei Seismik</p> <p>g. Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester</p> <p>h. Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan</p>	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	----------	----	--------------------------------	--	----------	--	----------	--	-------------------------	--

			EM.06.02		V	3.	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, <i>Reprocessing</i>) b. Penetapan Perusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua c. Penetapan Perusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah d. Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi e. Data Cadangan Strategis/Penyanga Minyak dan Gas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.06.03		V	4.	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.06.04		V	5.	Perpanjangan Kontrak KKS	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen Permohonan dan Persetujuan Perpanjangan Kontrak KKS b. Surat Persetujuan Perpanjangan Kontrak KKS Dari Menteri ESDM c. Kontrak Perpanjangan KKS	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.06.05		V	6.	Penetapan Alokasi dan Harga Gas	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi permohonan penetapan harga gas dan surat persetujuan harga gas oleh Menteri ESDM	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.06.06		V	7.	Partisipasi <i>Interest</i>	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi <i>interest</i>	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.06.07		V	8.	Tumpang Tindih Lahan	Arsip yang berkaitan dengan tumpang tindih lahan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.07		V	C. Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi								
			EM.07.00		V	1.	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pedoman dan Prosedur b. Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penanda sahan) c. Pengawasan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.07.01		V	2.	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.07.02		V		3.	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penetapan harga dan subsidi bahan bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri mulai dari berita acara dan notulen rapat hingga SK penetapan harga bahan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08	V		D.	Teknik dan Lingkungan								
			EM.08.00		V		1.	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Arsip yang berkaitan dengan Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08.01		V		2.	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Berkas permohonan b. Berita Acara Hasil Evaluasi c. Salinan Sertifikat NPT d. Register NPT	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08.02		V		3.	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	Arsip yang berkaitan dengan Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08.03		V		4.	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	Arsip yang berkaitan dengan Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.08.04		V	5.	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan b. Pemeriksaan Kalibrasi Teknis c. Pengawasan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08.05		V	6.	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan b. Pemeriksaan Kalibrasi Teknis dan Kalibrasi Alat Ukur c. Pengawasan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.08.06		V	7.	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Monitoring Analisa Dampak Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) b. Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja Hilir c. Monitoring Terjadinya Pencemaran (CPL), tumpahan minyak d. Hasil Analisa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Kimia	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.08.07		V	8.	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi b. Surat Undangan Presentasi c. Makalah Presentasi d. Surat Persetujuan/Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			EM.08.08		V	9.	Penghargaan Keselamatan Kerja	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan b. Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi c. Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi d. Salinan Tanda Penghargaan e. Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			EM.08.09		V	10.	Usaha penunjang	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan usaha penunjang teknik dan lingkungan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			EM.08		V	E.	Infrastruktur						

			EM.08.00		V	1.	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Perencanaan Program Kerja LPG 3 Kg, Jargas untuk Rumah Tangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Konverterkit untuk transportasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.08.01		V	2.	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur LPG 3 Kg, Jargas untuk Rumah Tangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Konverterkit untuk transportasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.08.02		V	3.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur LPG 3 Kg, Jargas untuk Rumah Tangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Konverterkit untuk transportasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
EM.15			EM.08.03		V	4.	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur LPG 3 Kg, Jargas untuk Rumah Tangga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan Konverterkit untuk transportasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI								
			EM.09		V	A. Penyiapan Program								

			EM.09.00		V	1.	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Usulan Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi b. Usulan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi c. Usulan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.09.01		V	2.	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Arsip yang berkaitan dengan: a. Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga c. Surat Tanggapan Usulan Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.09.02		V	3.	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	Arsip yang berkaitan dengan Penyiapan Program Pemanfaatan Energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.09.03		V	4.	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	Arsip yang berkaitan dengan Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.09.04		V		5.	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	Arsip yang berkaitan dengan Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	
			EM.09.05		V		6.	Penyusunan Neraca Energi	Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Neraca Energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	
			EM.09.06		V		7.	Road Map di Bidang EBT	Arsip yang berkaitan dengan Dokumen Pendukung Proses Penyusunan Road Map dan Road Map	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	
			EM.10		V		B. Panas Bumi								
			EM.10.00		V		1.	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	
			EM.10.01		V		2.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	Arsip yang berkaitan dengan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	
			EM.10.02		V		3.	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	Arsip yang berkaitan dengan Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolah terkait	

			EM.10.03		V	4.	Rekomendasi Bahan Peledak	Arsip yang berkaitan dengan Rekomendasi Bahan Peledak	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.04		V	5.	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	Arsip yang berkaitan dengan Perizinan penggunaan gudang bahan peledak	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.05		V	6.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	Arsip yang berkaitan dengan Izin Tangki Bahan Bakar Cair	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.06		V	7.	Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	Arsip yang berkaitan dengan Persetujuan sertifikasi Welding Procedure Specification (WPS) dan Procedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.07		V	8.	Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Usaha Panas Bumi (IUP)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.08		V	9.	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.10.09			V	10.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.10			V	11.	Penetapan kapasitas usaha panas bumi	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan kapasitas usaha panas bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.11			V	12.	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.12			V	13.	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pengawasan Eksplorasi Panas Bumi b. Pengawasan Eksploitasi Panas Bumi c. Verifikasi Masterlis d. Rekonsiliasi PNB dan Bonus Produksi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.13			V	14.	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi b. Government Drilling c. GREM	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.14			V	15.	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.10.15		V		16.	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.16		V		17.	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10		V	C. Bioenergi									
			EM.10.00		V		1.	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.01		V		2.	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	Arsip yang berkaitan dengan Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.10.02		V		3.	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	Arsip yang berkaitan dengan Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.10.03			V	4.	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.04			V	5.	Evaluasi/Revisi HIP BBN	Arsip yang berkaitan dengan Evaluasi/Revisi HIP BBN	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.05			V	6.	Database Perusahaan Bioenergi	Arsip yang berkaitan dengan Database Perusahaan Bioenergi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.06			V	7.	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.10.07			V	8.	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	

			EM.10.08		V		9.	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	Arsip yang berkaitan dengan: a. Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga c. Surat Tanggapan Usulan Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.11		V		D. Aneka Energi									
			EM.11.00		V		1.	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi	Arsip yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha aneka energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.11.01		V		2.	Penetapan Kapasitas Usaha	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung b. Laporan Hasil Evaluasi c. Surat Keputusan Penetapan Kapasitas	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.11.02		V		3.	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung b. Laporan Evaluasi c. Surat Rekomendasi/ Penetapan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		

			EM.11.03		V		4.	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	Arsip yang berkaitan dengan Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
			EM.11.04		V		5.	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan dan Dokumen Pendukung b. Laporan Hasil Evaluasi c. Surat Rekomendasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
			EM.12	V		E. Konservasi Energi									
			EM.12.00		V		1.	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Penawaran Ikut Program Kemitaraan b. Surat Pernyataan Komitmen c. Laporan Hasil Audit	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.12.01		V		2.	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Keputusan Pelaksana b. Data Survei Implementasi Hasil Audit c. Laporan Hasil Monitoring	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.12.02		V		3.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE	Arsip yang berkaitan dengan: a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Manajer Energi (SKKNI) b. Data Manajer dan Auditor Energi Bersertifikat c. Laporan Hasil Monitoring	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.12.03		V	4.	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.12.04		V	5.	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.12.05		V	6.	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan Tahunan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca b. Laporan Tahunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca Sekretariat Direktorat Jenderal EBTKEtor Energi (RAD-GRK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.12.06		V	7.	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	Arsip yang berkaitan dengan pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.12.07		V	8.	Profil investasi efisiensi energi	Arsip yang berkaitan dengan profil investasi efisiensi energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	

			EM.12.08		V		9.	<i>Investment Grade Audit (IGA)</i>	Arsip yang berkaitan dengan: a. Daftar Obyek Potensial Peserta IGA b. Surat Kesediaan Mengikuti IGA c. Laporan Penilaian Calon Obyek IGA d. Laporan Detail Audit Berkala e. Laporan IGA	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.12.09		V		10.	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	Arsip yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis Bidang EBTKE	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.13		V		F. Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE								
			EM.13.00		V		1.	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga	Arsip yang berkaitan dengan: a. Proposal dan Dokumen Pendukung Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga b. Matriks Evaluasi Dokumen Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga c. Surat Tanggapan Usulan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.13.01		V	2.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE b. Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			EM.13.02		V	3.	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penyusunan Feasibility Study/Detail Engineering Design/Basic Engineering Design b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
			EM.13.03		V	4.	Evaluasi Program Kerja	Arsip yang berkaitan dengan: a. Program Kerja Unit Kerja di Bidang EBTKE b. Program Kerja Prioritas Nasional Bidang EBTKE	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
						KETENAGALISTRIKAN							
			EM.14		V	A. Bina Program Tenaga Listrik							
			EM.14.00		V	1.	Investasi dan pendanaan tenaga listrik	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri b. Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik c. Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik d. Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

			EM.14.01		V		2.	Pengembangan listrik pedesaan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Data program listrik pedesaan b. Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) c. Monitoring dan evaluasi listrik pedesaan d. Listrik untuk masyarakat tidak mampu	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
							3.	Data dan Informasi Ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan data dan Informasi Ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.15		V		B.	Bina Usaha Ketenagalistrikan							
			EM.15.00		V		1.	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL) b. Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan c. Data laporan berkala pemegang Izin	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.15.01		V	2.	Harga dan Subsidi Listrik	Arsip yang berkaitan dengan harga dan subsidi listrik mulai dari dokumen monitoring dan verifikasi usulan dan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin hingga dokumen monitoring dan evaluasi perhitungan dan pelaksanaan subsidi listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.15.02		V	3.	Hubungan komersial tenaga listrik	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan sosialisasi pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan tenaga listrik b. Laporan pelaksanaan P2TL PT PLN (Persero) c. Dokumen fasilitasi perselisihan hubungan komersial tenaga listrik d. Dokumen PPNS Ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.15.03		V		4.	Perlindungan konsumen listrik	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penanganan pengaduan konsumen listrik b. Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik c. Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik d. Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
			EM.16		V		C. Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan									
			EM.16.00		V		1.	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen kegagalan operasi instalasi tenaga listrik b. Dokumen inspeksi rutin Inspektur Ketenagalistrikan untuk kelaikan instalasi dan keselamatan ketenagalistrikan c. Dokumen forum komunikasi pembinaan inspektur ketenagalistrikan nasional	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
			EM.16.01		V		2.	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		

			EM.16.02		V		3.	Usaha penunjang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) b. Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika) c. Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.16.03		V		4.	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik b. Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan c. Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan d. Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.17		V		D. Sertifikasi								
			EM.17.00		V		1.	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	Arsip yang berkaitan dengan dokumen sertifikasi produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.17.01		V	2.	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	Arsip yang berkaitan dengan Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.17.02		V	3.	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	Arsip yang berkaitan dengan Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.17.03		V	4.	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	Arsip yang berkaitan dengan dokumen pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.17.04		V	5.	Registrasi Sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan dokumen registrasi sertifikat badan usaha	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.18		V	E.	Akreditasi Ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan dokumen akreditasi ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.19		V	F.	Standarisasi Kompetensi	Arsip yang berkaitan dengan dokumen standarisasi kompetensi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.20		V	G.	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan							

			EM.20.00		V		1.	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Keputusan pembentukan panitia teknis b. Draft RSNI 1 dan RSNI 2 c. Acuan normatif SNI (SNI, IES, SPLN, ISO, dll)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.20.01		V		2.	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan draft RSNI 3 dan Laporan penetapan hasil forum konsensus	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.20.02		V		3.	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan surat, formulir notifikasi WTO dan Permen pemberlakuan SNI wajib	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.20.03		V		4.	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan berkas pelaksanaan kegiatan dan laporan pengawasan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.21		V		H. Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan								
			EM.21.00		V		1.	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.21.01		V		2.	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.21.02		V	3.	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	Arsip yang berkaitan dengan dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.21.03		V	4.	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT	Arsip yang berkaitan dengan laporan berkala pemegang penunjukan LIT	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.21.04		V	5.	Laporan hasil pengawasan penunjukan	Arsip yang berkaitan dengan laporan hasil pengawasan penunjukan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
						MINERAL DAN BATUBARA								
			EM.22		V	A. Bina Program Mineral dan Batubara								
			EM.22.00		V	1.	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.22.01		V	2.	Rencana Induk Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Rencana Induk Mineral dan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	
			EM.22.02		V	3.	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Investasi Bidang Mineral dan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan sipanun	Unit pengolahan terkait	

			EM.22.03			V	4.	Data dan Informasai Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Data Cadangan Strategis b. Hasil Uji petik Pengelolaan Administrasi Pertambangan c. Data Harga Mineral dan Batubara d. Data Ekspor Mineral dan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.22.04			V	5.	Pelaporan Program Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Tahunan Program Kegiatan Mineral dan Batubara dan Laporan Semester usaha pertambangan Minerba	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.22.05			V	6.	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler	Arsip yang berkaitan dengan a. Perencanaan Wilayah Kerja Ijin Usaha Pertambangan b. Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara Melalui Lelang Reguler	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.22.06			V	7.	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Data wilayah IUP Mineral dan Batubara b. Informasi wilayah IUP Mineral dan Batubara c. Inventarisasi Data IUP d. Pelelangan Wilayah Usaha Pertambangan e. Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.22.07		V		8.	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Rencana Produksi Mineral dan Batubara Nasional b. Rencana Produksi Batubara dari IUP	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.22.08		V		9.	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pemanfaatan Mineral untuk Kebutuhan dalam negeri b. Pasokan Batubara untuk Kebutuhan dalam negeri c. Neraca Mineral & Batubara Nasional d. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam & Non Logam e. Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Mineral & Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.23		V		B. Pembinaan Pengusahaan Mineral									
			EM.23.00		V		1.	Ketenagakerjaan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan tenaga kerja Indonesia Perusahaan kontrak karya, Perusahaan IUP, dan Pemegang izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) b. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Asing KK, IUP, dan IUJP c. Rekomendasi Security clearance di Perusahaan Kontrak Karya (KK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		

			EM.23.01		V	2.	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat di Perusahaan KK b. Pemetaan Kebutuhan Masyarakat sekitar	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.02		V	3.	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan Evaluasi Perselisihan KK dengan masyarakat sekitar tambang KK b. Data Fasilitas Perselisihan ketenaga kerjaan KK c. Laporan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.03		V	4.	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan: a. Kegiatan eksplorasi KK b. Peningkatan tahap eksplorasi c. Survey udara d. Persetujuan study kelayakan e. Dokumen Permohonan Rekomendasi Ekspor Terdaftar (ET) -PP mineral (logam, bukan logam batuan, dan radioaktif) f. Dokumen Permohonan Rekomendasi Penjualan Ekspor (PE) Mineral (logam, bukan logam, batuan, dan radioaktif)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.23.04		V	5.	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral	Arsip yang berkaitan dengan: a. Kegiatan eksplorasi KK b. Studi kelayakan KK c. Pengawasan Tahap Kontruksi d. Komparasi kegiatan eksplorasi pertambangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.05		V	6.	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Produksi Mineral KK dan IUP b. Pemasaran mineral KK dan IUP c. Kebutuhan DMO Mineral d. Laporan Pengawasan pada Perusahaan Kontrak Karya e. Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Mineral	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.06		V	7.	Perizinan usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan IUP, KK sesuai kewenangan hingga Registrasi Perpanjangan IUP	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.07		V	8.	Kontrak Karya (KK)	Arsip yang berkaitan dengan Renegoisasi Kontrak & Dokumen Pendukung Lainnya dan Amandemen Kontrak	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.23.08			V	9.	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan pengadaan barang modal (Masterlist) Perusahaan Mineral hingga Persetujuan Amandemen / perubahan barang modal perusahaan KK	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.23.09			V	10.	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Arsip yang berkaitan dengan Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.23.10			V	11.	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.23.11			V	12.	Teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)	Arsip yang berkaitan dengan teguran kepada pengusaha Kontrak Karya (KK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.23.12			V	13.	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.23.13			V	14.	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Arsip yang berkaitan dengan pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.23.14		V	15.	Pelaporan usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan: a. Triwulan Kontrak Karya (KK) b. RKAB Kontrak Karya (KK) c. Kemajuan Kontrak Karya (KK) d. Laporan Tahunan Kontrak Karya (KK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.15		V	16.	Penghargaan usaha pertambangan mineral	Arsip yang berkaitan dengan penghargaan usaha pertambangan mineral	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.23.16		V	17.	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Arsip yang berkaitan dengan dokumen pendukung dan sertifikat	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24	V		C. Pembinaan Pengusahaan Batubara								
			EM.24.00		V	1.	Ketenagakerjaan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan Tenaga Kerja Indonesia pada Perusahaan Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan PKP2B b. Rekomendasi Penggunaan Tenaga Asing PKP2B/ IUP/IUJP c. Rekomendasi Security Clearance (SC) PKP2B	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.24.01			V	2.	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan Pelaksanaan Community Development (CD) PKP2B/IUP/IUJP b. Laporan Pembangunan Infrastruktur dana Community Development	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.02			V	3.	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Data Perselisihan Usaha Jasa dan Wilayah Kerja PKP2B b. Data Fasilitas Perselisihan Ketenaga Kerjaan PKP2B c. Tumpang Tindih Lahan Usaha Pertambangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.03			V	4.	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Kegiatan Eksplorasi PKP2B hingga Rekomendasi Peningkatan ke tahap kegiatan Konstruksi PKP2B	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.04			V	5.	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Kegiatan Eksplorasi PKP2B b. Study Kelayakan PKP2B c. Data hasil kegiatan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Wilayah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.24.05		V	6.	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut)	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B dan IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.24.06		V	7.	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan perpanjangan dan perubahan luas Wilayah PKP2B hingga IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.24.07		V	8.	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Arsip yang berkaitan dengan Renegoisasi Kontrak PKP2B dan Dokumen pendukung dan Amandemen Kontrak	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.24.08		V	9.	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Arsip yang berkaitan dengan Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.24.09		V	10.	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	Arsip yang berkaitan dengan Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.24.10		V	11.	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.24.11		V	12.	Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	Arsip yang berkaitan dengan teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.12		V	13.	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	Arsip yang berkaitan dengan tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.13		V	14.	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	Arsip yang berkaitan dengan pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.14		V	15.	Pelaporan usaha pertambangan batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Triwulan PKP2B & IUP b. RKAB PKP2B c. Kemajuan PKP2B d. Tahunan PKP2B e. RKAB IUP OPK	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.15		V	16.	Penghargaan usaha pertambangan batubara	Arsip yang berkaitan dengan penghargaan usaha pertambangan batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.24.16		V	17.	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean</i> (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara	Arsip yang berkaitan dengan dokumen pendukung dan sertifikat	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.25	V		D. Penerimaan Negara								

			EM.25.00		V		1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Arsip yang berkaitan dengan: a. Tata Cara Perhitungan PNBP dan Bagi Hasil b. PNBP Penjualan Ekspor Mineral dan Batubara c. Mekanisme penyetoran PNBP d. Penyaluran PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.25.01		V		2.	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Arsip yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Minerba (PKPD) dan Berita Acara Bagi Hasil SDA Minerba	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.25.02		V		3.	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Verifikasi PNBP Usaha Pertambangan hingga Bukti Setor / Surat Tagihan / Surat Paksa Dari KPKNL	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.26		V		E. Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara									
			EM.26.00		V		1.	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)	Arsip yang berkaitan dengan Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.26.01		V		2.	Pengawasan Standardisasi	Arsip yang berkaitan dengan Pengawasan Standardisasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		

			EM.26.02		V	3.	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang	Arsip yang berkaitan dengan: a. Permohonan Pengajuan Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang b. Makalah Presentasi Calon KT c. Persetujuan/Pengesahan Penunjukan Kepala/wakil Kepala Teknik	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			EM.26.03		V	4.	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			EM.26.04		V	5.	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang	Arsip yang berkaitan dengan Dokumen Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait
			EM.26.05		V	6.	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Rekomendasi Teknis Studi AMDAL (Kerangka Acuan AMDAL, ANDAL, RKL/RPL) b. Berita Acara Pembahasan Dokumen AMDAL c. Surat Persetujuan dan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait

			EM.26.06		V	7.	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Permohonan Persetujuan Dokumen UKL/UPL b. Berita Acara Pembahasan Dokumen c. Surat Persetujuan dan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.07		V	8.	Rekomendasi bahan kimia	Arsip yang berkaitan dengan Rekomendasi bahan kimia	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.08		V	9.	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.09		V	10.	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi	Arsip yang berkaitan dengan Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.26.10		V	11.	Pemberian Penghargaan	Arsip yang berkaitan dengan Pemberian Penghargaan: a. Lingkungan Pertambangan b. Keselamatan Kerja c. Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan d. Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.11		V	12.	Pengawasan lingkungan pertambangan	Arsip yang berkaitan dengan Surat Tugas Inspeksi, Tindak Lanjut Hasil Inspeksi, dan Supervisi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.12		V	13.	Usaha Jasa Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.13		V	14.	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara	Arsip yang berkaitan dengan: a. Laporan Pembinaan Usaha Jasa Mineral Dan Batubara b. Laporan Hasil Pengawasan Usaha Jasa Mineral Dan Batubara c. Laporan Hasil Evaluasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.26.14		V	15.	Rekomendasi Teknis	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis b. Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis c. Surat Rekomendasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.15		V	16.	Persetujuan Teknis	Arsip yang berkaitan dengan: a. Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis b. Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis c. Surat Persetujuan Teknis	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.16		V	17.	Pengawasan Teknis	Arsip yang berkaitan dengan: a. Surat Tugas pengawasan b. Tindak Lanjut hasil Pengawasan c. Pemantauan Kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan oleh PEMDA	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.26.17		V	18.	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Surat Tugas Inspeksi Konservasi Minerba dan Tindak Lanjut hasil Inspeksi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	

			EM.26.18		V	19.	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan Berkas & Laporan Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan, dan Peningkatan Pemahaman Aparat PEMDA Bidang Lingkungan Pertambangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
			EM.27		V	A. Program								
			EM.27.00		V	1.	Rencana Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan rencana kerja , administrasi penelitian, pelaksanaan penelitian/pengembangan, hasil penelitian/pengembangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.01		V	2.	Pengembangan dan inovasi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan inovasi program penelitian dan pengembangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.02		V	3.	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	Arsip yang berkaitan dengan dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.27.03			V		4.	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Arsip yang berkaitan dengan advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.04			V		5.	Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.05			V		6.	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.06			V		7.	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.07			V		8.	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.08			V		9.	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan penerbitan jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus, leaflet dan booklet, kamus istilah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			EM.27.09		V	10.	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Arsip yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.10		V	11.	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.11		V	12.	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Arsip yang berkaitan dengan jasa laboratorium penelitian, jasa teknologi industri, jasa studi, jasa penyewaan peralatan, jasa pembantuan tenaga ahli/profesi, jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi, dan buku rekaman barang yang di uji/dikalibrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.27.12		V	13.	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			EM.28		V	B. Sarana Litbang								

			EM.28.00		V		1.	Administrasi penggunaan peralatan	Arsip yang berkaitan dengan administrasi penggunaan peralatan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.28.01		V		2.	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi	Arsip yang berkaitan dengan log-book peralatan survei/peralatan uji kalibrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.29	V		C. Afiliasi									
			EM.29.00		V		1.	Proyek Percontohan	Arsip yang berkaitan dengan Proyek Percontohan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.29.01		V		2.	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Promosi dan Layanan Jasa Teknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.29.02		V		3.	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan	Arsip yang berkaitan dengan HaKI, Kemitraan Intelektual Penelitian dan Pengembangan, dan Bimbingan Teknis	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	

			EM.29.03		V		4.	Penyajian Informasi	Arsip yang berkaitan dengan: a. Sosialisasi/Desiminasi secara manual/Elektronik b. Penerbitan hasil Penelitian dan Pengembangan c. Leaflet dan Booklet d. Kamus Bidang Penelitian dan Pengembangan e. Data Informasi Kelitbangan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait		
			EM.30		V	D. Penelitian dan Pengembangan Kegeologian										
			EM.30.00		V		1.	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan	Arsip yang berkaitan dengan Peta Betimetri, Peta Gravity, Peta Maget, Peta Sebaran Sedimen, Atlas Seismik, dan Pemetaan Batas Landas kontinen	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait		

			EM.30.01		V	2.	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai	Arsip yang berkaitan dengan Peta Potensi Energi dan kewilayahan, Peta Zona Wilayah, Jasa Side Scan untuk Insprastruktur, Analisa data Lingkungan dan Hasil Survei, Aplikasi Geoteknik dan Kebencanaan geologi Kelautan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
			EM.30.02		V	3.	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Peta Batimetri, Gravity, Maget, sebaran sedimen b. Peta Sistem Petroleum pantai dan Lepas Pantai c. Peta Potensi Migas dan lepas Pantai d. Peta Potensi biogenik Gas Pantai dan lepas pantai	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	

			EM.30.03		V		4.	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan	Arsip yang berkaitan dengan: a. Peta Sebaran Sedimen dasar laut b. Peta sebaran potensi sumber daya mineral kelautan c. Peta Sebaran Agregat Pasir Laut d. Peta kandungan mineral jarang kelautan (Unsur Tanah Jarang/REE)	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
			EM.31		V	E. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi								
			EM.31.00		V		1.	Teknologi Eksplorasi	Arsip yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan teknologi eksplorasi: a. Geologi dan Geoinformasi b. Geofisika dan Stratigrafi c. Geokimia dan Sistem Migas	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait

			EM.31.01		V	2.	Teknologi Eksploitasi	Arsip yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan teknologi eksploitasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
			EM.31.02		V	3.	Laboratorium	Arsip yang berkaitan dengan: a. Pemboran Produksi dan Manajemen Migas b. Evaluasi Formasi dan Reservoir c. Peningkatan Pengurusan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait
			EM.31.03		V	4.	Study	Arsip yang berkaitan dengan Studi Pemboran Produksi dan Manajemen Migas dan Studi Evaluasi Formasi dan Reservoir	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolahan terkait

			EM.31.04		V		5.	Teknologi Proses	Arsip yang berkaitan dengan: a. Teknologi Separasi, Katalis dan Pemodelan b. Teknologi Lingkungan, Kimia dan Bioteknologi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.31.05		V		6.	Teknologi Aplikasi Produk	Arsip yang berkaitan dengan teknologi aplikasi produk: a. Bahan Bakar dan Aviasi b. Pelumas c. Lube Oil Blending Plant (LOBP) d. Laboratorium Operasi LOBP	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolahan terkait	
			EM.31.06		V		7.	Teknologi Gas	Arsip yang berkaitan dengan teknologi pemurnian dan analisis gas, teknologi infrastruktur dan pemanfaatan gas	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit pengolahan terkait	
			EM.32		V		F. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara								
			EM.32.00		V		1.	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya	Arsip yang berkaitan dengan eksploitasi tambang dan pengolahan sumber daya dan laboratorium penelitian lingkungan tambang	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	

			EM.32.01		V	2.	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan mineral, laboratorium pengolahan, laboratorium melurgi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.32.02		V	3.	Teknologi Pemanfaatan Batubara	Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan pemanfaatan batubara dan laboratorium penelitian pengolahan batubara	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.33		V	G. Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan								
			EM.33.00		V	1.	Energi baru terbarukan	Arsip yang berkaitan dengan Model Pengembangan Biofuel dan Survei dan Pra-FS Potensi Panas bumi, PLT mikro Hidro, Angin dan Surya di daerah terpilih	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolahan terkait	
			EM.33.01		V	2.	Teknologi Ketenagalistrikan	Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan Teknologi Smart Grid dan Kerjasama pengembangan teknologi PLTMH	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
			EM.33.02		V	3.	Lingkungan dan Konservasi Energi	Arsip yang berkaitan dengan lingkungan dan konservasi energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	

			EM.33.03		V	4.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	Arsip yang berkaitan dengan Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan masyarakat	Unit pengolahan terkait	
--	--	--	-----------------	--	----------	----	--	--	---------------	---------------------------------	---------	--	-------------------------	--

**SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
SEKTORDINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PERHUBUNGAN**

KLASIFIKASI					JENIS DOKUMEN/ARSIP	MASUKAN		URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH	
KODE KLASIFIKASI	KODE KLASIFIKASI	P	S	T					KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH		
1		2			3			4	8	9	10	11	12	10	
HB		HB	V		PERHUBUNGAN										
	HB.00	HB.00		V	A.	Kebijakan teknis dan strategis Bidang Perhubungan				Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan kebijakan, meliputi: pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan dan penyusunan bahan, serta pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
		HB.00.00			1.	Pengkajian dan pengusulan kebijakan				Arsip terkait dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

			HB.00.01		V	2.	Penyiapan kebijakan			Arsip terkait dengan penyiapan kebijakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait
			HB.00.02		V	3.	Perumusan dan penyusunan bahan			Arsip terkait dengan perumusan dan penyusunan bahan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi	Unit pengolah terkait
			HB.00.03			4.	Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			Arsip terkait masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
						5.	Penetapan dalam bentuk NSPK			Arsip terkait penetapan dalam bentuk NSPK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
						Perhubungan Darat									
						Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
						Jaringan Transportasi Jalan :									
HB.01		HB.01		V	B.	Jaringan Prasarana dan Pelayanan :									

		HB.01.00	HB.01.00			V		1.	Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang	Arsip yang berhubungan dengan penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.01	HB.01.01			V		2.	Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C	Arsip yang berhubungan dengan penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.02	HB.01.02			V		3.	Penetapan lokasi terminal barang utama	Arsip yang berhubungan dengan penetapan lokasi terminal barang utama Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.03	HB.01.03			V		4.	Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal	Arsip yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal pengoperasian terminal Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.04	HB.01.04			V		5.	Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi	Arsip yang berhubungan dengan jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

		HB.01.05	HB.01.05		V	6.	Jaringan lintas pada jaringan jalan primer	Arsip yang berhubungan dengan jaringan lintas pada jaringan jalan primer Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.06	HB.01.06		V	7.	Penetapan kelas jalan primer	Arsip yang berhubungan dengan penetapan kelas jalan primer Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.07	HB.01.07		V	8.	Kualifikasi teknis petugas terminal	Arsip yang berhubungan dengan kualifikasi teknis petugas terminal Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi Jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.01.08	HB.01.08		V	9.	Jaringan transportasi jalan sekunder	Arsip yang berhubungan dengan jaringan transportasi jalan sekunder Jaringan Prasarana dan Pelayanan Jaringan Transportasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	HB.02		HB.02		V	C.	Pengembangan Transportasi Jalan :							
		HB.02.00	HB.02.00		V	1.	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Arsip yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.02.01	HB.02.01		V	2.	Pengembangan transportasi jalan	Arsip yang berhubungan dengan pengembangan transportasi jalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			HB.03		V	D.	Sarana Angkutan Jalan							

	HB.03		HB.03.00			V	1.	Pengujian Kendaraan Bermotor						
		HB.03.00						a. Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		HB.03.01						b. Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
		HB.03.01						c. Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
		HB.03.01						d. Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
								e. Kartu induk wajib uji	Arsip yang tercipta dalam penyusunan kartu induk wajib uji berkala kendaraan bermotor	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait

							f. Formulir Hasil Uji Berkala	Arsip yang tercipta dalam penyusunan formulir hasil uji berkala	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
HB.04		HB.03.01			V	2.	Teknologi Kendaraan Bermotor :							
	HB.04.00						a. Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	HB.04.01						b. Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	HB.04.02						c. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	HB.04.03						d. Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
							Lalu lintas jalan							
HB.05		HB.04			V	E.	jemen dan Rekayasa Lalu							

		HB.05.00	HB.04.00		V	1.	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN) jalan nasional di luar kawasan perkotaan, dari mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan (survey dan analisis), laporan akhir	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		HB.05.01	HB.04.01		V	2.	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	HB.06		HB.05		V	F.	Perengkapan Jalan						
		HB.06.00	HB.05.00			1.	Pedoman teknis perlengkapan jalan	Arsip yang berhubungan dengan penyusunan pedoman teknis perlengkapan jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
		HB.06.01	HB.05.01			2.	penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor di jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
		HB.06.02	HB.05.02			3.	akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan penilaian unit penimbangan kendaraan bermotor	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
		HB.06.03	HB.05.03			4.	kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	Arsip yang berhubungan dengan kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor, meliputi: hasil pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi dasar	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

		HB.06.04	HB.05.04				5.	pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Arsip yang berhubungan dengan pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
							Angkutan jalan								
	HB.07		HB.06		V		G. Angkutan Penumpang								
		HB.07.00	HB.06.00			V	1.	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	Arsip yang berhubungan dengan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.07.01	HB.06.01			V	2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Arsip yang berhubungan dengan perizinan trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.07.02	HB.06.02			V	3	Izin trayek antar kota antar provinsi	Arsip yang berhubungan dengan perizinan trayek antar kota antar provinsi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
			HB.06.03			V	4	Rekomendasi izin trayek antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP)	Arsip yang berhubungan dengan Rekomendasi izin trayek antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP)	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.07.03	HB.06.04			V	5	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah	Arsip yang berhubungan dengan perizinan operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

			HB.06.05		V	6.	Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah	Arsip yang berhubungan dengan Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	HB.07.04	HB.06.06			V	7.	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	Arsip yang berhubungan dengan kegiatan penilaian kinerja perusahaan angkutan umum, mulai dari	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	HB.07.05	HB.06.07			V	8.	Pemberian subsidi angkutan umum	Arsip yang berhubungan dengan pemberian subsidi angkutan umum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	HB.07.06	HB.06.08			V	9.	Angkutan perintis	Arsip yang berhubungan dengan penetapan jaringan trayek angkutan jalan perintis	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait
	HB.07.07	HB.06.09			V	10.	Penghargaan perusahaan angkutan umum	Arsip yang berhubungan dengan pemberian penghargaan perusahaan angkutan umum yang melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
HB.08		HB.07			V	H.	Angkutan Barang						

		HB.08.00	HB.07.00			V	1.	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	Arsip yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.08.01	HB.07.01			V	2.	Tarif angkutan barang	Arsip yang berhubungan dengan penetapan tarif angkutan barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.08.02	HB.07.02			V	3.	Izin operasi angkutan barang tertentu	Arsip yang berhubungan dengan perizinan operasi angkutan barang tertentu	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.08.03	HB.07.03			V	4.	Pembinaan angkutan barang	Arsip yang berhubungan dengan pembinaan angkutan barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
			HB.07.04			V	5.	Izin dispensasi angkutan jalan	Arsip yang berhubungan dengan izin dispensasi angkutan jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
							Pengendalian operasional								
	HB.09		HB.08			V	I.	Monitoring Operasional							
		HB.09.00	HB.08.00			V	1.	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Arsip yang berhubungan dengan pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

	HB.09.01	HB.08.01		V	2.	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional	Arsip yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan hukum pengendalian operasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.08.02		V	3.	Berkas Pelanggaran Perda	Arsip yang memuat pelanggaran yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
HB.10		HB.09	V		J.	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil							
	HB.10.00	HB.09.00		V	1.	Pedoman Teknis	Arsip yang berhubungan dengan pedoman operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
	HB.10.01	HB.09.01		V	2.	penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Arsip yang berhubungan dengan penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
	HB.10.02	HB.09.02		V	3.	Bimtek PPNS	Arsip yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan teknis Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
	HB.10.03	HB.09.03		V	4.	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Arsip yang berhubungan dengan pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
						Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan							

						Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	HB.11		HB.10		V	K. Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai,								
		HB.11.00	HB.10.00		V	1. Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan pengumpulan data jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
		HB.11.01	HB.10.01		V	2. Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
	HB.12		HB.11		V	L. Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		HB.12.00	HB.11.00		V	1. Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (neta jaringan	Arsip yang berhubungan dengan pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (neta	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
		HB.12.01	HB.11.01		V	2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan	Arsip yang berhubungan dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait		
			HB.12		V	M. Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								

	HB.13		HB.12.00			V		1.	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan		Arsip yang berhubungan dengan desain dan sistematika pembangunan Sarana Angkutan Sungai, Danau,	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
	HB.14		HB.13			V	N.		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
		HB.14.00	HB.13.00			V		1.	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan		Arsip yang berhubungan dengan kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.14.01	HB.13.01			V		2.	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan		Arsip yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
									Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	HB.15		HB.14			V	O.		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		HB.15.00	HB.14.00			V		1.	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan		Arsip yang berhubungan dengan desain dan sistematika pembangunan pelabuhan sungai, danau dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.15.01	HB.14.01			V		2.	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan		Arsip yang berhubungan dengan pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.15.02	HB.14.02			V		3.	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan		Arsip yang berhubungan dengan kegiatan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	

		HB.16.00	HB.14.03		V		4.	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	HB.16		HB.15		V	P.	Bimbingan Pengelolaan Pelabuhan								
		HB.16.01	HB.15.00		V		1.	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan						
								Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan							
	HB.17		HB.16		V	Q.	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		HB.17.00	HB.16.00		V		1.	Manajemen lalu lintas	Arsip yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
		HB.17.01	HB.16.01		V		2.	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.17.02	HB.16.02		V		3.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Arsip yang berhubungan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	
		HB.17.03	HB.16.03		V		4.	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai	Arsip yang berhubungan dengan proses sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Unit pengolah terkait	

	HB.18		HB.17		V		R.	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		HB.18.00	HB.17.01			V		1. Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas		
		HB.18.01	HB.17.02			V		2. Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Arsip yang berhubungan dengan penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas		
		HB.18.02	HB.17.03			V		3. Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan perambuan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas		
								Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	HB.19		HB.18			V	S.	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
		HB.19.00	HB.18.00			V		1. Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas		
		HB.19.01	HB.18.01			V		2. Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Arsip yang berhubungan dengan persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas		
	HB.20		HB.19			V	T.	Tarif dan Keperintisan								

		HB.20.00	HB.19.00			V		1.	Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan	Arsip yang berhubungan dengan perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
		HB.20.01	HB.19.01			V		2.	Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Arsip yang berhubungan dengan kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
			HB.20			V		U.	Bina Sistem Transportasi Perkotaan							
	HB.21		HB.20.00			V		1.	Jaringan Transportasi Perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan pembinaan sistem transportasi perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
		HB.21.00	HB.20.01			V		2.	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Arsip yang berhubungan dengan transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
		HB.21.01	HB.20.02			V		3.	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi	Arsip yang berhubungan dengan transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
		HB.21.02	HB.20.03			V		4.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) jaringan transportasi perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
			HB.21			V		V.	Lalu Lintas Perkotaan							
		HB.22.00	HB.21.00			V		1.	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	

		HB.22.01	HB.21.01			V		2.	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
		HB.22.02	HB.21.02			V		3.	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Arsip yang berhubungan dengan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.23		HB.22			V		W.	Angkutan Perkotaan							
		HB.23.00	HB.22.00			V		1.	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Arsip yang berhubungan dengan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
		HB.23.01	HB.22.01			V		2.	Jaringan trayek perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan jaringan trayek perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
		HB.23.02	HB.22.02			V		3.	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya	Arsip yang berhubungan dengan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.24		HB.23			V		X.	Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan :							
		HB.24.00	HB.23.00			V		1.	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Arsip yang berhubungan dengan penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	

	HB.24.01	HB.23.01		V	2.	Pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di	Arsip yang berhubungan dengan pemaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.24.02	HB.23.02		V	3.	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah	Arsip yang berhubungan dengan penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
HB.25		HB.24	V		Y.	Dampak Transportasi Perkotaan							
	HB.25.00	HB.24.00		V	1.	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Arsip yang berhubungan dengan penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.25.01	HB.24.01		V	2.	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.25.02	HB.24.02		V	3.	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Arsip yang berhubungan dengan masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	

	HB.25.03	HB.24.03		V	4.	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) di jalan nasional dalam kawasan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.25.04	HB.24.04		V	5.	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.25.05	HB.24.05		V	6.	Masterplan transportasi perkotaan	Arsip yang berhubungan dengan masterplan transportasi perkotaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
					Keselamatan Transportasi Darat								
					Manajemen Keselamatan								
HB.26		HB.25		V	Z.	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan							
	HB.26.00	HB.25.00		V	1.	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Arsip yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi data kecelakaan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.26.01	HB.25.01		V	2.	Kualifikasi unit pengkajian	Arsip yang berhubungan dengan kualifikasi unit pengkajian manajemen keselamatan transportasi darat	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.26.02	HB.25.02		V	3.	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan	Arsip yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
HB.27		HB.26		V	AA.	Pengembangan Keselamatan							
	HB.27.00	HB.26.00		V	1.	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan	Arsip yang berhubungan dengan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	

	HB.27.01	HB.26.01		V	2.	Harmonisasi kebijakan	Arsip yang berhubungan dengan harmonisasi (menyikronkan) kebijakan manajemen pengembangan keselamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
HB.28		HB.27		V	AB.	Promosi dan Kemitraan Keselamatan							
	HB.28.00	HB.27.00		V	1.	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan	Arsip yang berhubungan dengan Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan deseminasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.28.01	HB.27.01		V	2.	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan	Arsip yang berhubungan dengan kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
HB.29		HB.28		V	AC.	Bina Keselamatan Angkutan Umum							
	HB.29.00	HB.28.00		V	1.	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Arsip yang berhubungan dengan pembinaan Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.29.01	HB.28.01		V	2.	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Arsip yang berhubungan dengan pembinaan Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
						Audit dan Inspeksi Keselamatan							
HB.30		HB.29		V	AD.	Audit Keselamatan							

	HB.30.00	HB.29.00		V	1.	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Arsip yang berhubungan dengan pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.30.01	HB.29.01		V	2.	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.30.02	HB.29.02		V	3.	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	Arsip yang berhubungan dengan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
HB.31		HB.30		V	AE.	Inspeksi Keselamatan :							
	HB.31.00	HB.30.00		V	1.	Pedoman keselamatan	Arsip yang berhubungan dengan Pedoman keselamatan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
	HB.31.01	HB.30.01		V	2.	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai	Arsip yang berhubungan dengan Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
	HB.31.02	HB.30.02		V	3.	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi	Arsip yang berhubungan dengan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	
HB.30		HB.31		V	AF.	Parkir							
	HB.30.00	HB.31.00		V	1.	Surat Tugas Juru Parkir	Arsip yang berhubungan dengan proses penerbitan surat tugas juru parkir	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan	Kepala Dinas	

		HB.30.01	HB.31.01			V		2.	Izin tempat khusus parkir swasta	Arsip yang berhubungan dengan proses penerbitan Izin tempat khusus parkir swasta	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	
		HB.30.02	HB.31.02			V		3.	Surat Tugas TKP Pemerintah	Arsip yang berhubungan dengan proses penerbitan Surat Tugas TKP Pemerintah	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Kepala Dinas	

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH
(KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP DAN SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP)**

URUSAN HUKUM

KODE KLASIFIKSI	KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	MASUKAN DARI DAERAH	
1		2			3	4	8	9	10	11	12	13	
HK		HK	V		HUKUM								
	HK.00	HK.00		V	A. Peradilan								
	HK.00.00	HK.00.00		V	1.	Penyelidikan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan registrasi, penerimaan laporan, telaah, surat perintah penyelidikan, pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, penuntutan, penyamaran, hingga pelacakan, laporan hasil penyidikan, surat penghentian penyidikan.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

		HK.00.01	HK.00.01		V	2.	Penyidikan	Arsip yang berkaitan dengan berkas penyelidikan yang ditindaklanjuti, sejak laporan polisi hingga surat perintah penghentian penyidikan (SP3)	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
		HK.00.02	HK.00.02		V	3.	Penuntutan	Arsip yang berkaitan dengan berkas penyidikan yang ditindaklanjuti: sejak registrasi penuntutan hingga penetapan penghentian penuntutan dan pelimpahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara,	Unit pengolah terkait	

	HK.00.03	HK.00.03		V	4.	Koordinasi dan Supervisi	Arsip yang berkaitan dengan sistem pelaporan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana, permintaan informasi, dengar pendapat, laporan kegiatan koordinasi dan supervisi.	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
	HK.01	HK.01		V	B. Persidangan								
	HK.01.00	HK.01.00		V	1.	Pidana	Arsip yang berkaitan dengan persidangan pidana, meliputi: berkas perkara pidana, tanda terima pelimpahan berkas, formulir dan dokumen penunjang berkas perkara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
	HK.01.01	HK.01.01		V	2.	Perdata	Arsip yang berkaitan dengan persidangan perdata, meliputi: berkas perkara perdata, tanda terima pelimpahan berkas, formulir dan dokumen penunjang berkas perkara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Unit pengolah terkait	

		HK.01.02	HK.01.02		V	3.	Tata Usaha Negara	Arsip yang berkaitan dengan persidangan Tata Usaha Negara, meliputi: berkas administrasi gugatan dan alat bukti pendahuluan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
		HK.01.03	HK.01.03		V	4.	Militer	Arsip yang berkaitan dengan peradilan militer, meliputi: berkas perkara pidana militer	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
		HK.01.04	HK.01.04		V	5.	Pengujian UU	Arsip yang berkaitan dengan Peradilan Pengujian Undang-Undang, meliputi: Berkas Permohonan Pengujian Undang-Undang	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

		HK.01.05	HK.01.05		V	6.	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Arsip yang berkaitan dengan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, meliputi: surat permohonan dan perbaikan permohonan, surat kuasa, daftar bukti, akta penerimaan berkas permohonan, akta pemberitahuan kekuranglengkapan berkas perkara, akta registrasi perkara, risalah sidang, berita acara persidangan, keterangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
		HK.01.06	HK.01.06		V	7.	Pembubaran Partai Politik	Arsip yang berkaitan dengan Peradilan Pembubaran Partai Politik, meliputi: berkas perkara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

	HK.01.07	HK.01.07		V	8.	Dugaan tentang Pelanggaran Presiden/Wakil Presiden	Arsip yang berkaitan dengan Dugaan tentang Pelanggaran Presiden/Wakil Presiden	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	HK.01.08	HK.01.08		V	9.	Perselisihan hasil pemilu	Arsip yang berkaitan dengan Sidang Perselisihan hasil pemilu	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
	HK.02	HK.02		V	C.	Eksekusi	Arsip berkaitan dengan eksekusi putusan, meliputi: surat putusan pengadilan, surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, barang bukti, berita acara (BA) pelaksanaan putusan pengadilan, BA pengembalian barang bukti, BA berkas lelang barang bukti, BA tanda	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

HK.03	HK.03	V	D. Bantuan Hukum	Arsip Pemberian bantuan/konsultasi hukum/advokasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
HK.04	HK.04	V	E. Pembinaan						
	HK.04.00		1. Kebijakan Pembinaan Hukum Nasional	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan hukum nasional, dari pengkajian dan pengusulan kebijakan hingga penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

HK.04.01		V	2.	Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan hukum nasional, meliputi program legislasi nasional/daerah, naskah akademik peraturan perundang-undangan, anotasi yurisprudensi, dan kerangka ilmiah perencanaan pembangunan hukum nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
HK.04.02		V	3.	Dokumentasi Hukum	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum, publikasi hasil kegiatan badan pembinaan hukum nasional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

HK.04.03		V			Penyuluhan Hukum	Arsip yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis pembentukan tenaga fungsional penyuluh hukum hingga arsip yang tercipta pada forum koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum seluruh Indonesia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
----------	--	---	--	--	------------------	--	----------	--	----------	--	-----------------------	--

KLASIFIKASI				
KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS ARSIP
		2		3

HT	V			KEHUTANAN
HT.00		V		KEBIJAKAN KEHUTANAN
HT.00.00			V 1	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
HT.00.01			V	Penyiapan Kebijakan
HT.00.02			V	Perumusan Kebijakan

HT.00.03			v		Masukan dan Dukungan Kebijakan
HT.00.04			v		Penetapan NSPK
HT.01		v		2	PENYULUHAN
HT.01.00			v	1	Program Kerja Penyuluhan
HT.01.01			v	2	Materi Penyuluhan
HT.01.02			v	3	Program Penyuluhan
HT.01.03			v	4	Sarana Penyuluhan
HT.01.04			v	5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
HT.01.05			v	6	Pelaksanaan Penyuluhan

HT.01.06			V	7	Pemberdayaan Masyarakat
HT.01.07			V	8	Diseminasi
HT.01.08			V	9	Evaluasi, dan Laporan
HT.02		V			PLANOLOGI KEHUTANAN
HT.02.00			V	A	Perencanaan Kawasan Hutan
				1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan

				2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
				3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutan
HT.02.01			V	B	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
				1	Pengukuhan Kawasan Hutan

				2	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hu
				3	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
HT.02.02			V	C	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
				1	Inventarisasi Sumber Daya Hutan

				2	Pemantauan Sumber Daya Hutan
				3	Pemetaan Sumber Daya Hutan
				4	Jaringan Data Spasial
HT.02.03			V	D	Penggunaan Kawasan Hutan
				1	Penggunaan Kawasan Hutan
				2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengg

				3	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
HT.02.04			V	E	Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfa
				1	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
				2	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
				3	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaat
HT.03			V	4	BINA USAHA KEHUTANAN

HT.03.00			V	A	HPH /HTI/IUPHHK
				1	Data areal HPH/HTI/IUPHHK
				2	SK HPH/HTI/IUPHHK
				3	Kerjasama

				4	Pembatalan/Penolakan
				5	Perpanjangan
HT.03.01			V B		Modal dan Peralatan
				1	Investasi Industri
				2	Peralatan

				3	Tenaga Kerja
				4	Pemegang Saham
				5	Neraca Perusahaan
HT.03.02			V C		Rencana Karya
				1	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

				2	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
				3	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
				4	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
HT.03.03			V D		Produksi
				1	Target Produksi RKT dan Bagan Kerja

				2	Produksi Kayu
				3	Produksi non kayu
HT.03.04			V E		Industri
				1	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK

				2	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
				3	Industri Non Kayu
HT.03.05			V F		Pembangunan Hutan Tanaman Industri
				1	Hutan Tanaman Industri Pulp

					2	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
HT.03.06			V	G		Pelanggaran dan Sanksi
					1	Pemblokiran
					2	Denda
					3	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK

HT.03.07			V	H	Pemanfaatan Hutan Produksi
				1	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
				2	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
				3	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
				4	Pengembangan Investasi Usaha
HT.03.08			V	I	Pengembangan Hutan Alam
				1	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
				2	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil

				3	Produksi Hutan Alam
				4	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan
HT.03.09			V J		Pengembangan Hutan Tanaman
				1	Hutan Tanaman Industri
				2	Hutan Tanaman Rakyat
				3	Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
				4	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
				5	Pembiayaan Hutan Tanaman

HT.03.10			V	K	Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
				1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
				2	Peredaran Hasil Hutan
				3	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
				4	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
HT.03.11			V	L	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

				1	Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan
				2	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
				3	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
HT.03.12			V M		Pembinaan Hutan

				1	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
				2	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
HT.04		V		5	STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN
HT.04.00			V	A	Standardisasi
HT.04.01			V	B	Sarana Pengujian Hasil Hutan
HT.04.02			V	C	Pengembangan
HT.04.03			V	D	Pemasaran Hasil Hutan

HT.04.04			V	E	Pengendalian Lingkungan
HT.04.05			V	F	Angkutan Hasil Hutan
HT.04.06			V	G	Tata Usaha Hasil Hutan
				1	Tanda Pengenal Perusahaan
				2	Legalitas

				3	Palu Tok Kualitas
				4	Pass Angkutan
				5	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
HT.05		V		6	PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI AL/
HT.05.00		V	A		Konservasi Jenis dan Genetik
				1	Flora dan Fauna yang Dilindungi

				2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
				3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
				4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
HT.05.01			V	B	Kawasan Konservasi
HT.05.02			V	C	Pengamanan Hutan
HT.05.03			V	D	Penyidikan dan Perlindungan Hutan

				1	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
				2	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah
				3	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
HT.05.04			V	E	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
HT.05.05			V	F	Bina Cinta Alam

				1	Cinta Alam
				2	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
				3	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
HT.06		V		7	BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
HT.06.00			V	A	Perbenihan
				1	Pemolaan Benih
				2	Kebun Benih
				3	Tegakan Benih
				4	Pengadaan Benih

				5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
				6	Lalu Lintas Angkutan Benih
				7	Pembibitan
				8	Lalu Lintas Angkutan Benih
				9	Pengembangan Usaha Perbenihan
				10	Pengendalian Peredaran Benih
HT.06.01			V B		Rehabilitasi Hutan dan Lahan

HT.06.02			V	C	Tanaman Reboisasi
HT.06.03			V	D	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
HT.06.04			V	E	Perhutanan Sosial
HT.06.05			V	F	Pengendalian Perladangan
HT.07		V		8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
HT.07.01			V	A	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Keh

HT.07.02			V	B	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
HT.07.03			V	C	Diseminasi
				1	Gelar Teknologi
				2	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

Kategori	SISTEM KEAMANAN	
	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES
8	8	9

Arsip terkait dengan proses pengkajian dan pengusulan draf kebijakan perpustakaan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait dengan penyiapan kebijakan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait dengan proses perumusan kebijakan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip terkait dengan masukan kebijakan setiap stakeholder sampai dengan disepakati hasil kebijakan.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait dengan penetapan menjadi NSPK.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait dengan Materi penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait dengan program penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait dengan Psarana penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pengembangan tenaga penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip terkait pemberdayaan masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait diseminasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait evaluasi dan laporan mengenai penyuluhan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait perencanaan, penataan dan statistik kawasan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, kabupaten/kota dan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penyusunan rencana pembangunan kehutanan, penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, mengkoordinasikan perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor, dan/atau, pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

<p>Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip terkait pengukuhan, penatagunaan dan perubahan fungsi kawasan hutan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannya secara lengkap, seperti Status, penggunaan, dan penutupan lahan, Jenis tanah, kelerengan lapangan/ topografi, Iklim, Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam, Kondisi sumber daya manusia dan demografi, Jenis, potensi dan sebaran flora, Jenis, populasi dan habitat fauna, Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan informasi kondisi Hutan yang berada di Indonesia secara menyeluruh</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan informasi pemetaan sumber daya Hutan yang berada di Indonesia secara menyeluruh</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan data yang mengacu pada posisi, objek, dan keterkaitannya dalam ruang kehutanan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip terkait penggunaan kawasan hutan</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>

Arsip yang berkaitan dengan informasi penggunaan kawasan hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pembentukan wilayah pengelolaan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

<p>Arsip terkait data areal, SK, kerjasama, pembatalan serta perpanjangan HPH/HTI/IUPHHK</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Data areal HPH/HTI/IUPHHK</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan SK HPH/HTI/IUPHHK</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Kerjasama</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>

Arsip yang berkaitan dengan Pembatalan/Penolakan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Perpanjangan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait modal dan peralatan usaha kehutanan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Investasi Industri	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Peralatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip yang berkaitan dengan Tenaga Kerja	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pemegang Saham	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Neraca Perusahaan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait rencana karya perusahaan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

<p>Arsip yang berkaitan dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>
<p>Arsip terkait produksi kayu dan non kayu</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Target Produksi RKT dan Bagan Kerja</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>

Arsip yang berkaitan dengan Produksi Kayu	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Produksi non kayu	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait industri kayu dan non kayu	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Industri Non Kayu	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pembangunan hutan tanaman industri	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Hutan Tanaman Industri Pulp	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Hutan Tanaman Industri Pertukangan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pelanggaran dan sanksi di kawasan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan pemblokiran	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan denda	Biasa/terbuka	Pegguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip terkait pemanfaatan hutan produksi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pola Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Informasi Sumber Daya Hutan Produksi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan Investasi Usaha	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pengembangan hutan alam	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip yang berkaitan dengan Produksi Hutan Alam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pengembangan hutan tanaman	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Hutan Tanaman Industri	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Hutan Tanaman Rakyat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pembiayaan Hutan Tanaman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip terkait iuran di area kehutanan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Peredaran Hasil Hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Penertiban Peredaran Hasil Hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pengolahan dan pemasaran hasil hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pembinaan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait standarisasi area kehutanan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait sarana pengujian hasil hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pengembangan area hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pemasaran hasil hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip terkait pengendalian lingkungan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait angkutan hasil hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait tata usaha hasil hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
AM		
Arsip terkait konservasi jenis dan genetik flora dan fauna	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Flora dan Fauna yang Dilindungi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip yang berkaitan dengan Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Lembaga Konservasi/Kebun Binatang	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait kawasan konservasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pengamanan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait penyidikan dan perlindungan hutan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Penyidikan dan Perlindungan Wilayah	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait bina cinta alam	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip yang berkaitan dengan Cinta Alam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Kader Konservasi Sumber Daya Alam	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
DAN PERHUTANAN SOSIAL		
Arsip terkait perbenihan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip yang berkaitan dengan Pemolaan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Kebun Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Tegakan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pengadaan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip yang berkaitan dengan Pengujian dan Penyimpanan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pembibitan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Lalu Lintas Angkutan Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan Usaha Perbenihan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Pengendalian Peredaran Benih	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait rehabilitasi hutan dan lahan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum

Arsip terkait tanaman reboisasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pengelolaan DAS	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait perhutanan sosial	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait pengendalian perladangan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum
Arsip terkait penelitian, pengkajian dan pengembangan hutan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

Arsip terkait monitoring dan evaluasi hasil penelitian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip terkait diseminasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Gelar Teknologi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal
Arsip yang berkaitan dengan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal

AN DAN AKSES ARSIP DINAMIS			MASUKAN DARI DAERAH
AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
10	11	12	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

**RANCANGAN KEI
SIS**

KLASIFIKASI		KLASIFIKASI				JENIS ARSIP/DOKUMEN
KODE KLASIFIKASI		KODE KLASIFIKAS I	P	S	T	
1		1	2			
KA		KA	V			KEARSIPAN
	KA.00	KA.00		V		1 Kebijakan Kearsipan
	KA.00.00	KA.00.00			V	A Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan
	KA.00.01	KA.00.01			V	B Perumusan Kebijakan
	KA.00.02	KA.00.02			V	C Masukan dan Dukungan Kebijakan
		KA.00.03				D Penetapan NPSK
		KA.01		V		2 PEMBINAAN KEARSIPAN
		KA.01.00			V	A Akreditasi Kearsipan: Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, dan Diklat Kearsipan

									1. Proses Akreditasi
									2. Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi
									3. Data Base Sertifikasi Arsiparis
			KA.01.01			V		B	Sertifikasi Arsiparis
									1. Proses Sertifikasi Arsiparis
									2. Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis
									3. Data Base Sertifikasi Arsiparis
			KA.01.02			V		C	Bina Arsiparis

			KA.01.04			V		E Supervisi dan Evaluasi
								1 Perencanaan
								2 Pelaksanaan
								3 Laporan hasil supervisi dan Evaluasi
			KA.01.05			V		F Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
			KA.01.06			V		G Fasilitas Kearsipan
								1 SDM Kearsipan
								2 Prasarana dan Sarana
			KA.01.07			V		H Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
								1 Penyelenggaraan
								2 Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
			KA.01.08			V		I Jadwal Retensi Arsip

									1 Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
									2 Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip
				KA.02					3 PENGELOLAAN ARSIP
				KA.02.00			V A		Pengelolaan Arsip Dinamis
	KA.01							1	Penciptaan
		KA.01.00						a	Pencatatan
		KA.01.01							Buku Agenda

		KA.01.02							Kartu Kendali
		KA.01.03							Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
		KA.01.04						b	Pendistribusian
	KA.02							2	Penggunaan

		KA.02.00							Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip
		KA.02.01							Peminjaman
	KA.03							3	Pemeliharaan
		KA.03.00						a	Pemberkasan

		KA.03.05					c	Penyusunan daftar arsip inaktif
		KA.03.06						Penyimpanan arsip
		KA.03.07						Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif
		KA.03.08						Pengamanan

	KA.04					d	Alih Media
		KA.04.00					Kebijakan alih media
		KA.04.01					Autentikasi
		KA.04.02					Berita acara
		KA.04.03					Daftar arsip yang alih mediakan

	KA.05						e	Program Arsip vital
		KA.05.00						Identifikasi
		KA.05.01						Pelindungan dan pengamanan

		KA.05.02							Penyelamatan dan pemulihan
	KA.06							4	Autentikasi Arsip Dinamis
		KA.06.00						a	Pembuktian Autentisitas
		KA.06.01						b	Pendapat tenaga ahli
		KA.06.02						c	Pengujian

		KA.06.03						d	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip
	KA.07							5	Penyusutan
		KA.07.00							a. Pemindahan Arsip Inaktif
									- Berita acara Pemindahan
									- Daftar arsip yang di pindahkan

		KA.07.01								b. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
										- Panitia penilai
										- Penilaian panitia penilai
										- Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)
										- Penetapan arsip yang dimusnahkan

									- Berita Acara Pemusnahan Arsip
									- Daftar arsip yang dimusnahkan
		KA.07.02							c. Penyerahan arsip statis
									- Pembentukan Panitia Penilai
									- Notulen Rapat Panitia
									- Surat pertimbangan Panitia Penilai
									- Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan

									- Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip
									- Keputusan Penetapan Penyerahan
									- Berita Acara Penyerahan Arsip
									- Daftar arsip yang diserahkan
	KA.08								6 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
		KA.08.00							- Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
		KA.08.01							- Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
								V B	PENGELOLAN ARSIP STATIS

	KA.09							1.	Akuisisi
		KA.09.00						a	Monitoring fisik dan daftar
		KA.09.01						b	Verifikasi terhadap daftar arsip
		KA.09.02						c	Menetapkan status arsip statis
		KA.09.03						d	Persetujuan untuk Penyerahan

										-Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip
	KA.11									3. Daftar Pencarian Arsip Statis
		KA.11.00								a Pengumuman
		KA.11.01								b Akuisisi daftar pencarian arsip statis
		KA.11.02								4. Penghargaan dan Imbalan
	KA.12									5. Pengolahan
		KA.12.00								a Menata Informasi
		KA.12.01								b Menata Fisik
		KA.12.02								c Menyusun Sarana Bantu Temu Balik
										- Guide
										- Daftar Arsip Statis
										- Inventaris Arsip Statis

									6. Preservasi
	KA.13								a Preventif
		KA.13.00							- Penyimpanan
		KA.13.01							- Pengendalian hama terpadu
		KA.13.02							- Reproduksi (Alih Media)
		KA.13.03							1. Berita Acara alih media
		KA.13.04							2. Daftar Arsip yang dialih mediakan
		KA.13.05							- Perencanaan dan Penanggulangan Bencana
	KA.14								b Kuratif
		KA.14.00							- Perawatan Arsip
		KA.14.01							c Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi

	KA.15							7	Autentikasi Arsip Statis
		KA.15.00						a	Pembuktian Autentisitas
		KA.15.01						b	Pendapat tenaga ahli
		KA.15.02						c	Pengujian
		KA.15.03						d	Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan
	KA.16							8	Akses Arsip Statis
		KA.16.00						a	Layanan Arsip

		KA.16.01						b	Penerbitan arsip Sumber
									-Administrasi dan proses penyusunan
									-hasil arsip sumber arsip
		KA.06.02						c	Pameran arsip
								9	Jasa Kearsipan
								a	Konsultasi Kearsipan
								b.	Manual Kearsipan
								c	Penataan Arsip
								d	Otomasi Kearsipan
								e	Penyimpanan Arsip
								f	Perawatan dan Pemeliharaan Arsip

	KA.19		KA.19		V			Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
		KA.19.00	KA.19.00			V		Persiapan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
		KA.19.01	KA.19.01			V		Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
		KA.19.02	KA.19.02			V		Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.
	KA.20		KA.20		V			Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
		KA.20.00	KA.20.00			V		Permohonan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan

		KA.20.01	KA.20.01			V		Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan
		KA.20.02	KA.20.02			V		Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan

**BIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

URUSAN KEARSIPAN

URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS			
	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN
4	5	6	7	8
arsip terkait nota dinas, surat undangan, surat penyampaian draf pengkajian dan draf pengkajian kebijakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
surat, nota dinas dan berkas lainnya terkait perumusan kebijakan.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait masukan dan dukungan kebijakan	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
Arsip yang berkaitan dengan penetapan NPSK	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan Proses Akreditasi	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
Arsip yang berkaitan dengan Proses Akreditasi Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Proses Akreditasi Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Proses Sertifikasi Arsiparis	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Sertifikasi Arsiparis	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan Profesi Arsiparis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Bimbingan Konsultasi Arsiparis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Penilaian Arsiparis	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Berkas Penetapan Arsiparis Teladan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Arsiparis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Unit Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Sumberdaya Manusia	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan perencanaan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Pelaksanaan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Laporan hasil supervisi dan Evaluasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan SDM Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Prasarana dan Sarana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Arsip yang berkaitan dengan Pengusulan dan Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait pencatatan arsip, buku agenda, kartu kendali, lembar pengantar/buku ekspedisi, dan pendistribusian.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Pencatatan Arsip. Pencatatan arsip dilakukan untuk menciptakan sebuah keterangan yang jelas mengenai kondisi sebuah arsip maupun di mana letak penyimpanannya	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan buku agenda, buku agenda surat masuk merupakan sarana berupa buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

<p>Arsip yang berkaitan dengan Kartu Kendali. Kartu Kendali adalah Lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali.</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan buku ekspedisi, Buku ekspedisi adalah sarana pengiriman surat yang berfungsi sebagai tanda bukti bahwa surat sudah dikirim melalui Subbag Persuratan dan Penggandaan dengan menggunakan jasa pengiriman.</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>
<p>Pendistribusian Arsip adalah penyampaian Arsip atau pengendalian Arsip dari satu unit kerja ke unit kerja lain di lingkungan instansi</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>arsip terkait penggunaan arsip, peminjaman dan klasifikasi arsip</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan proses pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Peminjaman Arsip.</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>
<p>arsip yang terkait dengan berkas, daftar arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengaturan fisik, pengolahan informasi arsip, penyusunan daftar arsip inaktif, skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif, pengamanan, alih media, serta program arsip vital</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>arsip yang terkait dengan pemberkasan, pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>

arsip yang berkaitan dengan daftar arsip aktif. Daftar Arsip Aktif adalah daftar yang berisikan uraian informasi dari arsip aktif yang terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan penataan arsip inaktif. Penataan Arsip inaktif terdiri dari empat tahap yaitu pemeriksaan, penataan arsip dalam boks, penomoran arsip dalam boks dan penataan boks dalam rak	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pengaturan fisik arsip. Penataan Fisik arsip terdiri dari penataan arsip dalam boks, penomoran boks dan pelabelan dan pengaturan penempatan boks pada tempat penyimpanan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pengolahan informasi arsip. Pengolahan informasi arsip menghasilkan daftar informasi tematik yang paling sedikit memuat judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan dan kurun waktu.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

<p>Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan daftar arsip inaktif, Penyusunan daftar arsip inaktif memuat informasi tentang pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip/berkas, kurun waktu, jumlah dan tingkat perkembangan, keterangan (media arsip, kondisi, dll), nomor definitif folder dan boks, lokasi simpan (ruangan dan nomor rak), jangka simpan dan nasib akhir, <u>kategori arsip</u>.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan penyimpanan Arsip baik arsip aktif maupun inaktif.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>arsip yang berkaitan dengan pengamanan arsip. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan alih media arsip, Alih Media Arsip memiliki beberapa prosedur yaitu penyeleksian/penilaian arsip yang akan dilakukan alih media, pemindaian/scanning arsip, penyusunan berita acara dan daftar arsip alih media dan pelaksanaan autentikasi arsip hasil alih media</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Kebijakan Alih media. Kebijakan alih media arsip antara lain meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi), prasarana dan sarana, serta penentuan pelaksana alih media.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan autentikasi arsip. Autentikasi merupakan proses pemberian tanda dan/ataupernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.</p>	<p>terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan berita acara baik berita acara pemindahan maupun penyusutan arsip</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan daftar arsip yang telah di alih mediakan.</p>	<p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan Program Arsip vital</p>	<p>Rahasia</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan Identifikasi Arsip vital, Identifikasi Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan pendataan dan penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip vital</p>	<p>Rahasia</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan perlindungan dan pengamanan arsip vital. Perlindungan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk mengamankan, menyelamatkan dan memulihkan arsip vital dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu prosedur tetap. Pengamanan Arsip Vital adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan</p>	<p>Rahasia</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.</p>

arsip yang berkaitan dengan penyelamatan dan pemulihan arsip vital. Penyelamatan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk memindahkan (evakuasi) arsip vital ke tempat yang lebih baik. Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital yang rusak akibat	Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
arsip terkait dengan pembuktian autentisitas, Pendapat tenaga ahli, Pengujian, Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pembuktian autentisitas arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pendapat tenaga ahli	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip yang berkaitan dengan pengujian	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

arsip yang berkaitan dengan Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait dengan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak bernilai dan penyerahan arsip statis.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pemindahan arsip inaktif, Kegiatan pemindahan Arsip Inaktif meliputi kegiatan, Penyeleksian Arsip Inaktif, Penataan Arsip Inaktif dan Pembuatan daftar Arsip Inaktif.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan berita acara pemindahan, Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan daftar arsip yang akan di pindahkan. Daftar arsip yang akan di pindahkan sekurang-kurangnya berisi: nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip dan keterangan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan panitia penilai. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Penilaian panitia penilai	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Penetapan arsip yang dimusnahkan, Pimpinan Pencipta Arsip mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI/gubernur/bupati/walikota/rektor sesuai wilayah kewenangannya dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Arsip yang berkaitan dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Daftar arsip yang dimusnahkan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan penyerahan arsip statis, prosedur penyerahan arsip statis terdiri dari Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah, Penilaian, Pemberitahuan Penyerahan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan pembentukan panitia penilai	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip berkaitan dengan surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Arsip yang berkaitan dengan Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Keputusan Penetapan Penyerahan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Berita Acara Penyerahan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Daftar arsip yang diserahkan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait pengelolaan arsip aktif dan pengelolaan arsip inaktif	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Pengelolaan Arsip Aktif	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
S				

arsip terkait monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan, berita acara penyerahan arsip, dan daftar arsip yang diserahkan.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Monitoring fisik dan daftar	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Verifikasi terhadap daftar arsip	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Menetapkan status arsip statis	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Persetujuan untuk Penyerahan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Arsip yang berkaitan dengan Penetapan arsip yang diserahkan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Berita Acara Penyerahan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Daftar arsip yang diserahkan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait administrasi pelaksanaan sejarah lisan, hasil wawancara sejarah lisan (berita acara wawancara sejarah lisan, laporan kegiatan, hasil wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Hasil Wawancara Sejarah Lisan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Berita Acara wawancara Sejarah Lisan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Laporan Kegiatan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait daftar pencarian arsip statis (pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis, akuisisi daftar pencarian arsip statis)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip yang berkaitan dengan pengumuman	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Akuisisi daftar pencarian arsip statis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait penghargaan dan imbalan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait dengan menata informasi, menata fisik, menyusun sarana bantu temu kembali (guide, daftar arsip statis, inventaris arsip statis)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Menata Informasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Menata Fisik	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Menyusun Sarana Bantu Temu	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Guide	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Daftar Arsip Statis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Inventaris Arsip Statis	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

arsip terkait dengan penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media), berita acara alih media, daftar arsip yang dialih mediakan, perencanaan dan penanggulangan bencana kuratif, dan perawatan arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan penyimpanan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Pengendalian hama terpadu	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Reproduksi (Alih Media)	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Berita Acara alih media	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Daftar Arsip yang dialih mediakan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan kuratif	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Perawatan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

arsip terkait dengan pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, dan penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan.	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Pembuktian Autentisitas	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip yang berkaitan dengan Pendapat tenaga ahli	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Pengujian	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait dengan akses arsip, layanan arsip, penerbitan arsip sumber, administrasi dan proses penyusunan, hasil arsip sumber dan pameran arsip.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Layanan arsip adalah penyediaan arsip statis kepada pengguna arsip statis yang sah, termasuk penggunaan arsip statis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan penerbitan sumber arsip. Naskah sumber arsip adalah buku untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan sekelompok arsip yang berkaitan dengan suatu tema atau masalah tertentu	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Administrasi dan proses penyusunan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan hasil arsip sumber arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pameran dari awal proses sampai evaluasi dan pelaporan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Konsultasi Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Manual Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Penataan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Otomasi Kearsipan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan penyimpanan arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

Arsip yang berkaitan dengan Data Base Jasa Kearsipan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
Arsip terkait Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN, JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait perencanaan menjadi simpul jaringan SIKN melalui JIKN	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait Pendidikan dan pelatihan materi simpul jaringan SIKN melalui JIKN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Pengelolaan informasi arsip simpul jaringan SIKN melalui JIKN	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
Arsip yang berkaitan dengan Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Perencanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Pelaksanaan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait evaluasi dan pelaporan pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

arsip yang berkaitan dengan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Persiapan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Pelaksanaan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip terkait Evaluasi dan Pelaporan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan kelurahan.	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
arsip yang berkaitan dengan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait Permohonan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

arsip terkait Kajian/Telaah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
arsip terkait Penolakan/Pemberian izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

IAMIS	
UNIT PENGOLAH	MASUKAN DARI DAERAH
9	10

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

Unit pengolahan terkait	
Unit pengolahan terkait	
Unit pengolahan terkait	
Unit pengolahan terkait	
Unit pengolahan terkait	

Unit pengolahan terkait	

Unit pengolahan terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolahan terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	

Unit pengolahan terkait	
Unit pengolahan terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

Unit pengolah terkait	
Unit pengolah terkait	

**RANCANGAN KEBIJAKA
SISTEM KLA
URUSAN I**

KLASIFIKASI					JENIS DOKUMEN/ARSIP		
KODE KLASIFIKASI		KODE KLASIFIKASI	P	S			
1		2	3			4	
KB			KB			KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA E	
	KB.00		KB.00		V	Kebijakan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	
		KB.00.00	KB.00.00			V	Pengkajian dan pengusulan kebijakan
		KB.00.01	KB.00.01			V	Penyiapan kebijakan

		KB.00.02	KB.00.02			V		Perumusan Kebijakan
		KB.00.03	KB.00.03			V		Masukan dan dukungan kebijakan
		KB.00.04	KB.00.04			V		Penetapan NSPK
								PENGENDALIAN PENDUDUK
								A. Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk
	KB.01		KB.01			V		1) Analisis pemaduan kebijakan pengendalian pe
		KB.01.00	KB.01.00			V		a) pengumpulan dan pengolahan data

		KB.01.01	KB.01.01			V		b) evaluasi dan pelaporan
	KB.02		KB.02			V		2. Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian
		KB.02.00	KB.02.00			V		a) Penyiapan fasilitas
		KB.02.01	KB.02.01			V		b) Evaluasi dan pelaporan
								B. Perencanaan pengendalian penduduk
	KB.03		KB.03			V		1) Profil dan proyeksi penduduk
		KB.03.00	KB.03.00			V		a) Data profil dan proyeksi penduduk

		KB.03.01	KB.03.01			V		b) Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
	KB.04		KB.04			V		2) Penetapan parameter pengendalian
		KB.04.00	KB.04.00			V		a) Penetapan sasaran parameter
		KB.04.01	KB.04.01			V		b) Evaluasi sasaran parameter
	KB.05		KB.05			V		3) Pemanfaatan perencanaan pengendalian
		KB.05.00	KB.05.00			V		a) Pemanfaatan profil dan proyeksi

		KB.05.01	KB.05.01			V		b) Pemanfaatan parameter
								C. Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
			KB.06					1) Pengembangan Sistem
			KB.06.00					a) Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
			KB.06.01					b) Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

			KB.08.00					a) Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
			KB.08.01					b) Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
								D. Analisis Dampak Kependudukan
			KB.09					1) Analisis Sosial
			KB.10					2) Analisis Ekonomi

			KB.11					3) Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
			KB.12					4) Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
								KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPR
	KB.06				V			A. Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah
	KB.06.00	KB.13			V			1) Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah

		KB.06.01	KB.14			V		2) Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
		KB.06.02	KB.15			V		3) Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
		KB.06.03	KB.15.00			V		a) Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
		KB.06.04	KB.15.01			V		b) Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

	KB.07				V		B. Bina kesertaan keluarga berencana jalur swas
		KB.07.00	KB.16			V	1) Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
		KB.07.01	KB.17			V	2) Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
		KB.07.02	KB.18			V	3) Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta

		KB.07.03	KB.18.00			V		a) Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
		KB.07.04	KB.18.01			V		b) Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
	KB.08					V		c. Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus
		KB.08.00	KB.19			V		1) Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

		KB.08.01	KB.19.00			V		a) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		KB.08.02	KB.19.01			V		b) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
		KB.08.03	KB.20			V	2)	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		KB.08.04	KB.20.00			V		a) Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

		KB.08.05	KB.20.01			V		b) Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
		KB.08.06	KB.21			V	3)	Kesertaan keluarga berencana pria
		KB.08.07	KB.21.00			V		a) Peningkatan akses keluarga berencana pria
		KB.08.08	KB.21.01			V		b) Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
KB.09						V		D. Kesehatan Reproduksi

		KB.09.00	KB.22			V		1) Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
		KB.09.01	KB.23			V		2) Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
		KB.09.03	KB.24			V		3) Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
								KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN K
	KB.10					V		A. Bina keluarga Balita dan Anak
		KB.10.00	KB.25			V		1) Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

			KB.25.00					a) Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			KB.25.01					b) Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
		KB.10.01	KB.26			V	2)	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
			KB.26.00					a) Monitoring bina keluarga Balita dan anak

			KB.26.01					b) Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
	KB.11				V			B. Bina ketahanan remaja
		KB.11.00	KB.27			V		1) Pelembagaan bina ketahanan remaja
			KB.27.00					a) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

			KB.27.01					b) Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
		KB.11.01	KB.28			V		2) Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
			KB.28.00					a) Monitoring bina ketahanan remaja
			KB.28.00					b) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

	KB.12			V		C. Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	KB.12.00	KB.29			V	1) Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		KB.29.00				a) Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
		KB.29.01				b) Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

		KB.12.01	KB.30			V	2) Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			KB.30.00				a) Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			KB.30.01				b) Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		KB.12.02	KB.31			V	3) Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

			KB.31.00					a) Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			KB.31.01					b) Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
	KB.13				V			D. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
		KB.13.00	KB.32			V		1) Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

		KB.13.01	KB.33			V		2) Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
		KB.13.02	KB.34			V		3) Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
			KB.34.00					a) Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			KB.34.01					b) Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
		KB.13.03	KB.35			V		4) Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
	KB.14					V	E.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

		KB.14.00	KB.36			V	1) Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
		KB.14.01	KB.37			V	2) Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			KB.37.00				a) Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			KB.37.01				b) Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		KB.14.02	KB.38			V	3) Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			KB.38.00				a) Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			KB.38.01				b) Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
							ADVOKASI DAN INFORMASI
	KB.15					V	A. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Eduk

		KB.15.00	KB.39			v	1) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			KB.39.00				a) Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			KB.39.01				b) Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		KB.15.01	KB.40			v	2) Advokasi dan pencitraan
	KB.16		KB.41				3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi
		KB.16.00	KB.41.00			v	a) Promosi

		KB.16.01	KB.41.01			v		b) Sarana produksi media komunikasi
		KB.16.02	KB.41.02			v		c) Produk media komunikasi
	KB.17					v		B. Bina hubungan antar lembaga
			KB.42				1)	Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
			KB.43				2)	Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			KB.43.00				a)	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			KB.43.01				b)	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			KB.44				3)	Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			KB.44.00				a)	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

			KB.44.01					b) Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
	KB.18				V			C. Bina Tenaga lini lapangan
			KB.45					1) Tenaga Lini Lapangan
		KB.18.00	KB.45.00			V		a) Pengembangan tenaga lini lapangan
		KB.18.01	KB.45.01			V		b) Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
	KB.19		KB.46			V		2) Institusi Masyarakat Pedesaan
		KB.19.00	KB.46.00			V		a) Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

		KB.19.01	KB.46.01			V		b) Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
	KB.20		KB.47			V		3) Mekanisme Operasional lini lapangan
		KB.20.00	KB.47.00			V		a) Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
		KB.20.01	KB.47.01			V		b) Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
						V		D. Pelaporan dan Statistik

KB.48		V			1) Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
KB.48.00			V		a) Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
KB.48.01			V		b) Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
KB.49		V			2) Pengumpulan dan pengolahan data

KB.50		V				3) Analisis dan evaluasi
KB.50.00			V			a) Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
KB.50.01			V			b) Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
		V				E. Teknologi Informasi dan Dokumentasi
KB.51		V				1) Sistem aplikasi dan bank data

KB.51.00			V			a) Pengembangan sistem aplikasi
KB.51.01			V			b) Pengelolaan bank data
KB.52		V				2) Infrastruktur teknologi informasi
KB.52.00			V			a) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

KB.52.01			V			b) Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
KB.53		V			3)	Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
KB.53.00			V			a) Dokumentasi dan perpustakaan
KB.53.01			V			b) Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

AN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH
SIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES		
	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
5	6	7	8
BERENCANA			
Arsip yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga, mencakup Pengkajian dan pengusulan kebijakan, Penyiapan kebijakan, Perumusan Kebijakan, Masukan dan dukungan kebijakan.	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Biasa/terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
penduduk			
Arsip yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan Penyiapan fasilitas dalam rangka pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan data dan profil proyeksi penduduk	Biasa/terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip yang berkaitan dengan evaluasi data profil dan proyeksi penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penetapan parameter pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan evaluasi sasaran parameter pengendalian penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pemanfaatan profil dan proyeksi penduduk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan parameter pengendalian penduduk</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pendidikan kependudukan pada pengembangan sistem yang meliputi pengembangan sistem jalur pendidikan formal dan pengembangan sistem jalur pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan sistem jalur pendidikan formal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan sistem jalur pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pendidikan kependudukan pada pengembangan materi yang meliputi pengembangan materi jalur pendidikan formal dan pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan materi jalur pendidikan formal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pengembangan materi jalur pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama pendidikan kependudukan pada monitoring dan evaluasi yang meliputi monitoring dan evaluasi jalur pendidikan formal dan monitoring dan evaluasi jalur pendidikan nonformal dan informal</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi materi jalur pendidikan formal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi materi jalur pendidikan nonformal dan informal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan di bidang sosial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan di bidang ekonomi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan di bidang politik, pertahanan dan keamanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan analisis dampak kependudukan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
ODUKSI			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah mencakup Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah dan Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana pemerintah			
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah mencakup Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik swasta dan Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana swasta</p>			
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina kesertaan keluarga berencana jalur wilayah sasaran khusus meliputi akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan, Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan, dan kesertaan keluarga pria	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kesehatan			

reproduksi mencakup Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, Pencegahan PMS dan HIV/AIDS, Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

ELUARGA

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina keluarga balita dan anak mencakup kegiatan pelebagaan bina keluarga balita dan anak serta monitoring dan evaluasi bina keluarga balita dan anak

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
----------	--	----------

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina ketahanan remaja mencakup kegiatan pelebagaan bina ketahanan remaja serta monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja			
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan kegiatan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan mencakup kegiatan pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia dan rentan, pelebagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan serta monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga lansia dan rentan.</p>			
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga mencakup pengembangan program usaha ekonomi keluarga, peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga, serta monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga			
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pusat pelayanan keluarga sejahtera mencakup pengembangan program pusat pelayanan keluarga sejahtera serta monitoring dan evaluasi pusat pelayanan keluarga sejahtera			

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan advokasi meliputi : perencanaan, evaluasi, dan pelaporan advokasi			

	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, meliputi : Promosi, Sarana produksi media komunikasi, dan Produk media komunikasi			
	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan tenaga lini lapangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan institusi masyarakat pedesaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan mekanisme operasional lapangan</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lapangan</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

Arsip yang berkaitan dengan pelaporan dan statistik pada pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan yang meliputi perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pelaporan dan statistik pada pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan pelaporan dan statistik pada analisis dan evaluasi yang meliputi analisis dan evaluasi pengendalian penduduk serta analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi pengendalian penduduk</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan sistem aplikasi dan bank data yang meliputi pengembangan sistem aplikasi dan pengelolaan bank data</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan bank data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi meliputi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan dokumentasi dan penyebarluasan informasi yang meliputi dokumentasi dan perpustakaan serta pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa/terbuka	Pegguna Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip yang berkaitan dengan dokumentasi dan perpustakaan	Biasa/terbuka	Pegguna Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi	Biasa/terbuka	Pegguna Internal dan Eksternal	Terbuka

ARSIP DINAMIS		MASUKAN DARI DAERAH
DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
9	10	11
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p>	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait	
Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait	

**RANCANGAN JADWAL RETENSI A
PEM**

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP
1	2
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	KEBIJAKAN
	Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
	2. Penyiapan bahan
	3. Perumus Kebijakan
	4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
	5. Penetapan dalam bentuk NSPK
	Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
	1. Teknik Pos dan Telekomunikasi
	2. Teknik Komunikasi Radio
	3. Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi
	4. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar
	5. Standar dan Audit Perangkat Lunak
2	SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

		A. Penataan Sumber Daya
		1. Alokasi Spektrum Dinas
		a) Alokasi Dinas Tetap
		b) Alokasi Dinas Bergerak Darat
		2. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
		a) Alokasi Dinas Penyiaran
		b) Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
		3. Orbit Satelit
		a) Notifikasi dan Penataan Filing Satelit
		b) Tata Kelola Hubungan Antarpengelola
		4. Ekonomi Sumber Daya
		a) Analisa Industri dan Ekonomi
		b) Penanganan Izin Pita
		5. Harmonisasi Teknik Spektrum
		a) Teknik Spektrum Antar Lembaga
		b) Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial
		B. Operasi Sumber Daya
		1. Pelayanan Spektrum Dinas
		a) Pelayanan Dinas Tetap
		b) Pelayanan Dinas Bergerak Cepat

		2. Pelayanan Spektrum Non Dinas
		a) Pelayanan Dinas Penyiaran
		b) Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
		3. Sertifikasi Operator Radio
		a) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpendinguduk
		b) Pelayanan Operator Radio
		4. Penanganan Biaya
		a) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
		b) Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
		5. Konsultasi dan Data Operator Sumber Daya
		a) Konsultasi dan Informasi Sumber Daya
		b) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya
		C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
		1. Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum
		a) Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum
		b) Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum
		2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum

		a) Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum
		b) Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
		3. Monitoring dan Penertiban Spektrum
		a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial
		b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial
		4. Monitoring dan Penertiban
		a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika
		b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika
3	PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	
	A. Pos	
		1. Layanan dan Penerapan Pos Universal
		a) Layanan
		b) Penerapan Layanan
		2. Layanan Pos Komersial
		a) Tata Kelola Layanan
		b) Data dan Informasi Layanan
		3. Prangko dan Filateli
		a) Prangko
		b) Filateli

		4. Iklim Usaha Pos
		a) Pos Universal
		b) Pos Komersial
		5. Pentarifan Pos
		a) Layanan Pos Universal
		b) Pos Komersial
		B. Telekomunikasi
		1. Layanan Jaringan Telekomunikasi
		a) Akses
		b) Backbone
		2. Layanan Jasa Telekomunikasi
		a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi
		b) Jasa Multimedia
		3. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
		a) Penomoran Telekomunikasi
		b) Penomoran Informatika
		4. Tarif dan Interkoneksi
		a) Tarif Telekomunikasi
		b) Interkoneksi Telekomunikasi
		5. Kelayakan Sistem Telekomunikasi
		a) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa
		b) Penerapan Teknologi Telekomunikasi

		C. Penyiaran
		1. Pemetaan dan Database
		a) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		b) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		2. Verifikasi dan Uji Coba Siaran
		a) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio
		b) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi
		3. Radio
		a) Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio
		b) Lembaga Penyiaran Swasta Radio
		4. Televisi
		a) Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi
		b) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi
		5. Iklim Usaha Penyiaran
		a) Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran
		b) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran
		D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Univer

		1. Telekomunikasi Khusus Pemerintah
		a) Analisa Penyelenggaraan
		b) Pelayanan
		2. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah
		a) Analisa Penyelenggaraan
		b) Pelayanan
		3. Layanan Khusus Penyiaran
		a) Publik Radio
		b) Publik Televisi
		4. Pelayanan Kewajiban Universal
		a) Perencanaan Pembangunan
		b) Monitoring dan Evaluasi
		5. Pengembangan Infrastruktur
		a) Perencanaan Infrastruktur
		b) Analisa Ekonomis Infrastruktur
		E. Pengendalian Pos dan Informatika
		1. Monitoring dan Evaluasi Pos
		a) Monitoring
		b) Evaluasi
		2. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
		a) Monitoring
		b) Evaluasi
		3. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
		a) Monitoring
		b) Evaluasi

		4. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
		a) Monitoring
		b) Evaluasi
		5. Pencegahan dan Penertiban
		a) Pencegahan
		b) Penertiban
4	APLIKASI INFORMATIKA	
	A.	e- Government
		1. Tata Kelola e-Government
		- Program e-Government
		- Evaluasi e-Government
		a. Program
		b. Evaluasi
		2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government
		a. Teknologi e-government
		b. Infrastruktur e-government
		3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
		a. Interoperabilitas e-government
		b. Interkonektivitas e-government
		4. Aplikasi Layanan Pemerintahan

		a. Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat
		b. Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah
		5. Aplikasi Layanan Publik
		- Inisiasi Aplikasi Layanan Publik
		a. Inisiasi Aplikasi Layanan Publik
		b. Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik
		E- Business
		Tata Kelola e-Business
		- Program e-Business
		- Evaluasi e-Business
		Teknologi dan Infrastruktur e-Business
		Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
		Aplikasi Layanan e-Business
		- Bidang Usaha Kecil dan Mikro
		- Bidang Usaha Menengah dan Besar
		Pemberdayaan Informatika
		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan
		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar
		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus
		Pemberdayaan Industri Informatika
		Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
		Industri Perangkat Informatika Pengguna
		Industri Perangkat Lunak
		Industri Konten Multimedia
		Keamanan Informasi
		Tata Kelola Keamanan Informasi
		Teknologi Keamanan Informasi
		- Infrastruktur
		- Aplikasi
		Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
		- Infrastruktur
		- Aplikasi
		Penyidikan dan Penindakan

		- Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi
		- Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi
		Budaya Keamanan Informasi
		- Penyidikan
		- Penindakan
5		B. e- Business
		1. Tata Kelola e-Business
		a) Program e-Business
		b) Evaluasi e-Business
		2. Teknologi dan Infrastruktur e-Business
		a) Teknologi e-Business
		b) Infrastruktur e- Business
		3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
		a) Interoperabilitas e- Business
		b) Interkonektivitas e- Business
		4. Aplikasi Layanan e-Business
		a) Bidang Usaha Kecil dan Makro
		b) Bidang Usaha Menengah dan Besar
		C. Pemberdayaan Industri Informatika

		1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
		a) Perancangan Model
		b) Penerapan Model
		2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
		a) Pengembangan Model
		b) Penerapan Model
		3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar
		a) Pengembangan Model
		b) Penerapan Model
		4. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus
		a) Pengembangan Model
		b) Penerapan Model
		D. Pemberdayaan Industri Informatika
		1. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
		a) Pemberdayaan
		b) Promosi
		2. Industri Perangkat Informatika Pengguna
		a) Pemberdayaan

		b) Pengembangan Produk
		3. Industri Perangkat Lunak
		a) Pemberdayaan
		b) Pengembangan Produk
		4. Industri Konten Multimedia
		a) Pemberdayaan
		b) Pengembangan Produk
		E. Keamanan Informasi
		1. Tata Kelola Keamanan Informasi
		a) Kelembagaan
		b) Manajemen Resiko
		2. Teknologi Keamanan Informasi
		a) Infrastruktur
		b) Aplikasi
		3. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
		a) Infrastruktur
		b) Aplikasi
		4. Penyidikan dan Penindakan

		a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi
		b) Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi
		5. Budaya Keamanan Informasi
		a) Penyidikan
		b) Penindakan
6	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	A.	Komunikasi Publik
		1. Tata Kelola Komunikasi Publik
		a. Program Komunikasi Publik
		b. Monitoring dan Evaluasi
		2. Pengelolaan Opini Publik
		a. Pengumpulan Opini Publik
		b. Pengolahan Opini Publik
		3. Layanan Komunikasi Publik
		a. Pengumpulan Data
		b. Pengolahan Data
	B.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi

		1. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
		a. Politik dan Keamanan
		b. Hukum dan Hak Asasi Manusia
		2. Informasi Perekonomian
		a. Keuangan, Perbankan, dan Jasa
		b. Industri dan Perdagangan
		3. Informasi Kesejahteraan Rakyat
		a. Agama, Sosial, dan Budaya
		b. Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
		C. Pengelolaan Media Publik
		1. Media Cetak
		2. Media Online
		3. Media Luar Ruang dan Audio Visual
		D. Kemitraan Komunikasi
		1. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara

		a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
		b) Monitoring dan Evaluasi
		2. Kemitraan Media dan Dunia Usaha
		a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha
		b) Monitoring dan Evaluasi
		3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
		a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
		b) Monitoring dan Evaluasi
		E. Layanan Informasi Internasional
		1. Layanan Informasi Media Asing
		a) Program Layanan Informasi Media Asing
		b) Monitoring dan Evaluasi
		2. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional
		a) Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional
		b) Monitoring dan Evaluasi

		3. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri
		a) Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri
		b) Monitoring dan Evaluasi
7	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA	
	A. Infrastruktur Informatika	
	1. Jaringan	
	2. Piranti Teknologi Informatika	
	3. Keamanan Informatika	
	B. Sistem dan Data	
	1. Portal dan Konten	
	2. Pengumpulan dan Pengolahan Data	
	3. Pengembangan Aplikasi	
	C. Pusat Kerjasama Internasional	
	1. Kerja Sama Multilateral	
	a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral	
	b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral	
	c) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral	

	2. Kerja Sama Regional
	a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional
	b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional
	c) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional
	3. Kerja Sama Bilateral
	a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral
	b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral
	D. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
	1. Pelayanan Informasi
	a) Media Baru
	b) Media Konvensional
	c) Dokumentasi dan Perpustakaan
	2. Hubungan Masyarakat
	a) Publikasi
	b) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik
	c. Hubungan Internal dan Eksternal

	3. Bimbingan Teknis
	a) Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika
	c) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
	d) Sarana Informatika, Informasi dan Humas
	4. Evaluasi
	a) Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
	b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika
	c) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
	d) Sarana Informatika, Informasi dan Humas

Lampiran Surat Wali Kota Surakarta

Nomor : 045/ /2020

Tanggal :

Hal : Permohonan Persetujuan Jadwal Retensi

Arsip (JRA) Subtantif Kota Surakarta

**RSIP SUBSTANTIF URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ERINTAH KOTA SURAKARTA**

URAIAN	JADWAL RETEN	
	AKTIF	INAKTIF
3	4	5
Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika,	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan standardisasi perangkat pos dan informatika meliputi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, penerapan standar pos dan telekomunikasi, kualitas pelayanan dan harmonisasi standar serta standar dan audit perangkat lunak	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang meliputi penataan sumber daya, operasi sumber daya serta Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika		

Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya meliputi kegiatan alokasi spektrum dinas, alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat, orbit satelit serta ekonomi sumber daya		
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang alokasi spektrum dinas meliputi alokasi dinas tetap dan alokasi dinas bergerak cepat	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat meliputi alokasi dinas penyiaran serta alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang orbit satelit meliputi notifikasi dan penataan filing satelit serta tata kelola hubungan antarpengelola	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang ekonomi sumber daya yang meliputi analisa industri dan ekonomi serta penanganan izin pita	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang harmonisasi teknik spektrum meliputi teknik spektrum antar lembaga serta harmonisasi dan notifikasi terestrial	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya meliputi pelayanan spektrum dinas, pelayanan spektrum non dinas, sertifikasi operator radio, penanganan biaya serta konsultasi dan data operator sumber daya		
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang pelayanan spektrum dinas yang meliputi kegiatan pelayanan dinas tetap dan pelayanan dinas bergerak cepat	1 Tahun	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang pelayanan spektrum non dinas yang meliputi kegiatan pelayanan dinas penyiaran serta pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang sertifikasi operator radio yang meliputi pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antarpendinguduk serta pelayanan operator radio	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang penanganan biaya yang meliputi penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio serta analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang konsultasi dan informasi sumber daya serta pengelolaan data operasi sumber daya	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang meliputi pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum serta monitoring dan penertiban		
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum yang meliputi rancang bangun teknologi monitoring spektrum dan pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum yang meliputi rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum	1 Tahun	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang monitoring dan penertiban spektrum yang meliputi Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial serta Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang monitoring dan penertiban yang meliputi Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika serta Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika yang meliputi penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran, telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal serta pengendalian pos dan informatika		
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos meliputi layanan dan penerapan pos universal, layanan pos komersial, prangko dan filateli, iklim usaha pos serta pentarifan pos	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika di bidang layanan dan penerapan pos universal	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika di bidang layanan pos komersial yang meliputi tata kelola layanan serta data dan informasi layanan	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos yaitu penggunaan prangko dan filateli	1 Tahun	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos di bidang iklim usaha pos meliputi pos universal dan pos komersial	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos di bidang penentuan penarifan pos meliputi layanan pos universal dan pos komersial	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi layanan jaringan telekomunikasi, layanan jasa telekomunikasi, penomoran telekomunikasi dan informatika, tarif dan interkoneksi serta kelayakan sistem telekomunikasi		
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang layanan jaringan telekomunikasi meliputi akses dan backbone	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang layanan jasa telekomunikasi meliputi jasa teleponi, nilai tambah teleponi, sistem dan transaksi serta jasa multimedia	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang penentuan tarif dan interkoneksi meliputi tarif telekomunikasi dan interkoneksi telekomunikasi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang kelayakan sistem telekomunikasi meliputi kelayakan sistem jaringan dan jasa serta penerapan teknologi telekomunikasi	1 Tahun	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran meliputi pemetaan dan database, verifikasi dan uji coba siaran, radio, televisi dan iklim usaha penyiaran		
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di bidang pemetaan dan database yang meliputi pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi serta database penyelenggaraan radio dan televisi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di bidang verifikasi dan uji coba siaran yang meliputi verifikasi dan uji coba radio dan verifikasi dan uji coba siaran televisi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran radio yang meliputi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio serta lembaga penyiaran swasta radio	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran televisi yang meliputi Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi serta Lembaga Penyiaran Swasta Televisi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan iklim usaha penyiaran yang meliputi penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran serta penerapan kewajiban lembaga penyiaran	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal meliputi telekomunikasi khusus pemerintah, telekomunikasi khusus non pemerintah, layanan khusus penyiaran, pelayanan kewajiban universal serta pengembangan infrastruktur		

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan dan pelayanan	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus non pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan dan pelayanan	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan khusus penyiaran meliputi publik radio dan publik televisi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kewajiban universal meliputi perencanaan pembangunan , monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan infratraktur melipti perencanaan infrastruktur dan analisa ekonomis infrastruktur	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi pos, monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi, monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi, monitoring dan evaluasi penyiaran serta pencegahan dan penertiban		
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi pos	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi	1 Tahun	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi penyiaran	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi pencegahan dan penertiban	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan aplikasi informatika yang mencakup penyelenggaraan e-government, e-business, pemberdayaan industri informatika serta keamanan informasi		
Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan e-government mencakup program dan evaluasi tata kelola e-government, teknologi dan infrastruktur e-government, Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government, Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah, serta Aplikasi Layanan Publik		
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola e-government mencakup program dan evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi dan infrastruktur e-government meliputi teknologi e-government dan infrastruktur e-government	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan interoperabilitas dan interkonektivitas e-government	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan aplikasi layanan pemerintahan yang mencakup aplikasi layanan pemerintahan pusat dan aplikasi layanan pemerintahan daerah	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan e-business yang mencakup kegiatan tata kelola e-business, teknologi dan infrastruktur e-business, interoperabilitas dan interkoneksi e-business serta aplikasi layanan e-business		
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola e-business yang mencakup program dan evaluasi e-business	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi dan infrastruktur e-business	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan interoperabilitas dan interkoneksi e-business	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan aplikasi layanan e-business yang mencakup bidang usaha kecil dan makro serta bidang usaha menengah dan besar	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri informatika yang meliputi kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan, pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan, pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar serta pemberdayaan informatika masyarakat khusus		

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan yang meliputi perancangan model dan penerapan model	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan meliputi pengembangan model dan penerapan model	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar meliputi pengembangan model dan penerapan model	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat khusus meliputi pengembangan model dan penerapan model	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan industri informatika yang meliputi industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak serta industri konten multimedia		
Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika mencakup pemberdayaan dan promosi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat informatika pengguna meliputi pemberdayaan dan pengembangan produk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat lunak yang mencakup pemberdayaan dan pengembangan produk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri konten multimedia yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan produk	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan keamanan informasi mencakup kegiatan tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi, monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi, penyidikan dan penindakan serta budaya keamanan informasi		
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola keamanan informasi yang mencakup kelembagaan dan manajemen resiko	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi keamanan informasi yang mencakup infrastruktur dan aplikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi yang mencakup infrastruktur dan aplikasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan dan penindakan yang mencakup monitoring dan evaluasi keamanan informasi serta tanggap darurat peristiwa keamanan informasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan budaya keamanan informasi meliputi penyidikan dan penindakan	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 tahun
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik mencakup kegiatan tata kelola komunikasi publik, pengelolaan opini publik dan layanan komunikasi publik		
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi publik mencakup program dan monitoring serta evaluasi tata kelola komunikasi publik; pengumpulan dan pengolahan opini publik; pengumpulan dan pengolahan data layanan komunikasi publik		
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola komunikasi publik mencakup program komunikasi publik, monitoring dan evaluasi	2 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan opini publik yang mencakup pengumpulan opini publik dan pengolahan opini publik	1 tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan layanan komunikasi publik yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan Pengolahan dan Penyediaan Informasi mencakup informasi politik, hukum dan keamanan, informasi perekonomian dan informasi kesejahteraan rakyat		

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan penyediaan informasi politik, hukum dan keamanan yang mencakup politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia	1 Tahun setelah data di perbaharui (update)	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan informasi perekonomian mencakup keuangan, perbankan, jasa, industri dan perdagangan	1 Tahun setelah data di perbaharui (update)	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan informasi kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup	1 Tahun setelah data di perbaharui (update)	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan Pengelolaan Media Publik mencakup media cetak, media online, dan media luar ruang dan audio visual		
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media cetak	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media online	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media luar ruang dan audio visual	1 Tahun sejak berakhirnya masa satu tahun anggaran	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi mencakup program serta monitoring dan evaluasi kemitraan media dan dunia usaha, program serta monitoring dan evaluasi kemitraan organisasi masyarakat dan profesi		
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi yaitu kemitraan pemerintah dan lembaga negara mencakup program kemitraan pemerintah dan lembaga negara, monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi antara kemitraan media dengan dunia usaha mencakup program kemitraan media dan dunia usaha, monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi antara kemitraan organisasi kemasyarakatan dengan profesi yang mencakup program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi, monitoring dan evaluasi	2 Tahun setelah perjanjian, kontrak, kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan informasi internasional, mencakup program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi media asing, program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional, dan program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi masyarakat luar negeri		
Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi media asing mencakup program layanan informasi media asing, monitoring dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang mencakup program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional, monitoring dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun

Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi masyarakat luar negeri mencakup program layanan informasi masyarakat luar negeri, monitoring dan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pusat data dan sarana informatika yang mencakup infrastruktur informatika, sistem dan data, pusat kerjasama internasional serta pusat informasi dan hubungan masyarakat		
Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur informatika mencakup jaringan, piranti teknologi informatika dan keamanan informatika	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan sistem dan data mencakup portal dan konten, pengumpulan dan pengolahan data serta pengembangan aplikasi	1 Tahun	4 Tahun
Arsip yang berkaitan dengan pusat kerjasama internasional yang meliputi kerja sama multilateral, kerja sama regional dan kerja sama bilateral		
Arsip yang berkaitan dengan kerja sama multilateral yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia multilateral, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik multilateral serta investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi multilateral	1 Tahun	4 Tahun

<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama regional yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia regional, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik regional serta investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi regional</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan kerja sama bilateral yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bilateral serta penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik bilateral</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan pusat informasi dan hubungan masyarakat yang meliputi kegiatan pelayanan informasi, hubungan masyarakat, bimbingan teknis dan evaluasi</p>		
<p>Arsip yang berkaitan dengan pelayanan informasi yang meliputi pelayanan informasi media baru, pelayanan informasi konvensional serta dokumentasi dan perpustakaan</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan hubungan masyarakat yang meliputi kegiatan publikasi, analisis berita dan pengelolaan opini publik serta hubungan internal dan eksternal</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>

<p>Arsip yang berkaitan dengan bimbingan teknis yang meliputi bimbingan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, bimbingan penyelenggaraan pos dan informatika, bimbingan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, serta bimbingan sarana informatika, informasi dan humas</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan yang meliputi evaluasi sumber daya dan perangkat pos dan informatika, evaluasi penyelenggaraan pos dan informatika, evaluasi aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik serta evaluasi sarana informatika, informasi dan humas</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>4 Tahun</p>

ISI ARSIP

KETERANGAN

6

--

--

Permanen

Permanen

--

--

Musnah
Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Permanen

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Permanen
Permanen
Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Permanen

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Musnah
Permanen

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Musnah

Musnah
Musnah
Musnah
Permanen

Permanen
Permanen
Musnah
Musnah

Musnah
Musnah

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	
				1	3
KI	v			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
KI.00		v		KEBIJAKAN	
KI.00.00			v	Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika	
					1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
					2. Penyiapan bahan
					3. Perumus Kebijakan
					4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
					5. Penetapan dalam bentuk NSPK
			v	Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	
					1. Teknik Pos dan Telekomunikasi
					2. Teknik Komunikasi Radio
					3. Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi
					4. Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar
					5. Standar dan Audit Perangkat Lunak
KI.01		v		SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	

KI.01.00			v		A. Penataan Sumber Daya
					1. Alokasi Spektrum Dinas
					a) Alokasi Dinas Tetap
					b) Alokasi Dinas Bergerak Darat
					2. Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat
					a) Alokasi Dinas Penyiaran
					b) Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
					3. Orbit Satelit
					a) Notifikasi dan Penataan Filing Satelit
					b) Tata Kelola Hubungan Antarpengelola
					4. Ekonomi Sumber Daya
					a) Analisa Industri dan Ekonomi
					b) Penanganan Izin Pita

					5. Harmonisasi Teknik Spektrum
					a) Teknik Spektrum Antar Lembaga
					b) Harmonisasi dan Notifikasi Terrestrial
KI.01.01			v		B. Operasi Sumber Daya
					1. Pelayanan Spektrum Dinas
					a) Pelayanan Dinas Tetap
					b) Pelayanan Dinas Bergerak Cepat
					2. Pelayanan Spektrum Non Dinas
					a) Pelayanan Dinas Penyiaran
					b) Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit
					3. Sertifikasi Operator Radio
					a) Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpending
					b) Pelayanan Operator Radio

					4. Penanganan Biaya
					a) Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
					b) Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio
					5. Konsultasi dan Data Operator Sumber Daya
					a) Konsultasi dan Informasi Sumber Daya
					b) Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya
KI.01.02			v		C. Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos
					1. Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum
					a) Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum
					b) Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum

					2. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
					a) Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum
					b) Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum
					3. Monitoring dan Penertiban Spektrum
					a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial
					b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial
					4. Monitoring dan Penertiban
					a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika
					b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika

KI.02		v		PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	
KI.02.00		v		A. Pos	
				1. Layanan dan Penerapan Pos Universal	
				a) Layanan	
				b) Penerapan Layanan	
				2. Layanan Pos Komersial	
				a) Tata Kelola Layanan	
				b) Data dan Informasi Layanan	
				3. Prangko dan Filateli	
				a) Prangko	
				b) Filateli	
				4. Iklim Usaha Pos	

					a) Pos Universal
					b) Pos Komersial
					5. Pentarifan Pos
					a) Layanan Pos Universal
					b) Pos Komersial
KI.02.01			v		B. Telekomunikasi
					1. Layanan Jaringan Telekomunikasi
					a) Akses
					b) Backbone
					2. Layanan Jasa Telekomunikasi
					a) Jasa Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi
					b) Jasa Multimedia
					3. Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
					a) Penomoran Telekomunikasi
					b) Penomoran Informatika

					4. Tarif dan Interkoneksi
					a) Tarif Telekomunikasi
					b) Interkoneksi Telekomunikasi
					5. Kelayakan Sistem Telekomunikasi
					a) Kelayakan Sistem Jaringan dan Jasa
					b) Penerapan Teknologi Telekomunikasi
KI.02.02			v		C. Penyiaran
					1. Pemetaan dan Database
					a) Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
					b) Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
					2. Verifikasi dan Uji Coba Siaran
					a) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio
					b) Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi

					3. Radio
					a) Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio
					b) Lembaga Penyiaran Swasta Radio
					4. Televisi
					a) Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi
					b) Lembaga Penyiaran Swasta Televisi
					5. Iklim Usaha Penyiaran
					a) Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran
					b) Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran
KI.02.03			v		D. Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan

					1. Telekomunikasi Khusus Pemerintah
					a) Analisa Penyelenggaraan
					b) Pelayanan
					2. Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah
					a) Analisa Penyelenggaraan
					b) Pelayanan
					3. Layanan Khusus Penyiaran
					a) Publik Radio
					b) Publik Televisi
					4. Pelayanan Kewajiban Universal
					a) Perencanaan Pembangunan
					b) Monitoring dan Evaluasi
					5. Pengembangan Infrastruktur
					a) Perencanaan Infrastruktur
					b) Analisa Ekonomis Infrastruktur

KI.02.04			v		E. Pengendalian Pos dan Informatika
					1. Monitoring dan Evaluasi Pos
					a) Monitoring
					b) Evaluasi
					2. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
					a) Monitoring
					b) Evaluasi
					3. Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
					a) Monitoring
					b) Evaluasi
					4. Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
					a) Monitoring
					b) Evaluasi

					5. Pencegahan dan Penertiban
					a) Pencegahan
					b) Penertiban
KI.03		v			APLIKASI INFORMATIKA
KI.03.00			v	A.	e- Government
					1. Tata Kelola e-Government
					- Program e-Government
					- Evaluasi e-Government
					a. Program
					b. Evaluasi
					2. Teknologi dan Infrastruktur e-Government
					a. Teknologi e-government
					b. Infrastruktur e-government

					3. Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government
					a. Interoperabilitas e-government
					b. Interkoneksi e-government
					4. Aplikasi Layanan Pemerintahan
					a. Aplikasi Layanan Pemerintahan Pusat
					b. Aplikasi Layanan Pemerintahan Daerah
					5. Aplikasi Layanan Publik
					- Inisiasi Aplikasi Layanan Publik
					a. Inisiasi Aplikasi Layanan Publik
					b. Fasilitas Aplikasi Layanan Publik
		v			E- Business
			v		Tata Kelola e-Business
					- Program e-Business
					- Evaluasi e-Business
			v		Teknologi dan Infrastruktur e-Business
			v		Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
			v		Aplikasi Layanan e-Business
					- Bidang Usaha Kecil dan Mikro
					- Bidang Usaha Menengah dan Besar
		v			Pemberdayaan Informatika
			v		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan

			v		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perdesaan
			v		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar
			v		Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus
		v			Pemberdayaan Industri Informatika
			v		Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
			v		Industri Perangkat Informatika Pengguna
			v		Industri Perangkat Lunak
			v		Industri Konten Multimedia
		v			Keamanan Informasi
			v		Tata Kelola Keamanan Informasi
			v		Teknologi Keamanan Informasi
					- Infrastruktur
					- Aplikasi
			v		Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
					- Infrastruktur
					- Aplikasi
			v		Penyidikan dan Penindakan
					- Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi
					- Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi
			v		Budaya Keamanan Informasi
					- Penyidikan
					- Penindakan
KI.03.01			v		B. e- Business
					1. Tata Kelola e-Business

					a) Program e-Business
					b) Evaluasi e-Business
					2. Teknologi dan Infrastruktur e-Business
					a) Teknologi e-Business
					b) Infrastruktur e- Business
					3. Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
					a) Interoperabilitas e- Business
					b) Interkonektivitas e- Business
					4. Aplikasi Layanan e-Business
					a) Bidang Usaha Kecil dan Makro
					b) Bidang Usaha Menengah dan Besar
KI.03.02			v		C. Pemberdayaan Industri Informatika
					1. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
					a) Perancangan Model
					b) Penerapan Model

					2. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
					a) Pengembangan Model
					b) Penerapan Model
					3. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perbatasan dan Pulau Terluar
					a) Pengembangan Model
					b) Penerapan Model
					4. Pemberdayaan Informatika Masyarakat Khusus
					a) Pengembangan Model
					b) Penerapan Model
KI.03.03			v		D. Pemberdayaan Industri Informatika
					1. Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
					a) Pemberdayaan
					b) Promosi

					2. Industri Perangkat Informatika Pengguna
					a) Pemberdayaan
					b) Pengembangan Produk
					3. Industri Perangkat Lunak
					a) Pemberdayaan
					b) Pengembangan Produk
					4. Industri Konten Multimedia
					a) Pemberdayaan
					b) Pengembangan Produk
KI.03.04			v		E. Keamanan Informasi
					1. Tata Kelola Keamanan Informasi
					a) Kelembagaan
					b) Manajemen Resiko
					2. Teknologi Keamanan Informasi

					a) Infrastruktur
					b) Aplikasi
					3. Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
					a) Infrastruktur
					b) Aplikasi
					4. Penyidikan dan Penindakan
					a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi
					b) Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi
					5. Budaya Keamanan Informasi
					a) Penyidikan
					b) Penindakan
KI.04		v			INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KI.04.00			v	A.	Komunikasi Publik

					1. Tata Kelola Komunikasi Publik
					a. Program Komunikasi Publik
					b. Monitoring dan Evaluasi
					2. Pengelolaan Opini Publik
					a. Pengumpulan Opini Publik
					b. Pengolahan Opini Publik
					3. Layanan Komunikasi Publik
					a. Pengumpulan Data
					b. Pengolahan Data
KI.04.01			v	B.	Pengolahan dan Penyediaan Informasi
					1. Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
					a. Politik dan Keamanan
					b. Hukum dan Hak Asasi Manusia
					2. Informasi Perekonomian
					a. Keuangan, Perbankan, dan Jasa
					b. Industri dan Perdagangan

					3. Informasi Kesejahteraan Rakyat
					a. Agama, Sosial, dan Budaya
					b. Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
KI.04.02			v		C. Pengelolaan Media Publik
					1. Media Cetak
					2. Media Online
					3. Media Luar Ruang dan Audio Visual
KI.04.03			v		D. Kemitraan Komunikasi
					1. Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
					a) Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
					b) Monitoring dan Evaluasi

					2. Kemitraan Media dan Dunia Usaha
					a) Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha
					b) Monitoring dan Evaluasi
					3. Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
					a) Program Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
					b) Monitoring dan Evaluasi
KI.04.04			v		E. Layanan Informasi Internasional
					1. Layanan Informasi Media Asing
					a) Program Layanan Informasi Media Asing
					b) Monitoring dan Evaluasi

					2. Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional
					a) Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional
					b) Monitoring dan Evaluasi
					3. Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri
					a) Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri
					b) Monitoring dan Evaluasi
KI.05		v			PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA
KI.05.00			v		A. Infrastruktur Informatika
					1. Jaringan
					2. Piranti Teknologi Informatika
					3. Keamanan Informatika
KI.05.01			v		B. Sistem dan Data
					1. Portal dan Konten
					2. Pengumpulan dan Pengolahan Data
					3. Pengembangan Aplikasi

KI.05.02		v	C. Pusat Kerjasama Internasional
			1. Kerja Sama Multilateral
			a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral
			b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral
			c) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral
			2. Kerja Sama Regional
			a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional

			b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional
			c) Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional
			3. Kerja Sama Bilateral
			a) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral
			b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral
KI.05.03		v	D. Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
			1. Pelayanan Informasi
			a) Media Baru
			b) Media Konvensional
			c) Dokumentasi dan Perpustakaan
			2. Hubungan Masyarakat
			a) Publikasi

		b) Analisis Berita dan Pengelolaan Opini Publik
		c. Hubungan Internal dan Eksternal
		3. Bimbingan Teknis
		a) Bimbingan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
		b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika
		c) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
		d) Sarana Informatika, Informasi dan Humas
		4. Evaluasi
		a) Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
		b) Penyelenggaraan Pos dan Informatika
		c) Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik
		d) Sarana Informatika, Informasi dan Humas

URAIAN	SISTEM KEAMANAN DA		
	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
	4	8	9
Arsip yang berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika,	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan standardisasi perangkat pos dan informatika meliputi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, penerapan standar pos dan telekomunikasi, kualitas pelayanan dan harmonisasi standar serta standar dan audit perangkat lunak	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang meliputi penataan sumber daya, operasi sumber daya serta Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika			

Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya meliputi kegiatan alokasi spektrum dinas, alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat, orbit satelit serta ekonomi sumber daya			
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang alokasi spektrum dinas meliputi alokasi dinas tetap dan alokasi dinas bergerak cepat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang alokasi spektrum non dinas tetap dan bergerak darat meliputi alokasi dinas penyiaran serta alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang orbit satelit meliputi notifikasi dan penataan filing satelit serta tata kelola hubungan antarpenyelenggara	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang ekonomi sumber daya yang meliputi analisa industri dan ekonomi serta penanganan izin pita	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan penataan sumber daya di bidang harmonisasi teknik spektrum meliputi teknik spektrum antar lembaga serta harmonisasi dan notifikasi terestrial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya meliputi pelayanan spektrum dinas, pelayanan spektrum non dinas, sertifikasi operator radio, penanganan biaya serta konsultasi dan data operator sumber daya			
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang pelayanan spektrum dinas yang meliputi kegiatan pelayanan dinas tetap dan pelayanan dinas bergerak cepat	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang pelayanan spektrum non dinas yang meliputi kegiatan pelayanan dinas penyiaran serta pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang sertifikasi operator radio yang meliputi pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antarpending dan pelayanan operator radio	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang penanganan biaya yang meliputi penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio serta analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan operasi sumber daya di bidang konsultasi dan informasi sumber daya serta pengelolaan data operasi sumber daya	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang meliputi pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum serta monitoring dan penertiban			
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum yang meliputi rancang bangun teknologi monitoring spektrum dan pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

<p>Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum yang meliputi rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang monitoring dan penertiban spektrum yang meliputi Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial serta Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>
<p>Arsip yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika di bidang monitoring dan penertiban yang meliputi Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika serta Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika</p>	<p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika yang meliputi penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran, telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal serta pengendalian pos dan informatika			
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos meliputi layanan dan penerapan pos universal, layanan pos komersial, prangko dan filateli, iklim usaha pos serta pentarifan pos	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika di bidang layanan dan penerapan pos universal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos dan informatika di bidang layanan pos komersial yang meliputi tata kelola layanan serta data dan informasi layanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos yaitu penggunaan prangko dan filateli	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos di bidang iklim usaha pos meliputi pos universal dan pos komersial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pos di bidang penentuan penarifan pos meliputi layanan pos universal dan pos komersial	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi layanan jaringan telekomunikasi, layanan jasa telekomunikasi, penomoran telekomunikasi dan informatika, tarif dan interkoneksi serta kelayakan sistem telekomunikasi			
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang layanan jaringan telekomunikasi meliputi akses dan backbone	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang layanan jasa telekomunikasi meliputi jasa teleponi, nilai tambah teleponi, sistem dan transaksi serta jasa multimedia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang penentuan tarif dan interkoneksi meliputi tarif telekomunikasi dan interkoneksi telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi di bidang kelayakan sistem telekomunikasi meliputi kelayakan sistem jaringan dan jasa serta penerapan teknologi telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran meliputi pemetaan dan database, verifikasi dan uji coba siaran, radio, televisi dan iklim usaha penyiaran			
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di bidang pemetaan dan database yang meliputi pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi serta database penyelenggaraan radio dan televisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran di bidang verifikasi dan uji coba siaran yang meliputi verifikasi dan uji coba radio dan verifikasi dan uji coba siaran televisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran radio yang meliputi Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio serta lembaga penyiaran swasta radio	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran televisi yang meliputi Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi serta Lembaga Penyiaran Swasta Televisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan iklim usaha penyiaran yang meliputi penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran serta penerapan kewajiban lembaga penyiaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal meliputi telekomunikasi khusus pemerintah, telekomunikasi khusus non pemerintah, layanan khusus penyiaran, pelayanan kewajiban universal serta pengembangan infrastruktur			

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan dan pelayanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus non pemerintah meliputi analisa penyelenggaraan dan pelayanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan khusus penyiaran meliputi publik radio dan publik televisi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kewajiban universal meliputi perencanaan pembangunan , monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan infratraktur meliputi perencanaan infrastruktur dan analisa ekonomis infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi pos, monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi, monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi, monitoring dan evaluasi penyiaran serta pencegahan dan penertiban			
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi pos	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi monitoring dan evaluasi penyiaran	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan pengendalian pos dan informatika meliputi pencegahan dan penertiban	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan aplikasi informatika yang mencakup penyelenggaraan e-government, e-business, pemberdayaan industri informatika serta keamanan informasi			
Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan e-government mencakup program dan evaluasi tata kelola e-government, teknologi dan infrastruktur e-government, Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government, Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah, serta Aplikasi Layanan Publik			
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola e-government mencakup program dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi dan infrastruktur e-government meliputi teknologi e-government dan infrastruktur e-government	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi dan infrastruktur e-business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan interoperabilitas dan interkoneksi e-business	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan aplikasi layanan e-business yang mencakup bidang usaha kecil dan makro serta bidang usaha menengah dan besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri informatika yang meliputi kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan, pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan, pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar serta pemberdayaan informatika masyarakat khusus			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat perkotaan yang meliputi perancangan model dan penerapan model	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat pedesaan meliputi pengembangan model dan penerapan model	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan informatika masyarakat perbatasan dan pulau terluar meliputi pengembangan model dan penerapan model	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan informatika masyarakat khusus meliputi pengembangan model dan penerapan model	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemberdayaan industri informatika yang meliputi industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak serta industri konten multimedia			
Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika mencakup pemberdayaan dan promosi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat informatika pengguna meliputi pemberdayaan dan pengembangan produk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri perangkat lunak yang mencakup pemberdayaan dan pengembangan produk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan industri konten multimedia yang meliputi pemberdayaan dan pengembangan produk	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan keamanan informasi mencakup kegiatan tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi, monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi, penyidikan dan penindakan serta budaya keamanan informasi			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola keamanan informasi yang mencakup kelembagaan dan manajemen resiko	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi keamanan informasi yang mencakup infrastruktur dan aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi yang mencakup infrastruktur dan aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan dan penindakan yang mencakup monitoring dan evaluasi keamanan informasi serta tanggap darurat peristiwa keamanan informasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan budaya keamanan informasi meliputi penyidikan dan penindakan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik mencakup kegiatan tata kelola komunikasi publik, pengelolaan opini publik dan layanan komunikasi publik			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi publik mencakup program dan monitoring serta evaluasi tata kelola komunikasi publik; pengumpulan dan pengolahan opini publik; pengumpulan dan pengolahan data layanan komunikasi publik			

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan tata kelola komunikasi publik mencakup program komunikasi publik, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan opini publik yang mencakup pengumpulan opini publik dan pengolahan opini publik	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan layanan komunikasi publik yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan Pengolahan dan Penyediaan Informasi mencakup informasi politik, hukum dan keamanan, informasi perekonomian dan informasi kesejahteraan rakyat			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan penyediaan informasi politik, hukum dan keamanan yang mencakup politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan informasi perekonomian mencakup keuangan, perbankan, jasa, industri dan perdagangan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan pengolahan dan penyediaan informasi kesejahteraan rakyat yang meliputi agama, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan Pengelolaan Media Publik mencakup media cetak, media online, dan media luar ruang dan audio visual			
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media cetak	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media online	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka
Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan media publik yaitu media luar ruang dan audio visual	Biasa/Terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi mencakup program serta monitoring dan evaluasi kemitraan media dan dunia usaha, program serta monitoring dan evaluasi kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi			
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi yaitu kemitraan pemerintah dan lembaga negara mencakup program kemitraan pemerintah dan lembaga negara, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi antara kemitraan media dengan dunia usaha mencakup program kemitraan media dan dunia usaha, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kemitraan komunikasi antara kemitraan organisasi kemasyarakatan dengan profesi yang mencakup program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan informasi internasional, mencakup program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi media asing, program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional, dan program serta monitoring dan evaluasi layanan informasi masyarakat luar negeri			
Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi media asing mencakup program layanan informasi media asing, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang mencakup program layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan layanan informasi masyarakat luar negeri mencakup program layanan informasi masyarakat luar negeri, monitoring dan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pusat data dan sarana informatika yang mencakup infrastruktur informatika, sistem dan data, pusat kerjasama internasional serta pusat informasi dan hubungan masyarakat			
Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur informatika mencakup jaringan, piranti teknologi informatika dan keamanan informatika	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan sistem dan data mencakup portal dan konten, pengumpulan dan pengolahan data serta pengembangan aplikasi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan pusat kerjasama internasional yang meliputi kerja sama multilateral, kerja sama regional dan kerja sama bilateral			
Arsip yang berkaitan dengan kerja sama multilateral yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia multilateral, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik multilateral serta investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi multilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan kerja sama regional yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia regional, penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik regional serta investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi regional	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan kerja sama bilateral yang mencakup sumber daya dan perangkat pos, informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bilateral serta penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik bilateral	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan pusat informasi dan hubungan masyarakat yang meliputi kegiatan pelayanan informasi, hubungan masyarakat, bimbingan teknis dan evaluasi			
Arsip yang berkaitan dengan pelayanan informasi yang meliputi pelayanan informasi media baru, pelayanan informasi konvensional serta dokumentasi dan perpustakaan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan hubungan masyarakat yang meliputi kegiatan publikasi, analisis berita dan pengelolaan opini publik serta hubungan internal dan eksternal	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Arsip yang berkaitan dengan bimbingan teknis yang meliputi bimbingan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, bimbingan penyelenggaraan pos dan informatika, bimbingan aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, serta bimbingan sarana informatika, informasi dan humas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup
Arsip yang berkaitan dengan evaaluasi pelaksanaan yang meliputi evaluasi sumber daya dan perangkat pos dan informatika, evaluasi penyelenggaraan pos dan informatika, evaluasi aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik serta evaluasi sarana informatika, informasi dan humas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	

<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh publik, tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh publik, tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh publik, tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

KODE KLASIFIKASI				JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN
KODE KLASIFIKASI	P	S	T		
	2			3	4
KP	V			KEPEGAWAIAN	
KP.00		V		Kebijakan Bidang Kepegawaian	Arsip mengenai pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian yang terdiri dari pengkajian dan pengusulan kebijakan, perumusan kebijakan, serta masukan dan dukungan kebijakan
KP.01		V		Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	
KP.01.00			V	1. Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Arsip mengenai perencanaan kebutuhan ASN seperti bahan penyusunan rencana kebutuhan, analisa kebutuhan PNS dan PPPK, serta pengolahan data kebutuhan
				a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan	
				b. Analisis Kebutuhan	
				c. Pengolahan data kebutuhan	

KP.01.01		V	2.	Perencanaan Pertimbangan Formasi	Arsip mengenai pertimbangan formasi baik pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, dan pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas.
			a.	Pertimbangan teknis	
			b.	Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	
KP.01.02		V	3.	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Arsip penetapan kebutuhan ASN
KP.01.03		V	4.	Standarisasi Jabatan	Arsip mengenai standarisasi jabatan berupa informasi jabatan, kompetensi jabatan, dan klasifikasi jabatan
			a.	Informasi Jabatan	
			b.	Kompetensi Jabatan	
			c.	Klasifikasi Jabatan	
KP.02		V	Formasi dan Pengadaan Pegawai		

KP.02.00			V	1. Formasi ASN	Arsip mengenai formasi ASN mulai dari usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai dengan analisa jabatan dan beban kerja, usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, persetujuan formasi, hingga penetapan formasi dan penetapan formasi khusus.
				a. Usulan formasi disertai	
				b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan	
				c. Persetujuan Formasi	
				d. Penetapan Formasi	
				e. Penetapan Formasi Khusus	
KP.02.01			V	2. Proses Rekrutmen ASN	Arsip mengenai proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN)
KP.02.02			V	3. Pengumuman Kelulusan ASN	Arsip mengenai penetapan pengumuman kelulusan Aparatur Sipil Negara (ASN)
KP.02.03			V	4. Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima	Arsip lamaran yang tidak diterima

KP.02.04			V	5.	Pengangkatan ASN	Arsip nota usul pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN)
KP.02.05			V	6.	<i>Open Biding</i> (Seleksi Terbuka Jabat	Arsip mengenai <i>open biding</i> (seleksi terbuka jabatan)
KP.02.06			V	7.	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN	Arsip pengelolaan sistem rekrutmen ASN yang mencakup standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai, kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, hingga evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi dalam rangka pengadaan pegawai.
				1)	Standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi	
				2)	Kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan	
				3)	Evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi	

KP.02.07		V	8.	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN	Arsip mengenai fasilitasi penyelenggaraan seleksi ASN seperti pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, serta penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan ASN, hingga berkas pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi ASN dalam rangka pengadaan pegawai.
			1)	Pelayanan teknis dan administrasi seleksi	
			2)	Penyelenggaraan dan	
			3)	Sertifikasi dan pelaporan	
KP.03		V		Mutasi Pegawai	
KP.03.00		V	1	Alih Tugas	Arsip yang berkaitan dengan usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, hingga Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

KP.03.01		V	2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Arsip usulan hingga penetapan kenaikan pangkat/golongan/jabatan
KP.03.02		V	3	Pengangkatan dan Pemberhentian	Arsip usulan hingga penetapan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional
KP.03.03		V	4	Perubahan Data Dasar/ Status/Ked	Arsip mengenai penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

KP.03.04		V	5	Peninjauan Masa Kerja	Arsip mengenai usulan peninjauan masa kerja hingga penetapan
KP.03.05		V	6	BAPERJAKAT	Arsip kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
KP.04		V		Pengembangan Karir	
KP.04.00		V	1	Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ K	Arsip Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta mulai dari perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan, pelaksanaan, pelaporan, hingga terbitnya ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat

				1) Perencanaan dan penyusunan analisis	
				2) Pelaksanaan	
				3) Pelaporan	
				4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan	
KP.04.01		V	2	Penyesuaian ijazah	Arsip mengenai usulan penyesuaian ijazah
KP.04.02		V	3	Penyusunan Sistem Karier	Arsip mengenai penyusunan sistem karier hingga penetapan sistem karier

KP.04.03		V	4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan	Arsip Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
KP.04.04		V	5	Angka Kredit	Arsip pengajuan hingga penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit (DUPAK)
				a. Pengajuan Daftar Usul	
				b. Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit	
KP.05	V			Kinerja	

KP.05.00			V	1	Penilaian Kinerja dan Standar Kerja	Arsip mengenai hasil penilaian kinerja dan standar kerja ASN seperti sistem penilaian kinerja ASN, standar kinerja jabatan pegawai ASN, dan penilaian kinerja pegawai ASN.
					a. Sistem penilaian kerja ASN	
					b. Standar kinerja jabatan	
					c. Penilaian kinerja pegawai ASN	
KP.05.01			V	2.	Pengelolaan Database dan Analisis	Arsip mengenai pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN berupa pengelolaan database penilaian kinerja, analisis sistem informasi kinerja, serta teknis penilaian kinerja ASN
					a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN	
					b. Analisis sistem informasi	
					c. Teknis penilaian kinerja ASN	

KP.05.02		V	3. Evaluasi dan Pemantauan Penilaian	Arsip hasil evaluasi dan pemantauan terhadap penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN
KP.06		V	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
KP.06.00		V	1. Kode Etik Pegawai	Arsip penetapan kode etik pegawai

KP.06.01			V	2. Disiplin	Arsip penetapan penegakan disiplin dan peningkatan disiplin
				a. Penegakan Disiplin	
				b. Peningkatan Disiplin	
KP.06.02			V	3. Pemberhentian Dengan Hormat	Arsip penetapan pemberhentian dengan hormat

KP.06.03			V	4. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat	Arsip penetapan pemberhentian dengan tidak hormat
KP.06.04			V	5. Pemberhentian Sementara	Arsip penetapan pemberhentian sementara
KP.06.05			V	6. Pensiun ASN	Arsip pensiun ASN yang terdiri dari administrasi pensiun ASN serta perekaman dan pemeliharaan data pensiun, hingga penetapan pensiun ASN, termasuk penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN.

				a.	Administrasi Pensiun ASN	
					1) Administrasi Pensiun ASN	
					2) Perekaman dan Pemeliharaan data pensiun	
				b.	Penetapan Pensiun ASN	
				c.	Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN	
				d.	Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya	Arsip pensiun pejabat negara dan janda/dudanya berupa administrasi pensiun pejabat negara dan janda/dudanya, termasuk penyiapan pensiun pejabat negara (setneg/setkab) dan penetapan pensiun janda/duda pejabat negara (BKN).
					1) Administrasi pensiun Pejabat Negara (Sekretariat)	
					2) Penyiapan pensiun pejabat negara (Setneg/Setkab)	
					3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara	
KP.07		V			Bantuan Hukum	

KP.07.00		V	1.	Pemberian Bantuan Hukum	Arsip mengenai penugasan pemberian bantuan hukum
KP.07.01		V	2.	Bantuan Hukum Pegawai	Arsip mengenai proses bantuan hukum terhadap pegawai
KP.08		V	Status dan Kedudukan Pegawai		

KP.08.00			V	1. Status Kepegawaian	Arsip pertimbangan status kepegawaian berupa analisis status kepegawaian dan penyusunan pertimbangan status kepegawaian
				a. Analisis status kepegawaian	
				b. Penyusunan pertimbangan	
KP.08.01			V	2. Kedudukan Kepegawaian	Arsip pertimbangan kedudukan kepegawaian berupa analisis kedudukan kepegawaian dan penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian
				a. Analisis kedudukan	
				b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	

KP.08.02		V	3	Keberatan Pegawai	Arsip penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai terhadap status dan kedudukan pegawai
KP.08.03		V	4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	Arsip mengenai perselisihan/sengketa kepegawaian terhadap status dan kedudukan pegawai
KP.09		V	Sistem Informasi Kepegawaian		

KP.09.00			V	1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	<p>Arsip mengenai pengolahan data dan informasi kepegawaian berupa pengelolaan database kepegawaian ASN dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN, hingga penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN dan non ASN, serta pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik.</p>
					a. Pengolahan Data	
					1) Pengelolaan database kepegawaian ASN	
					2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN	
					b. Informasi Kepegawaian	
					1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN	
					2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN	
					3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik	

KP.09.01			V	2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Arsip mengenai pengembangan sistem informasi kepegawaian
KP.09.02			V	3	Pengembangan Sistem Pengelola	Arsip verifikasi dan distribusi, perekaman, dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik
					1) Verifikasi dan distribusi arsip	
					2) Perekaman dan arsip	
					3) Pengelolaan arsip	

KP.09.03		V	4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik	Arsip pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik
KP.10		V	Pengawasan dan pengendalian		
KP.10.00		V	1.	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat	Arsip pengawasan dan pengendalian mengenai formasi, pengadaan diklat dan pasca diklat baik dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
				a. Pelaksanaan peraturan	
				b. Monitoring dan Evaluasi	
				c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	

KP.10.01			V	2.	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan	Arsip pengawasan dan pengendalian mengenai kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan baik dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
				a.	Pelaksanaan peraturan	
				b.	Monitoring dan Evaluasi	
				c.	Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	
KP.10.02			V	3.	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja	Arsip pengawasan dan pengendalian mengenai gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja baik dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
				a.	Pelaksanaan peraturan	
				b.	Monitoring dan Evaluasi	
				c.	Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	

KP.10.03		V	4. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	Arsip pengawasan dan pengendalian mengenai kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN baik dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan.
			a. Pelaksanaan peraturan	
			b. Monitoring dan Evaluasi	
			c. Rekomendasi, evaluasi dan	
KP.10.04		V	5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	
KP.10.05		V	6. Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar	Arsip mengenai sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorar hingga penetapan keputusan
KP.11	V	Administrasi Pegawai		

KP.11.00			V	1. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Arsip administrasi pegawai berupa Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
KP.11.01			V	2. Cuti Sakit	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Sakit
KP.11.02			V	3. Cuti Bersalin	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Bersalin
KP.11.03			V	4. Cuti Tahunan	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Tahunan
KP.11.04			V	5. Cuti Alasan Penting	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Alasan Penting

KP.11.05			V	6. Cuti Besar	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Besar
KP.11.06			V	7. Cuti Diluar Tanggungan Negara	Arsip administrasi pegawai berupa Cuti Diluar Tanggungan Negara
KP.11.07			V	8. Karpeg/KPE/Karis/Karsu	Arsip Usul Penetapan Karpeg/ KPE/ Karis/ Karsu
KP.11.08			V	9. Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan	Arsip Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan

KP.11.09		V	10.	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Arsip Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
KP.11.10		V	11.	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Arsip Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
KP.11.11		V	12.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Arsip Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
KP.11.12		V	13.	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan	Arsip Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
KP.12		V		Kesejahteraan Pegawai	

KP.12.00			V	1. Pemeliharaan Kesehatan Pegawai	Arsip layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
KP.12.01			V	2. Asuransi Pegawai/BPJS	Arsip layanan asuransi pegawai/BPJS
KP.12.02			V	3. Tabungan Perumahan	Arsip layanan tabungan perumahan
KP.12.03			V	4. Bantuan Sosial	Arsip layanan bantuan sosial

KP.12.04		V	5. Pakaian Dinas	Arsip layanan pakaian dinas
KP.12.05		V	6. Layanan Pegawai yang Meninggal K	Arsip layanan pegawai yang meninggal karena dinas
KP.12.06		V	7. Pemberian Tali Kasih	Arsip pemberian tali kasih
KP.12.07		V	8. Pemberian Piagam Penghargaan da	Arsip pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa
KP.12.08		V	9. Olahraga dan Rekreasi	Arsip layanan olahraga dan rekreasi pegawai

KP.12.09		V	10.	Rekam Medis	Arsip rekam medis/ <i>medical record</i> pegawai
KP.13		V	Administrasi Perseorangan		
KP.13.00		V	1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Arsip perseorangan Pegawai Negeri Sipil
KP.13.01		V	2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	Arsip Perseorangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

KP.13.02			V	3. Pejabat Negara dan pejabat lainnya	Arsip Perseorangan Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan termasuk Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang.
				a. Presiden dan Wakil Presiden	
				b. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat	
				c. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat	
				d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan	
				e. Gubernur dan wakil gubernur	
				f. Bupati/walikota dan wakil	
				g. Pejabat negara lainnya yang ditentukan Undang-Undang	
KP.13.03			V	4. Sekretaris Daerah	Arsip perseorangan Sekretaris Daerah Provinsi dan/atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

KP.13.04		V	5. ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	Arsip perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
KP.14	V		Penilaian Kompetensi	
KP.14.00		V	1. Penilaian Kompetensi	Arsip Penilaian Kompetensi
KP.14.01		V	2. Hasil Penilaian Kompetensi	Arsip Hasil Penilaian Kompetensi

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DARI DAERAH
KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
8	9	10	11	12	13
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Biasa/Terbuka	Pengguna Internal dan Eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Rahasia	Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAS
SISTEM KEAMANAN DAN AKSES
URUSAN KESEHATAN**

KLASIFIKASI				JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN	SI
KODE KLASIFIKASI	P	S	T			KLASIFIKASI KEAMANAN
1	2			3	4	5
KS	V			KESEHATAN		
KS.00		V		A. Penetapan kebijakan bidang kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan dan penyusunan bahan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan dan penetapan dalam bentuk NSPK	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik
KS.01			V	B. Memorandum of Understanding	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan dan penyusunan bahan, pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan dan penetapan dalam bentuk NSPK	Rahasia
				UPAYA KESEHATAN		

KS.02		V	A.	Upaya Kesehatan Dasar	Arsip yang berkaitan dengan upaya kesehatan dasar meliputi; pendidikan masyarakat tentang masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya, pemberantasan dan pencegahan penyakit endemik setempat, program imunisasi, kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, pengadaan obat essential, pengadaan pangan dan gizi, pengobatan penyakit umum dan cedera serta penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan	
KS.02.00		V	1.	Pelayanan kedokteran keluarga	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kedokteran yang menyeluruh yang memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit.	Terbatas
KS.02.01		V	2.	Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer	Arsip yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan praktek dokter klinis di pelayanan kesehatan primer	Terbatas
KS.02.02		V	3.	Pelaksanaan kesehatan primer	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan primer di puskesmas atau rumah sakit	Terbatas

KS.02.03		V	4.	Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	Terbatas
KS.02.04		V	5.	Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit dan puskesmas	Terbatas
KS.02.05		V	6.	ICD 10, Destistry & Stomatology	Arsip yang berkaitan dengan ICD 10, Destistry & Stomatology	Terbatas
KS.02.06		V	7.	Infeksi menular lewat transfusi darah	Arsip yang berkaitan dengan infeksi menular lewat kegiatan transfusi darah	Terbatas
KS.02.07		V	8.	Penyakit mulut di tingkat primer	Arsip yang berkaitan dengan penyakit mulut di tingkat primer	Terbatas

KS.02.08		V	9.	Pembiayaan darah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan darah	Terbatas
KS.02.09		V	10.	Penggunaan darah rasional	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan darah rasional	Terbatas
KS.02.10		V	11.	Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah	Terbatas
KS.02.11		V	12.	Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Arsip yang berkaitan dengan Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan	Terbatas
KS.02.12		V	13.	Akreditasi puskesmas	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan akreditasi puskesmas yang dihasilkan dari tahapan survei akreditasi dan penetapan akreditasi	Terbatas

KS.02.13		V	14.	Puskesmas berprestasi	Arsip yang berkaitan dengan proses penilaian verifikasi administrasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan kunjungan lapangan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah lulus administrasi	Terbatas
KS.03	V	B.	Upaya Kesehatan Rujukan			
KS.03.00		V	1.	Pelayanan kesehatan rujukan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rujukan meliputi rumah sakit bergerak, rumah sakit pratama, rumaah sakit publik, rumah sakit privat dan rumah sakit khusus	Terbatas
KS.03.01		V	2.	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)	Arsip yang berkaitan dengan proses pelayanan kedokteran dan organisasi keprofesian dokter	Terbatas
KS.03.02		V	3.	Pelayanan rumah sakit privat	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit privat yang meliputi akses pelayanan SPGDT call 119, akses pelayanan rekayasa jaringan dan sel punca, pelayanan geriarti, pelayanan medical tourism dan pelayanan hyperbarik	Terbatas

KS.03.03		V	4.	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit khusus dan pelayanan kesehatan lainnya meliputi rumah sakit rujukan regional jejaring pelayanan kanker, rumah sakit rujukan nasional dan rumba sakit rujukan regional serta pencegahan fraud di rumah sakit	Terbatas
KS.03.04		V	5.	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan meliputi keselamatan pasien di rumah sakit, pelayanan jantung dan pembuluh darah di rumah sakit, pelayanan penyakit ginjal, pelayanan HIV/ AIDS, pelayanan tim reproduksi berbantu di rumah sakit, penguatan rumah sakit vertikal sebagai sister hospital serta program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPSDBK)	Terbatas
KS.03.05		V	6.	Pelayanan pasien jaminan kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan pasien jaminan kesehatan meliputi pelayanan pasien jaminan kesehatan dan biaya klaim tenaga kerja indonesia bermasalah (TKIB) dari luar negeri	Terbatas
KS.03.06		V	7.	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Arsip yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa	Terbatas

KS.03.07		V	8.	Badan pengawas rumah sakit	Arsip yang berkaitan dengan badan/lembaga pengawas rumah sakit	Terbatas
KS.03.08		V	9.	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)	Arsip yang berkaitan dengan perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) meliputi usulan penetapan atau peningkatan kelas dari pemilik RS atau pimpinan badan hukum rumah sakit, rekomendasi dinas kesehatan provinsi, profil dan data rumah sakit 3 (tiga) tahun terakhir, self instrument assesment	Terbatas
KS.03.09		V	10.	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya	Arsip yang berkaitan dengan akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan penunjang lainnya meliputi akreditasi rumah sakit standar internasional, akreditasi rumah sakit dengan standar nasional, rumah sakit pasca akreditasi nasional dan surveyor akreditasi rumah sakit	Terbatas
KS.04	V	C.	Keperawatan dan keteknisian medik			
KS.04.00		V	1.	Pelayanan Keperawatan Dasar	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perawatan dasar yang terdapat pada rumah sakit dan puskesmas	Terbatas

KS.04.01		V	2.	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit	Terbatas
KS.04.02		V	3.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Arsip yang berkaitan dengan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum	Terbatas
KS.04.03		V	4.	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Arsip yang berkaitan dengan Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus	Terbatas
KS.04.04		V	5.	Bina pelayanan kebidanan	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan kebidanan	Terbatas
KS.05	V		D.	Penunjang medik dan sarana kesehatan		

KS.05.00		V	1.	Mikrobiologi dan imunologi	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang mikrobiologi dan imunologi meliputi laboratorium kesehatan, klinik, puskesmas dan mikrobiologi kultur	Terbatas
KS.05.01		V	2.	Patologi dan toksilologi	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang patologi dan toksilologi meliputi PNPME dan Sarana Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Terbatas
KS.05.02		V	3.	Radiologi	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang radiologi meliputi pelayanan radiologi, dosis radiasi nasional, radiologi, radioterapi, dan kedokteran nuklir, radioterapi di rumah sakit, telemedicine, radiologi diagnostik dan teleradiologi	Terbatas
KS.05.03		V	4.	Perizinan dan sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang perizinan dan sertifikasi meliputi perijinan pelayanan radiologi dan sertifikasi peningkatan kapabilitas	Terbatas

KS.05.04		V	5.	Sarana dan prasarana kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang sarana dan prasarana kesehatan meliputi prasarana bangunan rumah sakit kelas A, prasarana bangunan rumah sakit kelas B, prasarana bangunan rumah sakit kelas C, prasarana ruang gawat darurat, prasarana ruang operasi, prasarana ruang perawatan intensif, prasarana ruang rawat inap, prasarana ruang rehabilitasi medik, prasarana ruang instalasi sterilisasi sentral (CSSD), prasarana ruang yang aman dalam situasi darurat dan bencana, Prasarana Instalasi Penyediaan Air Bersih untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Prasarana Rumah Sakit Keselamatan Jiwa, Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Gas Medik Dan Vakum Medik, Prasarana Rumah Sakit Sistem Instalasi Tata Udara dan Prasarana Rumah Sakit Sistem Proteksi Kebakaran Aktif	Terbatas
KS.05.05		V	6.	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK, kalibrasi rumah sakit, kalibrasi puskesmas, pemeliharaan peralatan kesehatan rumah sakit dan pemeliharaan peralatan kesehatan puskesmas	Terbatas

KS.05.06		V	7.	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penunjang medik sarana kesehatan di bidang perawatan aplikasi sarana dan prasarana kesehatan kesehatan meliputi ASPAK rumah sakit, ASPAK puskesmas dan ASPAK dinas kesehatan Propinsi/Kab/Kota	Terbatas
KS.06	V		E.	Kesehatan Jiwa		
KS.06.00		V	1.	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan meliputi kesehatan jiwa di desa diaga, kegawatdaruratan psikiatrik di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan promosi kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan primer	Terbatas
KS.06.01		V	2.	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan bina kesehatan jiwa fasilitas pelayanan kesehatan meliputi layanan unggulan di RS jiwa, rehabilitasi psikososial di RS jiwa, indikator mutu RS jiwa serta mutu layanan jiwa di RS jiwa dan RSUD sesuai penyelenggaraan RS	Terbatas
KS.06.02			3.	Etikolegal dan asesmen	Arsip yang berkaitan dengan etikolegal dan asesmen yang meliputi penanggulangan penelantaran dan pemasangan serta penanganan salah lainnya dan visum et repertum	Terbatas

KS.06.03		V	4.	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Arsip yang berkaitan dengan Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya	Terbatas
KS.06.04		V	5.	Etikolegal dan asesmen	Arsip yang berkaitan dengan Etikolegal dan asesmen	Terbatas
KS.06.05		V	6.	Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Arsip yang berkaitan dengan Kesehatan jiwa kelompok beresiko	Terbatas
			PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN			
KS.07		V	A.	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra		
KS.07.00		V	1.	Surveilans dan respon kejadian luar biasa	Arsip yang berkaitan dengan surveilans dan respon kejadian luar biasa yang meliputi difteri, polio, penyelenggaraan kegiatan survei pre TAS filariasis, surveilans influenza dan keracunan pangan	Terbatas

KS.07.01		V	2.	Imunisasi	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan imunisasi yang dilakukan oleh puskesmas atau rumah sakit meliputi pekan imunisasi nasional, coldchain bagi petugas imunisasi, introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (pentavalen) pada bayi dan balita, imunisasi bagi petugas kesehatan, imunisasi di daerah sulit, imunisasi TT bagi wanita usia subur (WUS), imunisasi bagi masyarakat umum serta vaksin dan serum program imunisasi	Terbatas
KS.07.02		V	3.	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan	Arsip yang berkaitan dengan Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan yang meliputi pemberian ICV, hapus serangga dan hapus tikus, teknis pengendalian resiko kesehatan lingkungan di pelabuhan, vaksinasi meningitis, kekarantinaan kesehatan dan upaya kesehatan pelabuhan, obat dan P3K kapal, kesehatan nakhoda/pilot dan ABK/pesawat, air bersih di kapal dan fumigasi di kapal	Terbatas
KS.07.03		V	4.	Kesehatan matra	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra meliputi mudik sehat, kesehatan bagi penumpang darat, kapal laut dan pesawat udara, kesehatan migran, upaya kesehatan penyelaman dan hyperbarik, penanggulangan kesehatan akibat gangguan kamtibmas dan kesehatan transmigrasi bagi tenaga kesehatan	Terbatas

KS.08		V	B.	Pengendalian penyakit menular langsung		
KS.08.00		V	1.	Pengendalian tuberkolosis	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian penyakit tuberkolosis meliputi pengendalian penyakit TB, TB multi drug resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB anak, TB HIV, keperawatan TB dan Laboratorium TB	Terbatas
KS.08.01		V	2.	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual meliputi survei terpadu biologis dan perilaku (STBP), HIV, infeksi menular seks (IMS) perawatan, dukungan dan pengobatan serta obat anti retro viral dan reagen tes HIV	Terbatas
KS.08.02		V	3.	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian infeksi saluran pernafasan akut meliputi middle east respiratory syndrome corona virus (MERS CoV) dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)	Terbatas
KS.08.02		V		Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan meliputi diare, tifoid dan hepatitis	Terbatas

KS.08.03		V		Pengendalian kusta dan frambusia	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian kusta dan frambusia serta aliansi nasional eliminasi kusta dan frambusia (ANEK)	Terbatas
KS.09	V		C.	Pengendalian penyakit bersumber binatang		
KS.09.00		V	1.	Pengendalian malaria	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian penyakit malaria yang meliputi kelambu berinsektisida, eliminasi malaria dan crosschecker mikroskopis malaria	Terbatas
KS.09.01		V		Pengendalian arbovirosis	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian arbovirosis meliputi DBD, chikungunya dan ebola	Terbatas
KS.09.02		V		Pengendalian zoonosis	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian zoonosis meliputi penyakit flu burung, vaksin anti rabies (VAR) baru, penyakit pes dan penyakit flu baru hemagglutinin tipe 1 dan neuraminidase tipe 1	Terbatas

KS.09.03		V		Pengendalian filariasis dan kecacingan	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian filariasis dan kecacingan serta schistosomiasis	Terbatas
KS.10			D.	Pengendalian penyakit tidak menular		
KS.10.00		V	1.	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian penyakit jantung, pembuluh darah, hipertensi dan stroke	Terbatas
KS.10.01			2.	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian penyakit diabetes melitus, gangguan metabolik, gangguan tiroid dan gangguan obesitas	Terbatas
KS.10.02		V	3.	Penyakit kanker	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian penyakit kanker	Terbatas

KS.10.03				4.	Penyakit kronis dan generatif	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengendalian penyakit kronis dan generatif meliputi penyakit akibat produk tembakau serta asma, lupus dan thalassemia	Terbatas
KS.10.04				5.	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan	Arsip yang berkaitan dengan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan meliputi pengendalian cedera, kecelakaan lalulintas dan penanganan kesehatan akibat tindak kekerasan	Terbatas
KS.11		V		E.	Penyehatan lingkungan		
KS.11.00			V	1.	Penyehatan air dan sanitasi dasar	Arsip yang berkaitan dengan penyehatan air dan sanitasi dasar meliputi pengawasan kualitas air minum dan sanitasi total berbasis masyarakat	Terbatas
KS.11.01			V	2.	Pemukiman dan tempat umum	Arsip yang berkaitan dengan penyehatan permukiman dan tempat umum meliputi higiene sanitasi dan bangunan umum, dampak perubahan iklim terhadap kesehatan serta pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum	Terbatas

KS.11.02		V	3.	Kawasan dan sanitasi darurat	Arsip yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan kawasan dan sanitasi darurat meliputi penanggulangan kedaruratan bidang kesehatan lingkungan, fasilitas kesehatan masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan, pelabuhan sehat, pasar sehat dan kota sehat serta penyehatan kawasan dan sanitasi dasar	Terbatas
KS.11.03			4.	Higien sanitasi pangan	Arsip yang berkaitan dengan penyehatan lingkungan higiene sanitasi pangan meliputi makanan jajanan, restoran/rumah makan, jasa boga dan depot air minum	Terbatas
KS.11.04		V	5.	Pengamanan limbah, udara, radiasi	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan limbah, udara dan radiasi meliputi medis fasilitas layanan kesehatan, limbah medis, analisis mengenai dampak lingkungan dan pengamanan dampak kesehatan radiasi non pengion	Terbatas
KS.12	V		F.	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan		

KS.12.00		V	1.	Pengembangan teknologi laboratorium	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan teknologi laboratorium meliputi laboratorium pengendali penyakit, laboratorium kesehatan lingkungan, laboratorium kesehatan matra, model dan teknologi tepat guna, uji kendali mutu dan kalibrasi serta pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi	Terbatas
KS.13		V	G.	Sertifikasi kesehatan dan pengujian kesehatan		
KS.13.00			1.	Ship sanitation	Arsip yang berkaitan dengan ship sanitation meliputi ship sanitation control exemption of certificate, ship sanitation control of certificate dan sertifikat pengawasan obat/alat P3K kapal	Terbatas
KS.13.01			2.	Sertifikat	Arsip yang berkaitan dengan sertifikat kesehatan, surat keterangan pengujian nakhoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara, sertifikat air bersih, sertifikat penyelenggaraan perusahaan fumigasi di kapal, sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga, sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan dan rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan	Terbatas
			GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
KS.14		V	A.	Gizi		

KS.14.00		V	1.	Gizi makro	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan gizi makro yang meliputi gerakan nasional sadar gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi dan pemantauan pertumbuhan anak	Terbatas
KS.14.01		V	2.	Gizi mikro	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan gizi mikro yang meliputi upaya penanggulangan masalah gizi mikro, manajemen taburia dan upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya	Terbatas
KS.14.02		V	3.	Gizi klinik dan diatetik	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan gizi klinik dan diatetik meliputi pelayanan gizi di puskesmas, rumah sakit dan instansi, tatalaksana anak gizi buruk serta pencegahan dan penaggulangan gizi lebih	Terbatas
KS.14.02		V	4.	Konsumsi makanan dan jasa makanan	Arsip yang berkaitan dengan konsumsi makanan dan jasa makanan meliputi makanan pendamping asi, asi eksklusif, pedoman gizi seimbang, makanan bayi dan anak, buffer stock makanan pendamping ASI, makanan tambahan ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita gizi kurang dan makanan tambahan anak sekolah	Biasa/Terbuka

KS.14.03		V	5.	Kewaspadaan gizi	Arsip yang berkaitan dengan kewaspadaan gizi yang meliputi surveilans gizi, epidemiologi kasus gizi buruk, penanganan bidang gizi dalam situasi bencana serta jejaring informasi pangan dan gizi	Terbatas
	V		B. Kesehatan ibu			
KS.15.00		V	1.	Kesehatan ibu hamil	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu hamil meliputi pelayanan prenatal terpadu, pelayanan kelas ibu hamil dan pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak	Terbatas
KS.15.01		V	2.	Kesehatan ibu bersalin dan nifas	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan nifas meliputi kemitraan bidan dan dukun, rumah tunggu kelahiran dan supervisi fasilitatif	Terbatas
KS.15.02		V	3.	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi meliputi audit maternal perinatal, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, tanda bahaya pada kehamilan dan surveilans kematian ibu	Terbatas

KS.15.03		V	4.	Keluarga berencana	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelatihan keluarga berencana	Terbatas
KS.15.04		V	5.	Perlindungan kesehatan reproduksi	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perlindungan kesehatan reproduksi meliputi pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta pengarus utamaan gender bidang kesehatan	Terbatas
KS.16	V	C.	Kesehatan anak			
KS.16.00		V	1.	Kelangsungan hidup bayi	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kelangsungan hidup bayi meliputi pelayanan kesehatan neonatal, manajemen asfeksia, manajemen berat bayi lahir rendah (BBLR), dan pencegahan infeksi	Terbatas
KS.16.01		V	2.	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kelangsungan anak balita dan pra sekolah meliputi pelatihan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang, rujukan tumbuh kembang dan manajemen terpadu balita sakit berbasis komputer	Terbatas

KS.16.02		V	3.	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kewaspadaan penanganan balita beresiko meliputi screening hypotheroid congenital, surveillance kesehatan anak dan surveillance kesehatan bawaan	Terbatas
KS.16.03		V	4.	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja meliputi tempat penanganan kesehatan remaja di rumah sakit, pelayanan kesehatan peduli remaja dan usaha kesehatan sekolah	Terbatas
KS.16.04		V	5.	Perlindungan kesehatan anak	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan perlindungan kesehatan anak meliputi korban kekerasan terhadap anak, anak dengan disabilitas, anak terlantar/anak jalanan di panti, anak yang berhadapan dengan hukum di lapas/rutan serta anak kelompok terasing/kelompok minoritas	Terbatas
KS.17	V		D.	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer		
KS.17.00		V	1.	Kesehatan tradisional keterampilan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional keterampilan yang meliputi akupresure, asuhan mandiri kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradisional keterampilan di fasilitas layanan kesehatan dan pelayanan tradisional keterampilan lainnya	Terbatas

KS.17.01		V	2.	Kesehatan tradisional ramuan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional ramuan meliputi health tourism, peningkatan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA), pelayanan sehat pakai air (SPA), asuhan mandiri kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan tradisional ramuan di fasyankes.	Terbatas
KS.17.02		V	3.	Kesehatan alternatif dan komplementer	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer meliputi akupuntur, obat herbal/obat tradisional, integrasi yankestrad dan pelayanan alternatif komplementer lainnya	Terbatas
KS.17.03		V	4.	Penapisan dan kemitraan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan penapisan dan kemitraan meliputi sentra penerapan dan pengembangan pengobatan tradisional, kelompok kerja nasional kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer, penapisan pengobat tradisional asing, kemitraan pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer, pengobat tradisional dan asosiasi pengobat tradisional	Terbatas
KS.18		V	E.	Kesehatan kerja dan Olah raga		
KS.18.00		V	1.	Pelayanan kesehatan kerja	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kerja meliputi penyakit akibat kerja, pemeriksaan kesehatan kerja dan pemeriksaan calon tenaga kerja indonesia	Terbatas

KS.18.01		V	2.	Kapasitas kerja	Arsip yang berkaitan dengan kapasitas kerja yang meliputi gerakan pekerja perempuan sehat produktif, kapasitas kesehatan kerja dan TP ASI	Terbatas
KS.18.02		V	3.	Lingkungan kerja	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan lingkungan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja di KKP, K3 perkantoran, K3 rumah sakit, K3 puskesmas, biomonitoring efek kesehatan dan review pedoman pengendalian risiko kesehatan	Terbatas
KS.18.03		V	4.	Kemitraan kesehatan kerja	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kemitraan kesehatan kerja yang meliputi pengembangan jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja, kesehatan nelayan, integrasi pos UKK, kabupaten/kota percontohan dan penguatan profesi	Terbatas
KS.18.04		V	5.	Kesehatan perkotaan	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan perkotaan yang meliputi kawasan kumuh dan miskin perkotaan dan forum kota	Terbatas

KS.18.05		V	6.	Kesehatan olahraga	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan olahraga meliputi kebugaran jasmani bagi karyawan/pekerja, kebugaran jasmani bagi calon jemaah haji, kebugaran jasmani bagi usia sekolah, olahraga bagi ibu hamil/masa nifas, olahraga bagi usia lanjut dan pelayanan kesehatan olahraga masyarakat	Terbatas
			KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN			
KS.19		V	A.	Obat Publik dan perbekalan kesehatan		
KS.19.00		V	1.	Harga obat publik	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan penetapan harga obat publik meliputi harga jual obat generik, harga jual obat generik berdagang dan harga eceran tertinggi pada label obat	Terbatas
KS.19.01		V	2.	Pengadaan obat	Arsip yang berkaitan dengan pengadaan obat-obatan meliputi pengadaan vaksin reguler, obat esensial, obat pelayanan kesehatan dasar, kabupaten kota dan nasional, obat program malaria, obat program kesehatan anak, obat program kesehatan ibu, obat program gizi, obat anti tuberkolosis, obat program percepatan pembangunan kesehatan tanah papua, obat dan alat kesehatan haji indonesia, obat penderita thalassemia, obat psikotropika generik dan obat anti retro viral	Terbatas

KS.19.02		V	3.	Perbekalan kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan perbekalan kesehatan yang meliputi gudang farmasi, kelengkapan gudang obat dan perbekalan kesehatan, pemusnahan obat, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, pengadaan reagen screening darah, obat buffer stock dan hasil stock opname obat	Terbatas
KS.20		V	B.	Produksi dan distribusi alat kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan produksi dan distribusi alat-alat kesehatan	Terbatas
KS.20.00		V	1.	Alat kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penyediaan alat kesehatan yang meliputi alat kesehatan, kopensium alat kesehatan, pelabelan alat kesehatan dan PKRT, post market dan surveilliance alat kesehatan, produk alat kesehatan elektromedik dan produk alat kesehatan non elektromedik	Terbatas
KS.20.01		V	2.	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	Arsip yang berkaitan dengan produsen dan distributor alat kesehatan dan obat yang meliputi industri farmasi, pedagang besar farmasi, pedagang eceran obat, penyalur alat kesehatan, toko alat kesehatan dan perusahaan rumah tangga alat kesehatan	Terbatas

KS.20.02		V	3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi Produk Diagnostik In Vitro, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), PKRT Klas III, PKRT Klas I dan II, Perusahaan Rumah Tangga PKRT, Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga dan Post Market & Surveillance PKRT	Terbatas
KS.21		V	B. Kefarmasian			
KS.21.00		V	1.	Pelayanan kefarmasian	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang meliputi visit untuk apoteker, tanggung jawab apoteker terhadap keselamatan pasien dan penulisan resep	Terbatas
KS.21.01		V	2.	Farmasi klinis	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan farmasi klinis yang meliputi pharmaceutical untuk penyakit artritis rematik, asma, flu burung, hati, diabetes mellitus, infeksi saluran pernapasan jantung koroner : fokus sindrom koroner akut, pencampuran obat suntikan sediaan sitostatika serta dispensing sediaan steril	Terbatas
KS.21.02		V	3.	Farmasi Komunitas	Arsip yang berkaitan dengan farmasi komunitas yang berkaitan dengan penggunaan obat bebas dan bebas terbatas, kefarmasian di rumah, kefarmasiaan untuk pasien pediatri, penyakit menular dan farmasi di rumah sakit	Terbatas

KS.21.03		V	4.	Penggunaan obat rasional	Arsip yang berkaitan dengan penggunaan obat rasional yang meliputi obat rasional, informasi obat, kefarmasian untuk terapi antibiotik dan pemantauan terapi obat	Terbatas
KS.22	V		D. Produksi dan distribusi kefarmasian			
KS.22.00		V	1.	Obat tradisional	Arsip yang berkaitan dengan obat tradisional meliputi farmakope indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Suplemen I Farmakope Indonesia, Suplemen II Farmakope Indonesia, Suplemen II Farmakope Indonesia, Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia, Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia, Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT), Usaha Jamu Gendong (UJG), Usaha Jamu Racik (UJR) dan Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris	Terbatas
KS.22.01		V	2.	Kosmetik dan makanan	Arsip yang berkaitan dengan kosmetik dan makanan yang meliputi keamanan paangan, kosmetika bagi petugas, industri rumah tangga bagi petugas, makanan jajanan anak sekolah, kodeks kosmetika indonesia dan materia kosmetika bahan alam indonesia	Terbatas

KS.22.02		V	3.	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	Arsip yang berkaitan dengan Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus meliputi narkotika dan psikotropika, prekursor farmasi, sediaan farmasi, persetujuan impor dan ekspor serta pelaksanaan perizinan impor dan ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi	Terbatas
KS.22.03		V	4.	Kemandirian obat dan bahan baku obat	Arsip yang berkaitan dengan Kemandirian obat dan bahan baku obat meliputi Indonesian pharmaceutical industry directory	Terbatas
KS.23	V	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN				
KS.23.00		V	A.	Surat keterangan	Arsip yang berkaitan dengan surat keterangan yang meliputi surat keterangan special acces scheme, Surat keterangan alat kesehatan, Sertifikasi produksi PKRT, Surat keterangan PKRT	Terbatas
KS.23.01			B.	Sertifikasi dan perijinan	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi dan perijinan yang meliputi sertifikasi produksi alat kesehatan, sertifikasi sarana distribusi alat kesehatan, perijinan dan pengawasan alat kesehatan dan perijinan penyalur alat kesehatan	Terbatas
KS.24	V	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN				

KS.24.00		V	A.	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	Arsip yang berkaitan dengan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan krisis kesehatan	Terbatas
KS.24.01		V	B.	Tanggap darurat dan pemulihan	Arsip yang berkaitan dengan tanggap darurat dan pemulihan krisis kesehatan	Terbatas
KS.24.02		V	C.	Pemantauan dan informasi	Arsip yang berkaitan dengan pemantauan dan informasi krisis kesehatan	Terbatas
KS.24.03		V	D.	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	Terbatas
KS.24.04		V	E.	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Arsip yang berkaitan dengan Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	Terbatas

KS.25		V	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN			
KS.25.01			V	A. Tersedianya data NHA setiap tahun	Arsip yang berkaitan dengan ketersediaan data NHA di setiap tahun dalam upaya pengembangan dan jaminan kesehatan	Terbatas
KS.25.02			V	B. Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN	Arsip yang berkaitan dengan ketersediaan dokumen teknis penguatan pelaksanaan JK dalam upaya pengembangan dan jaminan kesehatan	Terbatas
KS.26		V	INTELIGENSIA KESEHATAN			
KS.26.00			V	A. Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan yang meliputi inteligensia anak, remaja, dewasa dan lanjut usia	Terbatas
KS.26.01			V	B. Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan meliputi inteligensia akibat gangguan bawaan dan inteligensia akibat gangguan degeneratif dan sistem persyarafan	Terbatas
KS.27		V	KESEHATAN HAJI			

KS.27.00		V	A.	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji yang meliputi pemeriksaan kesehatan jamaah haji, pelayanan kesehatan jamaah haji kab/kota, klaim pelayanan kesehatan di embarkasi/debarkasi atau KKP, pelayanan kesehatan embarkasi, rekrutmen panitia penyelenggara ibadah haji dan rekrutmen tenaga musiman	Terbatas
KS.27.01		V	B.	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji	Arsip yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji yang meliputi advokasi dan kemitraan pembinaan kesehatan haji, kesehatan haji di kab/kota, kesehatan haji terpadu, pemeriksaan jasa boga catering jamaah haji, vaksinasi jamaah haji, sanitasi asrama haji serta penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia dan Arab Saudi	Terbatas
KS.28		V		PROMOSI KESEHATAN		
KS.28.00		V	A.	Sarana Promosi Kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan sarana promosi kesehatan yang meliputi booklet, poster, leaflet, pamflet, lembar balik, selebaran, buletin, festival, lomba, pameran, seminar, iklan layanan masyarakat, film, dan radio spot	Biasa/Terbuka

KS.28.01		V	B.	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran	Arsip yang berkaitan dengan pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran yang meliputi saka bhakti husada, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, lembaga sosial/organisasi masyarakat di bidang kesehatan, kawasan tanpa rokok, kerja sama dengan swasta di bidang kesehatan, kemitraan dan peran serta masyarakat di bidang kesehatan, koordinasi lintas program/lintas sektor di bidang kesehatan serta peran serta kader PKK dan dasawisma dalam mendukung kesehatan ibu dan anak	Biasa/Terbuka
KS.28.02		V	C.	Pengembangan pesan promosi kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan pesan promosi kesehatan yang meliputi pengembangan pesan promosi kesehatan, kampanye promosi kesehatan dan video animasi promosi kesehatan	Biasa/Terbuka
KS.28.03		V	D.	Hari kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan peringatan hari kesehatan yang meliputi peringatan hari kesehatan nasional, hari kesehatan dunia, hari tanpa tembakau se-dunia, serta hari-hari besar kesehatan lainnya	Biasa/Terbuka
KS.29		V		KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA		
KS.29.00		V	A.	Surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi	Arsip yang berkaitan dengan konsil kedokteran indonesia yaitu surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi	Terbatas

KS.30		V		DATA DAN INFORMASI		
KS.30.00			V	A. Statistik kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan statistik kesehatan yang meliputi statistik derajat dan upaya kesehatan serta statistik lingkungan dan sumber daya kesehatan	Terbatas
KS.30.01			V	B. Analisis dan diseminasi informasi	Arsip yang berkaitan dengan analisis data kesehatan dan diseminasi informasi kesehatan	Terbatas
KS.30.02			V	C. Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dan bank data	Terbatas
				PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		
KS.31		V		1. KEBIJAKAN	Arsip yang berkaitan dengan kebijakan pengawasan obat dan makanan meliputi pengawasan produk terapeutic dan NAPZA, pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplement dan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Terbatas

KS.31.00			V		A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan	Terbatas
KS.31.01			V		B. Penyiapan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan	Terbatas
KS.31.02			V		C. Perumusan dan penyusunan bahan	Arsip yang berkaitan dengan perumusan dan penyusunan bahan penyiapan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan	Terbatas
KS.31.03			V		D. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan	Terbatas
KS.31.04			V		E. Penetapan dalam bentuk NSPK	Arsip yang berkaitan dengan penetapan kebijakan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengawasan obat dan makanan	Terbatas

KS.32		V		2.	PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKT		
KS.32.00			V	A.	Penilaian obat dan produk biologi		
					1. Penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi		
					a. Pra registrasi	Arsip yang berkaitan dengan pra registrasi penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang meliputi hasil pra registrasi, kajian/laporan, dokumen paten dan hasil evaluasi site master file	Terbatas
					b. Registrasi		
					1. registrasi obat innovator termasuk dokumen terkait	Arsip yang berkaitan dengan registrasi penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang meliputi registrasi obat innovator termasuk dokumen terkait	Terbatas
					2. Registrasi obat copy	Arsip yang berkaitan dengan registrasi penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang meliputi registrasi obat copy	Terbatas
					3. Registrasi ulang	Arsip yang berkaitan dengan registrasi penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang meliputi registrasi ulang	Terbatas

					c. Uji Klinik	Arsip yang berkaitan dengan uji klinik penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang mencakup protokol uji klinik dan inspeksi uji klinik	Terbatas
					d. Persetujuan registrasi	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan registrasi penilaian obat baru, obat copy dan produk biologi yang meliputi sertifikat nomor ijin edar (NIE), surat persetujuan perubahan dan register nomor ijin edar (NIE)	Terbatas
					e. Pengembalian Nomor Ijin Edar (NIE)	Arsip yang berkaitan dengan pengembalian nomor ijin edar (NIE) yang meliputi dokumen pengembalian nomor ijin edar (NIE), dokumen pencabutan nomor ijin edar (NIE), dokumen pembekuan nomor ijin edar (NIE)	Terbatas
					2. Evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus yang meliputi evaluasi produk klinik serta surveilan efek samping obat dan alat kesehatan	Terbatas
KS.32.01		V		B.	Standardisasi produk		

					1. Standardisasi dan pengaturan produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan standardisasi dan pengaturan produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi standardisasi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengaturan produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Terbatas
					2. Standardisasi dan penilaian bioavailabilitas/bioequivalensi obat	Arsip yang berkaitan dengan Standardisasi dan penilaian bioavailabilitas/bioequivalensi obat yang meliputi standardisasi bioavailabilitas/bioequivalensi obat dan penilaian bioavailabilitas/bioequivalensi obat	Terbatas
					3. Bimbingan industri farmasi	Arsip yang berkaitan dengan bimbingan industri farmasi yang meliputi pengembangan produksi dan pengembangan ekspor	Terbatas
KS.32.02			V		C. Pengawasan produk-produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga		
					1. Inspeksi dan sertifikasi produksi produk terapeutik dan perbekalan kesehatan rumah tangga		

					a. Inspeksi sarana produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan Inspeksi sarana produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi pra inspeksi, agenda inspeksi, laporan hasil pemeriksaan dan laporan tindak lanjut hasil inspeksi	Terbatas
					b. Sertifikasi cara pembuatan obat yang baik	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik yang meliputi persetujuan penggunaan fasilitas bersama, surat keterangan good manufacture practice (GMP), sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOTB) yang diterbitkan serta sertifikat CPOTB yang dikembalikan	Terbatas
					2. Pemantauan pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Arsip yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling dan pengujian Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Terbatas
					3. Pemantauan harga obat	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemantauan harga obat	Terbatas

					4. Perijinan industri farmasi	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perijinan industri farmasi	Terbatas
KS.32.03		V		D.	Pengawasan distribusi produk terpetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga		
				1.	Inspeksi dan sertifikasi distribusi produk terpetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga		
				a.	Inspeksi sarana distribusi produk terpetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga		
				1.	Laporan hasil pemeriksaan dari balai besar badan pengawasan obat dan makanan (BPOM)	Arsip yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan dari balai besar badan pengawasan obat dan makanan (BPOM)	Terbatas

					2. Laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh pusat	Arsip yang berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan sarana distribusi oleh pusat	Terbatas
					3. Laporan Kasus	Arsip yang berkaitan dengan laporan kasus inspeksi sarana distribusi produk terapeutic dan perbeklan kesehatan rumah tangga	Terbatas
					4. Laporan tindak lanjut hasil inspeksi	Arsip yang berkaitan dengan laporan tindak lanjut hasil inspeksi sarana distribusi produk terapeutic dan perbeklan kesehatan rumah tangga	Terbatas
					b. Sertifikasi sarana distribusi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi sarana distribusi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumaah tangga yang meliputi ijin pedagang besar farmasi dari menkes/dinkes provinsi, keterangan importasi bahan baku obat-obat impor, SAS (Special Access Scheme) dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi serta sertifikat cara distribusi obat yang baik	Terbatas
					c. Penanggulangan produk ilegal		

					1. Surat edaran produk ilegal	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan produk ilegal yaitu surat edaran produk ilegal	Terbatas
					2. Laporan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) seluruh Indonesia	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan produk ilegal yaitu laporan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) seluruh Indonesia	Terbatas
					3. Laporan hasil pengujian produk ilegal dan PPOMN hasil lunder cover buy	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan produk ilegal yaitu laporan hasil pengujian produk ilegal dan PPOMN hasil lunder cover buy	Terbatas
					4. Laporan penarikan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) dan PBF/idnustri farmasi	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan produk ilegal yaitu laporan penarikan produk ilegal dari Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BB/BPOM) dan PBF/idnustri farmasi	Terbatas

					5. Laporan kasus	Arsip yang berkaitan dengan penanggulangan produk ilegal yaitu laporan kasus	Terbatas
					2. Pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan promosi dan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi Pengawasan promosi produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pengawasan penandaan produk terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Terbatas
					3. Surveilans dan analisis risiko produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Arsip yang berkaitan dengan surveilans dan analisis risiko produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang meliputi surveilans produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta analisis risiko produksi terapeutic dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Terbatas
KS.32.04			V		E. Pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif		
					1. Inspeksi narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP)	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi narkotika, psikotropika dan prekursor yang meliputi laporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan NPP, proceeding hasil pengawasan	Terbatas

				2.	Pengaturan dan sertifikasi NPP	Arsip yang berkaitan dengan pengaturan dan sertifikasi NPP yang meliputi sertifikat analisa hasil pengawasan NPP dan surat persetujuan impor/ekspor dari kementerian kesehatan	Terbatas
				3.	Pengawasan produk tembakau (rokok)	Arsip yang berkaitan dengan pengawasan produk tembakau (rokok) yang meliputi hasil pengawasan iklan dan promosi rokok, hasil pengawasan produk rokok serta proceeding hasil pengawasan rokok	Terbatas
KS.33		V		3.	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN		
KS.33.00			V	A.	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik		
				1.	Persetujuan pendaftaran baru dan variasi obat tradisional dan suplemen kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan pendaftaran baru dan variasi OT dan suplemen kesehatan	Terbatas
				2.	Persetujuan pendaftaran ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan	Arsip yang berkaitan dengan persetujuan pendaftaran ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan	Terbatas

					3.	Notifikasi kosmetika	Arsip yang berkaitan dengan notifikasi kosmetika	Terbatas
					4.	Master of control document (pencatatan nomor ijin edar (NIE)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan master of control document (pencatatan nomor ijin edar (NIE)	Terbatas
					5.	Obat tradisional dan kosmetik bermasalah	Arsip yang berkaitan dengan obat tradisional dan kosmetik bermasalah yang meliputi pembatalan dan pengembalian nomor ijin edar, pencatatan dan pengembalian berkas di loket serta hasil audit sarana	Terbatas
					6.	Survelan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Arsip yang berkaitan dengan surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang meliputi surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik, surveilan keamanan kosmetik serta riwayat perusahaan pendaftar obat tradisional dan suplemen kesehatan	Terbatas

					7.	Survelan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik	Arsip yang berkaitan dengan surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik yang meliputi surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan surveilan keamanan kosmetik	Terbatas
KS.33.01			V		B.	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		
					1.	Standardisasi obat tradisional dan suplemen makanan		
					a.	Peraturan pedoman dan standar	Arsip yang berkaitan dengan peraturan, pedoman dan standarisasi obat tradisional dan suplemen makanan	Terbatas
					b.	Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Arsip yang berkaitan dengan rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Terbatas

					c. Hasil kajian/notulen/laporan	Arsip yang berkaitan dengan hasil kajian/notulen/laporan terkait standarisasi obat tradisional dan suplemen makanan	Terbatas
					d. Sosialisasi dan pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang meliputi laporan hasil pelatihan dan berkas yang berhubungan dengan kegiatan	Terbatas
					e. Protokol dan dokumen uji klinik	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan protokol dan dokumen uji klinik	Terbatas
				2.	Standardisasi kosmetik		
					a. Peraturan pedoman dan standar	Arsip yang berkaitan dengan peraturan, pedoman dan standarisasi kosmetik	Terbatas

					b. Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Arsip yang berkaitan dengan rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Terbatas
					c. Hasil kajian/notulen/laporan	Arsip yang berkaitan dengan hasil kajian/notulen/laporan terkait standarisasi kosmetik	Terbatas
					d. Sosialisasi dan pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang meliputi laporan hasil pelatihan dan berkas yang berhubungan dengan kegiatan	Terbatas
					e. Protokol dan dokumen uji klinik	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan protokol dan dokumen uji klinik	Terbatas
				3.	Standardisasi sarana produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan		

					a. Peraturan pedoman dan standar	Arsip yang berkaitan dengan peraturan, pedoman dan standarisasi sarana produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan	Terbatas
					b. Rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Arsip yang berkaitan dengan rancangan peraturan/pedoman/standarisasi termasuk hasil kajian dan rekomendasi pakar	Terbatas
					c. Hasil kajian/notulen/laporan	Arsip yang berkaitan dengan hasil kajian/notulen/laporan terkait sarana produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan	Terbatas
					d. Sosialisasi dan pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang meliputi laporan hasil pelatihan dan berkas yang berhubungan dengan kegiatan	Terbatas

					e. Protokol dan dokumen uji klinik	Arsip yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan protokol dan dokumen uji klinik	Terbatas
KS.33.02			V		C. Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen		
					1. Inspeksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen yang meliputi rekapitulasi laporan bulanan hasil pemeriksaan balai/balai besar Pengawas Obat dan Makanan (POM), laporan hasil inspeksi serta laporan tindak lanjut inspeksi	Terbatas
					2. Sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen yang meliputi sertifikai kosmetik dan suplemen makanan, sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dan sertifikasi obat tradisional	Terbatas
KS.33.03			V		D. Obat Asli Indonesia		

				1.	Hasil pengembangan obat asli Indonesia (OAI) baik media cetak maupun media elektronik	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan hasil pengembangan obat asli Indonesia (OAI) baik yang dipublikasikan melalui media cetak atau media eletronik	Terbatas
				2.	Kajian pengembangan obat asli Indonesia (OAI)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kajian pengembangan obat asli Indonesia	Terbatas
				3.	Sosialisasi dan diseminasi pengembangan obat asli Indonesia (OAI)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pengembangan obat asli Indonesia (OAI)	Terbatas
KS.34		V		4.	PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA		
KS.34.00		V		A.	Penilaian keamanan pangan		
				1.	Persetujuan pendaftaran pangan olahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan pendaftaran pangan olahan	Terbatas

				2.	Pencabutan pendaftaran pangan olahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencabutan pendaftaran pangan olahan	Terbatas
				3.	Master of control document (pencatatan nomor izin edar (NIE)	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan master of control document (pencatatan nomor izin edar)	Terbatas
				4.	Variasi pendaftaran pangan olahan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan variasi pendaftaran pangan olahan	Terbatas
KS.34.01		V		B.	Standardisasi produk pangan	Arsip yang berkaitan dengan standardisasi produk pangan yang meliputi standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan, standardisasi pangan khusus, dan standardisasi pangan olahan	Terbatas
KS.34.02		V		C.	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan		

				1.	Laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu laporan hasil pemeriksaan sarana produksi distribusi	Terbatas
				2.	Laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk pangan, label pangan dan iklan	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu laporan hasil pemeriksaan/pengujian produk pangan, label pangan dan iklan	Terbatas
				3.	Tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK)	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu tindak lanjut produk tidak memenuhi ketentuan (TMK)	Terbatas
				4.	Kasus khusus terkait produk pangan	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu kasus khusus terkait produk pangan	Terbatas

					5.	Laporan hasil audit verifikasi sarana produksi	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu laporan hasil audit verifikasi sarana produksi	Terbatas
					6.	Surat persetujuan pencantuman label halal	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu surat persetujuan pencantuman label halal	Terbatas
					7.	Surat keterangan ekspor/impor	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu Surat keterangan ekspor/impor	Terbatas
					8.	Sertifikasi hygiene sanitasi	Arsip yang berkaitan dengan inspeksi dan sertifikasi produk pangan yaitu Sertifikasi hygiene sanitasi	Terbatas

KS.34.03			V		D.	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Arsip yang berkaitan dengan surveilans dan penyuluhan keamanan pangan yang meliputi surveilans dan penanggulangan keamanan pangan, promosi keamanan pangan dan penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga	Terbatas
KS.34.04			V		E.	Pengawasan produk dan bahan berbahaya		
						1. Standardisasi produk dan bahan berbahaya	Arsip yang berkaitan dengan standardisasi produk dan bahan berbahaya meliputi standardisasi bahan berbahaya kimia dan non kimia serta penilaian risiko produk dan bahan berbahaya	Terbatas
						2. Pengamanan produk dan bahan berbahaya	Arsip yang berkaitan dengan pengamanan produk dan bahan berbahaya meliputi listing dan penandaan produk dan bahan berbahaya serta surveilans produk dan bahan berbahaya	Terbatas
						3. Penyuluhan bahan berbahaya	Arsip yang berkaitan dengan penyuluhan bahan berbahaya yang meliputi kegiatan penyuluhan institusi dan masyarakat serta desiminasi informasi	Terbatas

VIS PEMERINTAHAN DAERAH
S ARSIP
IN

STEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				MASUKAN DARI DAERAH
HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
6	7	8	9	10
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal, dan eksternal, serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	
<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit pengolah terkait</p>	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	

Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Pengguna Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh pihak tidak merugikan siapapun	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

IF				
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	
Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait	

**RANCANGAN T
SISTEM KEAMANAN
URUSAN KETENAGAKERJA**

KLASIFIKASI						
KODE KLASIFIK ASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP		URAIAN
1	2		3			4
KT	V			KETENAGAKERJAAN		
KT.00		V		Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.		
KT.00.00			V	1.	Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Arsip terkait dengan pengakajian dan pengusulan kebijakan
KT.00.01			V	2.	Penyiapan kebijakan	Arsip terkait dengan pengakajian dan penyiapan kebijakan
KT.00.02			V	3.	Perumusan Kebijakan	Arsip terkait dengan perumusan kebijakan
KT.00.03			V	4.	Masukan dan dukungan kebijakan	Arsip terkait masukan dan dukungan kebijakan

KT.00.04			V		5. Penetapan NSPK	Arsip terkait penetapan NSPK
				PERENCANAAN TENAGA KERJA		
KT.01			V	1.	Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Arsip terkait perencanaan tenaga kerja nasional dan tenaga kerja daerah
KT.01.00			V	a.	Perencanaan Tenaga Kerja Nasional	Arsip terkait perencanaan tenaga kerja nasional
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional	
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
KT.01.01			V	b.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Arsip terkait perencanaan tenaga kerja daerah
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
KT.02			V	2	Perencanaan Tenaga Kerja Mikro	Arsip terkait perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah dan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta
KT.02.00			V	a.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan	Arsip terkait perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	

					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah	
KT.02.01			V		b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Arsip terkait perencanaan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta	
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	
				PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS		
KT.03			V		1. Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	
KT.03.00			V		a. Pengembangan Standarisasi Kompetensi	Arsip terkait dengan pengembangan standarisasi kompetensi, bina lembaga dan sarana pelatihan kerja, bina instruktur dan tenaga pelatihan, bina pemagangan dan produktivitas dan kewirausahaan
					1) Penerapan Standar Kompetensi	
					2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi	
KT.03.01			V		3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan	Arsip terkait dengan pelatihan ketenagakerjaan
					- Program Pelatihan Ketenagakerjaan	
					- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	
KT.03.02			V		4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Arsip terkait dengan Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan

					- Program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan	
					- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	
KT.03.03			V		5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Arsip terkait dengan Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
					- Program Pelatihan Ketransmigrasian	
					- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian	
KT.04		V			b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	Arsip terkait dengan Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
KT.04.00			V		1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Arsip terkait dengan Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
					- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
					- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan	
KT.04.01			V		2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Arsip terkait dengan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
					- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	
					- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas	
KT.04.02			V		3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Arsip terkait dengan Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
					- Standar Mutu Lembaga Pelatihan	
					- Bimbingan Penerapan Standar Mutu	

KT.04.03			V		4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Arsip terkait dengan Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
					- Sistem Pendanaan Pelatihan	
					- Kerjasama Antar Lembaga	
KT.05		V			c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	Arsip terkait dengan Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
KT.05.00			V		1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Arsip terkait dengan Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
					- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
					- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	
KT.05.01			V		2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Arsip terkait dengan Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
					- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	
					- Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	
KT.05.02			V		3) Tenaga Pelatihan	Arsip terkait dengan Tenaga Pelatihan
					- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan	
					- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan	

KT.05.03			V		4)	4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Arsip terkait dengan Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
						- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	
						- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	
KT.06		V			d.	Bina Pemagangan	Arsip terkait dengan Bina Pemagangan
KT.06.00			V			1) Pemagangan Dalam Negeri	Arsip terkait dengan Pemagangan Dalam Negeri
						- Program Pemagangan Dalam Negeri	
						- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri	
KT.06.01			V			2) Pemagangan Luar Negeri	Arsip terkait dengan Pemagangan Luar Negeri
						- Program Pemagangan Luar Negeri	
						- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri	
KT.06.02			V			3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Arsip terkait dengan Perizinan dan Advokasi Pemagangan
						- Perizinan dan Rekomendasi	
						- Advokasi dan Perlindungan	
KT.06.03			V			4) Promosi dan Jenjang Pemagangan	Arsip terkait dengan Promosi dan Jenjang Pemagangan

					- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan	
					- Pemagangan Jejaring Pemagangan	
KT.07		V		e.	Produktivitas dan Kewirausahaan	Arsip terkait dengan Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.07.00			V		1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Arsip terkait dengan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
					- Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan	
					- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan	
KT.07.01			V	2)	2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Arsip terkait dengan Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
					- Sistem dan Metode Produktivitas	
					- Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas	
KT.07.02			V	3)	3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Arsip terkait dengan Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
					- Pengukuran Produktivitas	
					- Kajian Produktivitas	
KT.07.03			V	4)	4) Pengembangan Kewirausahaan	Arsip terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan
					- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	
					- Bimbingan Konsultasi	

				PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		
KT.08		V		1.	Pengembangan Pasar Kerja	Arsip terkait informasi pasar kerja,
KT.08.00			V	a.	Informasi Pasar Kerja	Arsip terkait informasi pasar kerja
					1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri	
					2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri	
KT.08.01			V	b.	Analisis Pasar Kerja	Arsip terkait analisa pasar kerja
					1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri	
					2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri	
KT.08.02			V	c.	Bursa Kerja	Arsip terkait bursa kerja
					1) Bursa Kerja Dalam Negeri	
					2) Bursa Kerja Luar Negeri	
KT.08.03			V	d.	Analisis Jabatan	Arsip terkait analisis jabatan
					1) Analisis dan Informasi Jabatan	
					2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan	
KT.09		V		2.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Arsip terkait antar kerja, penempatan tenaga kerja khusus, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan pemberdayaan pengantar kerja

KT.09.00			V		a. Antar Kerja	Arsip terkait antar kerja
					1) Penempatan Tenaga Kerja Antar	
					2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja	
KT.09.01			V		b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus	Arsip terkait penempatan tenaga kerja khusus
					1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita	
					2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia	
KT.09.02			V		c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Arsip terkait penyuluhan dan bimbingan jabatan
					1) Penyuluhan Jabatan	
					2) Bimbingan Jabatan	
KT.09.03			V		d. Pemberdayaan Pengantar Kerja	Arsip terkait pemberdayaan pengantar kerja
					1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja	
					2) Kerjasama antar Lembaga	
KT.10		V		3.	Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Arsip terkait kelembagaan penempatan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan TKI, kerjasama internasional

KT.10.00			V		a. Kelembagaan Penempatan	Arsip terkait kelembagaan penempatan
					1) 1) Perizinan Kelembagaan	
					2) 2) Evaluasi Kinerja	
KT.10.01			V		b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Arsip terkait penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
					1) 1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI	
					2) 2) Fasilitasi Penyediaan TKI	
KT.10.02			V		c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	Arsip terkait perlindungan TKI
					1) 1) Advokasi dan Kepulangan	
					2) 2) Sarana dan Perlindungan	
KT.10.03			V		d. Kerjasama Internasional	Arsip terkait kerjasama internasional
					1) 1) Kerjasama Bilateral	
					2) 2) Kerjasama Regional dan Multilateral	

KT.11		V		4.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal	Arsip terkait tenaga kerja mandiri dan sektoral informal, pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antarlembaga
KT.11.00		V		a.	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Inf	Arsip terkait tenaga kerja mandiri dan sektoral informal
				1)	1) Tenaga Kerja Mandiri	
				2)	2) Tenaga Kerja Sektor Informal	
KT.11.01		V		b.	Pengembangan Padat Karya	Arsip terkait terapan teknologi tepat guna
				1)	1) Padat Karya Perdesaan	
				2)	2) Padat Karya Perkotaan	
KT.11.02		V		c.	Terapan Teknologi Tepat Guna	Arsip terkait terapan teknologi tepat guna,
				1)	1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna	
				2)	2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna	
KT.11.03		V		d.	Pemberdayaan Pendampingan dan Ke	Arsip terkait pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antarlembaga
				1)	1) Pemberdayaan Pendampingan	
				2)	2) Kerjasama Antar Lembaga	

KT.12		V		5.	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Naskah naskah terkait analisis dan perizinan sektor industri, analisi dan perizinan sektor jasa, pengendalian dan kerjasama kelembagaan
KT.12.00			V	a.	Analisis dan Perizinan Sektor Industri	Naskah naskah terkait analisis dan perizinan sektor industri
				1)	1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	
				2)	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri	
KT.12.01			V	b.	Analisis dan Perizinan Sektor Jasa	Naskah naskah terkait analisi dan perizinan sektor jasa
				1)	1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	
				2)	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa	
KT.12.02			V	c.	Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan	Naskah naskah terkait pengendalian dan kerjasama kelembagaan
				1)	1) Pengendalian	
				2)	2) Kerjasama Kelembagaan	
KT.13		V		6.	Standardisasi Profesi	Arsip terkait standardisasi profesi dan pembakuan akreditasi
KT.13.00			V	a.	Sistem Informasi dan Registrasi	Arsip terkait standardisasi profesi

				1)	1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi	
				2)	2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja	
KT.13.01			V	b.	Pembakuan Akreditasi	Arsip terkait pembakuan akreditasi
				1)	1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi	
				2)	2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan	
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA						
KT.14			V	1.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Naskah naskah terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama bersama, perjanjian kerja, kesejahteraan pekerja, analisis diskriminasi syarat kerja
KT.14.00			V	a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama	Naskah naskah terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama bersama
					1) Peraturan Perusahaan	
					2) Perjanjian Kerja Bersama	
KT.14.01			V	b.	Perjanjian Kerja	Naskah naskah terkait perjanjian kerja

KT.14.02			V		c. Kesejahteraan Pekerja	Naskah naskah terkait kesejahteraan pekerja
					1) Program Kesejahteraan	
					2) Fasilitas Kesejahteraan	
KT.14.03			V		d. Analisis Diskriminasi Syarat Kerja	Naskah naskah terkait analisis diskriminasi syarat kerja
					1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja	
					2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja	
KT.15			V	2.	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	Naskah naskah terkait organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, pemasarakatan hubungan industrial
KT.15.00				a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha	Naskah naskah terkait organisasi pekerja dan pengusaha
					1) Organisasi Pekerja	
					2) Organisasi Pengusaha	
KT.15.01			V	b.	Kelembagaan Hubungan Industrial	Naskah naskah kelembagaan hubungan industrial
					1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT	
					2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT	

KT.15.02			V		c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial	Naskah naskah terkait pemasyarakatan hubungan industrial
					1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial	
					2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial	
KT.16			V	3.	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arsip terkait dengan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja
KT.16.00			V	a.	Pengupahan	Arsip terkait dengan pengupahan
					1) Penerapan Standar Pengupahan	
					2) Pengurusan Pengupahan	
KT.16.01			V	b.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja	Arsip terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja
					1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	
					2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	
KT.17			V	4.	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	Arsip terkait pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
KT.17.00			V	a.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Arsip terkait pencegahan perselisihan hubungan industrial
					1) Pencegahan Dini	
					2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan	

KT.17.01			V	b.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perse	Arsip terkait penyelenggaraan
					1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial	
					2) Evaluasi dan Pelaporan	
KT.17.02			V	c.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Arsip terkait pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
					1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial	
					2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	
		V		PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Arsip terkait pembinaan pengawasan tenaga kerja
KT.18			V	1.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Arsip terkait pengawasan norma kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan
KT.18.00				a.	Pengawasan Norma Kerja	Arsip terkait pengawasan norma kerja
					1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat	
					2) Pengawasan Norma Pengupahan	

KT.18.01			V		b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat	Arsip terkait pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat
					1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja	
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat	
KT.18.02			V		c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja	Arsip terkait pengawasan norma penempatan dan latihan tenaga kerja
					1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
					2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	
					3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek	
KT.19			V	2.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	Arsip terkait pengawasan norma kerja perempuan, pengawasan norma kerja anak, kerjasama lintas sektoral dan advokasi tenaga kerja anak
KT.19.00			V	a.	Pengawasan Norma Kerja Perempuan	Arsip terkait pengawasan norma kerja perempuan
					1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi	
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	

KT.19.01			V		b. Pengawasan Norma Kerja Anak	Arsip terkait pengawasan norma kerja anak
					1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak	
KT.19.02			V		c. Kerjasama Lintas Sektoral	Arsip terkait kerjasama lintas sektoral dan advokasi tenaga kerja anak
					1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan	
					2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak	
KT.19.03			V		d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak	
					1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan	
					2) Advokasi Tenaga Kerja Anak	

KT.20		V		3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Arsip terkait pengawasan norma mekanik, mesin uap dan bejana tekan, pengawasan norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, pengawasan norma kesehatan kerja, pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya, dan pengawasan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen K3
KT.20.00		V		a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Arsip terkait pengawasan norma mekanik, mesin uap dan bejana tekan
				1) Pengawasan Norma Mekanik	
				2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan	
KT.20.01		V		b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	Arsip terkait pengawasan norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran
				1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan	
				2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran	
KT.20.02		V		c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja	Arsip terkait pengawasan norma kesehatan kerja

					1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja	
					2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja	
KT.20.03			V		d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya	Arsip terkait pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya
					1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja	
					2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya	
KT.20.04			V		e. Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3	Arsip terkait pengawasan norma kelembagaan
					1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3	
					2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3	
KT.21		V			4. Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	Arsip terkait laporan hasil pengawasan ketenagakerjaan

KT.22			V	5.	Bina Penegakan Hukum	Arsip terkait pemeriksaan norma ketenagakerjaan, penyidikan norma ketenagakerjaan, pengembangan penyidikan pegawai negeri sipil dan kerjasama penegakan hukum
KT.22.00			V	a.	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	Arsip terkait pemeriksaan norma ketenagakerjaan
					1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	
					2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan	
KT.22.01			V	b.	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	Arsip terkait penyidikan norma ketenagakerjaan
					1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	
					2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	
KT.22.02			V	c.	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Arsip terkait pengembangan penyidikan pegawai negeri sipil
					1) Pemberdayaan PPNS	
					2) Sarana dan Prasarana PPNS	

KT.22.03			V	d.	Kerjasama Penegakan Hukum	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penegakan hukum, meliputi : kerjasama lembaga penegak hukum dan kerjasama pemeriksaan dan penyidikan
					1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum	
					2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan	
				KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA		
KT.23			V	1.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Arsip terkait pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan SDM dan Kompetensi K3
				a.	Pengkajian K3	
KT.23.00			V		1) Analisis dan Standardisasi bidang K3	Arsip terkait Analisis dan Standardisasi bidang K3
KT.23.01			V		2) Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	Arsip terkait Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3

KT.23.02			V		3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
KT.23.03			V	b.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
KT.24		V		2.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
				a.	SDM K3	
KT.24.00			V		1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.01			V		2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

				b.	Kompetensi K3	
KT.24.02			V		1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.03			V		2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.04			V		3) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.05			V		4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
TR					TRANSMIGRASI	

**ELAHAH AWAL
DAN AKSES ARSIP
AN DAN TRANSMIGRASI**

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DARI DAERAH
KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
4	5	6	11	12	13
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal		Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

	internal dan Eksternal		perseorangan, lembaga dan negara.		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka		Tidak memiliki dampak	Unit Pengolah Terkait	

	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka				Unit Pengolah Terkait	

	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolahan	
				Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah	
				Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolahan	
				Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah	
				Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka				Unit Pengolah Terkait	

	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Terbatas	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

	Internal dan Eksternal					
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait		

Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait			
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait			
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait			
Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait			

KLASIFIKASI

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP
1	2			3

KT	V			KETENAGAKERJAAN
KT.00		V		Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
KT.00.00			V	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan
KT.00.01			V	2. Penyiapan kebijakan
KT.00.02			V	3. Perumusan Kebijakan
KT.00.03			V	4. Masukan dan dukungan kebijakan

KT.00.04			V	5.	Penetapan NSPK
				PERENCANAAN TENAGA KERJA	
KT.01		V		1.	Perencanaan Tenaga Kerja Makro
KT.01.00			V	a.	Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
KT.01.01			V	b.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
KT.02		V		2	Perencanaan Tenaga Kerja Mikro
KT.02.00			V	a.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaa
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah

					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
KT.02.01			V	b.	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
					1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta
					2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
					3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
				PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITA	
KT.03			V	1.	Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan
KT.03.00			V	a.	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
					1) Penerapan Standar Kompetensi
					2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi
KT.03.01			V		3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
					- Program Pelatihan Ketenagakerjaan
					- Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan
KT.03.02			V		4) Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan

					- Program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan
					- Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.03.03			V		5) Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
					- Program Pelatihan Ketransmigrasian
					- Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian
KT.04		V			b. Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
KT.04.00			V		1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
					- Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
					- Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan
KT.04.01			V		2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
					- Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
					- Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas
KT.04.02			V		3) Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
					- Standar Mutu Lembaga Pelatihan
					- Bimbingan Penerapan Standar Mutu

KT.04.03			V		4) Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
					- Sistem Pendanaan Pelatihan
					- Kerjasama Antar Lembaga
KT.05		V			c. Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
KT.05.00			V		1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
					- Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
					- Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
KT.05.01			V		2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
					- Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
					- Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
KT.05.02			V		3) Tenaga Pelatihan
					- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan
					- Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan

KT.05.03			V		4)	4) Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
						- Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
						- Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
KT.06		V			d.	Bina Pemagangan
KT.06.00			V			1) Pemagangan Dalam Negeri
						- Program Pemagangan Dalam Negeri
						- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri
KT.06.01			V			2) Pemagangan Luar Negeri
						- Program Pemagangan Luar Negeri
						- Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri
KT.06.02			V			3) Perizinan dan Advokasi Pemagangan
						- Perizinan dan Rekomendasi
						- Advokasi dan Perlindungan
KT.06.03			V			4) Promosi dan Jenjang Pemagangan

					- Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan
					- Pemagangan Jejaring Pemagangan
KT.07		V			e. Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.07.00			V		1) Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
					- Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan
					- Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan
KT.07.01			V	2)	2) Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
					- Sistem dan Metode Produktivitas
					- Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas
KT.07.02			V	3)	3) Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
					- Pengukuran Produktivitas
					- Kajian Produktivitas
KT.07.03			V	4)	4) Pengembangan Kewirausahaan
					- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan
					- Bimbingan Konsultasi

				PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
KT.08		V		1.	Pengembangan Pasar Kerja
KT.08.00			V	a.	Informasi Pasar Kerja
					1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri
					2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri
KT.08.01			V	b.	Analisis Pasar Kerja
					1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri
					2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri
KT.08.02			V	c.	Bursa Kerja
					1) Bursa Kerja Dalam Negeri
					2) Bursa Kerja Luar Negeri
KT.08.03			V	d.	Analisis Jabatan
					1) Analisis dan Informasi Jabatan
					2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan
KT.09		V		2.	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

KT.09.00			V		a. Antar Kerja
					1) Penempatan Tenaga Kerja Antar
					2) Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja
KT.09.01			V		b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus
					1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita
					2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia
KT.09.02			V		c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
					1) Penyuluhan Jabatan
					2) Bimbingan Jabatan
KT.09.03			V		d. Pemberdayaan Pengantar Kerja
					1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja
					2) Kerjasama antar Lembaga
KT.10		V			3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

KT.10.00			V		a. Kelembagaan Penempatan
				1)	1) Perizinan Kelembagaan
				2)	2) Evaluasi Kinerja
KT.10.01			V		b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
				1)	1) Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI
				2)	2) Fasilitasi Penyediaan TKI
KT.10.02			V		c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
				1)	1) Advokasi dan Kepulangan
				2)	2) Sarana dan Perlindungan
KT.10.03			V		d. Kerjasama Internasional
				1)	1) Kerjasama Bilateral
				2)	2) Kerjasama Regional dan Multilateral

KT.11		V		4. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
KT.11.00		V		a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
				1) 1) Tenaga Kerja Mandiri
				2) 2) Tenaga Kerja Sektor Informal
KT.11.01		V		b. Pengembangan Padat Karya
				1) 1) Padat Karya Perdesaan
				2) 2) Padat Karya Perkotaan
KT.11.02		V		c. Terapan Teknologi Tepat Guna
				1) 1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna
				2) 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna
KT.11.03		V		d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama
				1) Pemberdayaan Pendampingan
				2) Kerjasama Antar Lembaga

KT.12		V		5.	Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
KT.12.00			V	a.	Analisis dan Perizinan Sektor Industri
				1)	1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri
				2)	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri
KT.12.01			V	b.	Analisis dan Perizinan Sektor Jasa
				1)	1) Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa
				2)	2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa
KT.12.02			V	c.	Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan
				1)	1) Pengendalian
				2)	2) Kerjasama Kelembagaan
KT.13		V		6.	Standardisasi Profesi
KT.13.00			V	a.	Sistem Informasi dan Registrasi

				1)	1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi
				2)	2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja
KT.13.01			V	b.	Pembakuan Akreditasi
				1)	1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi
				2)	2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan
				PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JA	
KT.14		V		1.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
KT.14.00			V	a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
					1) Peraturan Perusahaan
					2) Perjanjian Kerja Bersama
KT.14.01			V	b.	Perjanjian Kerja

KT.14.02			V	c.	Kesejahteraan Pekerja
					1) Program Kesejahteraan
					2) Fasilitas Kesejahteraan
KT.14.03			V	d.	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
					1) Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja
					2) Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja
KT.15			V	2.	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial
KT.15.00				a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
					1) Organisasi Pekerja
					2) Organisasi Pengusaha
KT.15.01			V	b.	Kelembagaan Hubungan Industrial
					1) Lembaga Kerjasama BIPARTIT
					2) Lembaga Kerjasama TRIPARTIT

KT.15.02			V		c. Pemasyarakatan Hubungan Industrial
					1) Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
					2) Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial
KT.16		V			3. Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
KT.16.00			V		a. Pengupahan
					1) Penerapan Standar Pengupahan
					2) Pengurusan Pengupahan
KT.16.01			V		b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
					1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
					2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja
KT.17		V			4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
KT.17.00			V		a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
					1) Pencegahan Dini
					2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan

KT.17.01			V	b.	Penyelenggaraan Penyelesaian Perse
					1) Pengurusan Perselisihan Hubungan
					2) Evaluasi dan Pelaporan
KT.17.02			V	c.	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
					1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial
					2) Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan
		V		PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
KT.18			V	1.	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KT.18.00				a.	Pengawasan Norma Kerja
					1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat
					2) Pengawasan Norma Pengupahan

KT.18.01			V		b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
					1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat
KT.18.02			V		c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
					1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri
					2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri
					3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek
KT.19			V		2. Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
KT.19.00			V		a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan
					1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

KT.19.01			V		b. Pengawasan Norma Kerja Anak
					1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
					2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak
KT.19.02			V		c. Kerjasama Lintas Sektoral
					1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan
					2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak
KT.19.03			V		d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
					1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan
					2) Advokasi Tenaga Kerja Anak

KT.20		V		3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KT.20.00		V		a. Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
				1) Pengawasan Norma Mekanik
				2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan
KT.20.01		V		b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
				1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan
				2) Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
KT.20.02		V		c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

					1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja
					2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja
KT.20.03			V	d.	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
					1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja
					2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya
KT.20.04			V	e.	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
					1) Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3
					2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3
KT.21		V		4.	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan

KT.22			V	5.	Bina Penegakan Hukum
KT.22.00			V	a.	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
					1) Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
					2) Penindakan Norma Ketenagakerjaan
KT.22.01			V	b.	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
					1) Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
					2) Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
KT.22.02			V	c.	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
					1) Pemberdayaan PPNS
					2) Sarana dan Prasarana PPNS

KT.22.03			V	d.	Kerjasama Penegakan Hukum
					1) Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum
					2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan
					KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KT.23			V	1.	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
				a.	Pengkajian K3
KT.23.00			V		1) Analisis dan Standardisasi bidang K3
KT.23.01			V		2) Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3

KT.23.02			V		3) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
KT.23.03			V	b.	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
KT.24		V		2.	Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
				a.	SDM K3
KT.24.00			V		1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.01			V		2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

				b.	Kompetensi K3
KT.24.02			V		1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.03			V		2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.04			V		3) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
KT.24.05			V		4) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
TR				TRANSMIGRASI	

**RANCANGAN TELAAH AWAL
SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**

SISTEM KEAMANAN DAN			
URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK
4	4	5	6
	Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan pengakajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan pengakajian dan penyiapan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan	Terbuka
Arsip terkait masukan dan dukungan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait penetapan NSPK			
	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait perencanaan tenaga kerja nasional dan tenaga kerja daerah			
Arsip terkait perencanaan tenaga kerja nasional			
	Biasa/Terbuka		
		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait perencanaan tenaga kerja daerah	Biasa/Terbuka		
		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	
Arsip terkait perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah dan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta			
Arsip terkait perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah	Biasa/Terbuka		
		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

		Internal dan Eksternal	
Arsip terkait perencanaan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
S			
Arsip terkait dengan pengembangan standarisasi kompetensi, bina lembaga dan sarana pelatihan kerja, bina instruktur dan tenaga pelatihan, bina pemagangan dan produktivitas dan kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan pelatihan ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka	

		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja			
Arsip terkait dengan Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait dengan Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan			
Arsip terkait dengan Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Tenaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait dengan Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Bina Pemagangan			
Arsip terkait dengan Pemagangan Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pemagangan Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Perizinan dan Advokasi Pemagangan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Promosi dan Jenjang Pemagangan	Biasa/Terbuka		

		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Produktivitas dan Kewirausahaan			
Arsip terkait dengan Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan Pengembangan Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait informasi pasar kerja,			
Arsip terkait informasi pasar kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait analisa pasar kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait bursa kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait analisis jabatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait antar kerja, penempatan tenaga kerja khusus, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan pemberdayaan pengantar kerja			

Arsip terkait antar kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait penempatan tenaga kerja khusus	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait penyuluhan dan bimbingan jabatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pemberdayaan pengantar kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait kelembagaan penempatan, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perlindungan TKI, kerjasama internasional			

Arsip terkait kelembagaan penempatan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait perlindungan TKI	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait kerjasama internasional	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait tenaga kerja mandiri dan sektoral informal, pengembangan padat karya, terapan teknologi tepat guna, pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antarlembaga			
Arsip terkait tenaga kerja mandiri dan sektoral informal	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait terapan teknologi tepat guna	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait terapan teknologi tepat guna,	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pemberdayaan pendampingan dan kerjasama antarlembaga	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Naskah naskah terkait analisis dan perizinan sektor industri, analisi dan perizinan sektor jasa, pengendalian dan kerjasama kelembagaan			
Naskah naskah terkait analisis dan perizinan sektor industri	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah terkait analisi dan perizinan sektor jasa	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah terkait pengendalian dan kerjasama kelembagaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait standardisasi profesi dan pembakuan akreditasi			
Arsip terkait standardisasi profesi	Biasa/Terbuka		

		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pembakuan akreditasi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
AMINAN SOSIAL TENAGA KERJA			
Naskah naskah terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama bersama, perjanjian kerja, kesejahteraan pekerja, analisis diskriminasi syarat kerja			
Naskah naskah terkait peraturan perusahaan dan perjanjian kerjasama bersama	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah terkait perjanjian kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Naskah naskah terkait kesejahteraan pekerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah terkait analisis diskriminasi syarat kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah terkait organisasi pekerja dan pengusaha, kelembagaan hubungan industrial, pemasyarakatan hubungan industrial			
Naskah naskah terkait organisasi pekerja dan pengusaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Naskah naskah kelembagaan hubungan industrial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Naskah naskah terkait pemasyarakatan hubungan industrial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja			
Arsip terkait dengan pengupahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pencegahan perselisihan hubungan industrial, penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial			
Arsip terkait pencegahan perselisihan hubungan industrial	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait penyelenggaraan	Terbatas	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Industrial			
		Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Biasa/Terbuka		
Arsip terkait pembinaan pengawasan tenaga kerja			
Arsip terkait pengawasan norma kerja, pengawasan norma hubungan kerja dan			
Arsip terkait pengawasan norma kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait pengawasan norma hubungan kerja dan perlindungan berserikat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pengawasan norma penempatan dan latihan tenaga kerja	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pengawasan norma kerja perempuan, pengawasan norma kerja anak, kerjasama lintas sektoral dan advokasi tenaga kerja anak			
Arsip terkait pengawasan norma kerja perempuan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait pengawasan norma kerja anak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait kerjasama lintas sektoral dan advokasi tenaga kerja anak	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

<p>Arsip terkait pengawasan norma mekanik, mesin uap dan bejana tekan, pengawasan norma kontruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, pengawasan norma kesehatan kerja, pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya, dan pengawasan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen K3</p>			
<p>Arsip terkait pengawasan norma mekanik, mesin uap dan bejana tekan</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Terbuka untuk Internal dan Eksternal</p>	<p>Terbuka</p>
<p>Arsip terkait pengawasan norma kontruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Terbuka untuk Internal dan Eksternal</p>	<p>Terbuka</p>
<p>Arsip terkait pengawasan norma kesehatan kerja</p>	<p>Biasa/Terbuka</p>	<p>Terbuka untuk</p>	<p>Terbuka</p>

		Internal dan Eksternal	
Arsip terkait pengawasan norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pengawasan norma kelembag	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait laporan hasil pengawasan ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait pemeriksaan norma ketenagakerjaan, penyidikan norma ketenagakerjaan, pengembangan penyidikan pegawai negeri sipil dan kerjasama penegakan hukum			
Arsip terkait pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait penyidikan norma ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pengembangan penyidikan pegawai negeri sipil	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penegakan hukum, meliputi : kerjasama lembaga penegak hukum dan kerjasama pemeriksaan dan penyidikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait pengkajian dan bimbingan teknis pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Analisis dan Standardisasi bidang K3			
Arsip terkait Hasil kajian, perancangan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
Arsip terkaitPenyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3			
Arsip terkait Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka
Arsip terkait Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka

AKSES ARSIP DINAMIS		MASUKAN DARI DAERAH
DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
11	12	13
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

perseorangan, lembaga dan negara.		
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolahan Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolahan Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

	Unit Pengolah	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.		
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SISTEM KEAM**

URU

KLASIFIKASI							
KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN / ARSIP			URAIAN
PK				PERPUSTAKAAN			
PK.00		V		1. KEBIJAKAN PERPUSTAKAAN			Arsip yang berkaitan dengan Kebijakan Perpustakaan
PK.00.00			V	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			arsip terkait dengan proses pengkajian dan pengusulan draf kebijakan perpustakaan
PK.00.01			V	2. Penyiapan Kebijakan			arsip terkait dengan proses Penyiapan Kebijakan
PK.00.02			V	3. Perumusan dan Penyusunan Bahan			arsip terkait dengan proses perumusan kebijakan

PK.00.03		V	4. Masukan dan Dukungan Kebijakan	arsip terkait dengan Masukan dan Dukungan Kebijakan+N16:U16
PK.00.04		V	5. Penetapan dalam Bentuk NSPK	arsip terkait dengan Penetapan dalam Bentuk NSPK
			PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN	
PK.01		V	A. DEPOSITO BAHAN PUSTAKA	Arsip yang berkaitan dengan Deposito Bahan Pustaka
PK.01.00		V	1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	arsip terkait dengan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
PK.01.01		V	2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman	arsip terkait dengan Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
PK.01.02		V	3 Terbitan Internasional dan Regional	arsip terkait dengan Terbitan Internasional dan Regional
PK.01.03		V	4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	arsip terkait dengan Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

PK.01.04		V	5	Bibliografi dan Katalog	arsip terkait dengan Bibliografi dan Katalog
				a Bibliografi Daerah (BD)	daftar terbitan yang memuat judul-judul karya cetak/karya rekam yang terbit/dihasilkan oleh para penerbit/ pengusaha rekaman di suatu daerah/provinsi disusun berdasarkan no klas, pengarang atau judul dalam format secara tercetak maupun digital. Pencantuman deskripsi bibliografis secara lengkap sesuai dengan peraturan pengkatalogan ISBD (International Standard Bibliographic Description)
				b Katalog Induk Daerah (KID)	kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan hasil kerjasama dalam jaringan dari berbagai jenis perpustakaan yang berada di suatu daerah/provinsi yang disusun berdasarkan urutan pengarang atau judul, diterbitkan dalam format tercetak maupun digital. Deskripsi bibliografis tidak selengkap Bibliografi Daerah
				c. Katalog Dalam Terbitan (KDT)	sebuah deskripsi bibliografis yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional yang dihasilkan dari pengolahan data untuk dicantumkan pada halaman balik halaman judul sebagai kelengkapan penerbitan.

		B. PENGEMBANGAN KOLEKSI			
PK.02		V	1	Akuisisi	arsip terkait dengan akuisisi
PK.02.00		V	a.	Pembelian	Pembelian bahan perpustakaan dapat dilakukan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa
PK.02.01		V	b.	Hibah	Bahan perpustakaan hadiah dan hibah dari lembaga pemerintah/swasta atau perorangan kepada Perpustakaan Nasional dapat diterima apabila memenuhi ketentuan
PK.02.02		V	c.	Hadiah	Bahan perpustakaan hadiah dan hibah dari lembaga pemerintah/swasta atau perorangan kepada Perpustakaan Nasional dapat diterima apabila memenuhi ketentuan
PK.02.03		V	d	Tukar Menukar	Perpustakaan Nasional dapat melakukan tukar menukar bahan perpustakaan dengan perpustakaan lain baik dalam maupun luar negeri untuk pelaksanaan pengembangan koleksi. Tukar menukar bahan perpustakaan dilakukan dengan ketentuan
PK.02.04		V	e.	Implementasi Undang-Undang KCKR	Arsip terkait Implementasi Undang-Undang KCKR

PK.02.05		V	f	Terbitan Internal	Hasil terbitan dari berbagai unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional
PK.02.06		V	g	Pendistribusian bahan pustaka surplus	Arsip terkait pendistribusian bahan pustaka surplus
PK.02.07		V	h	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)	Arsip terkait kegiatan pencatatan data bahan perpustakaan yang diterima, baik dalam bentuk buku, majalah, bentuk mikro dan audio visual, dsb. ke dalam buku inventaris
PK.03		V	2	Pengolahan Bahan Pustaka	arsip terkait dengan Pengolahan Bahan Pustaka
PK.04		V	3	Pangkalan Data Katalog Koleksi	arsip terkait dengan Pangkalan Data Katalog Koleksi
PK.05		V	C. JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI		Arsip yang berkaitan dengan Jasa Perpustakaan dan Informasi
PK.05.00		V	1	Keanggotaan	arsip terkait dengan Keanggotaan

PK.05.01		V	2	Sirkulasi	arsip terkait dengan Sirkulasi
PK.05.02		V	3	Referensi	arsip terkait dengan Referensi
PK.05.03		V	4	Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian arsip daerah	arsip terkait dengan Alih aksara, Alih Bahasa dan Kajian arsip daerah
PK.06		V	5	Kerjasama Perpustakaan	arsip terkait dengan Kerjasama Perpustakaan
PK.06.00		V	a.	MoU	Dalam setiap kerjasama perlu adanya keputusan bersama (memory of understanding). Kemerdekaan tiap anggota jaringan untuk bertindak sendiri-sendiri memang sedikit berkurang. Namun, ini konsekuensi bergabung dalam sistem kemitraan. Yang perlu direncanakan secara rapi adalah mekanisme pengambilan keputusan bersama

PK.06.01		V	b.	Perjanjian kerjasama	Dalam setiap kerjasama perlu adanya keputusan bersama (memory of understanding). Kemerdekaan tiap anggota jaringan untuk bertindak sendiri-sendiri memang sedikit berkurang. Namun, ini konsekuensi bergabung dalam sistem kemitraan. Yang perlu direncanakan secara rapi adalah mekanisme pengambilan keputusan bersama
PK.06.02		V	c.	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional	Arsip terkait Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
PK.07		V	6	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	arsip terkait dengan Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
PK.07.00		V	a.	Pengembangan situs web	Arsip terkait pengembangan situs web
PK.07.01		V	b.	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia	Arsip terkait Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
PK.07.02		V	c.	Pengembangan program aplikasi perpustakaan	Arsip terkait Pengembangan program aplikasi perpustakaan

PK.07.03		V	d.	Pengembangan pangkalan data kepubstakaan digital	Arsip terkait Pengembangan pangkalan data kepubstakaan digital
PK.08		V	7	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	arsip terkait dengan Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
D. PRESERVASI BAHAN PUSTAKA					
PK.09		V	1	Konservasi	Arsip terkait dengan konservasi
PK.09.00		V	a.	Perawatan Bahan Perpustakaan	arsip terkait dengan perawatan, perbaikan dan penjilidan bahan perpustakaan
PK.09.01		V	b.	Perbaikan Bahan Perpustakaan	Arsip terkait perbaikan Bahan Perpustakaan
PK.09.02		V	c.	Penjilidan Bahan Perpustakaan	Arsip terkait Penjilidan Bahan Perpustakaan
PK.10		V	2	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	arsip terkait dengan Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)

PK.11		V	3	Transformasi Digital	arsip terkait dengan Transformasi Digital
PK.12		V	4	Kurasi Digital	arsip terkait dengan Kurasi Digital
			A. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN		
PK.13		V	1	Pengembangan Perpustakaan	arsip terkait dengan pengembangan perpustakaan
PK.13.00		V	a.	Perpustakaan Umum	Arsip terkait perpustakaan umum
PK.13.01		V	b.	Perpustakaan Khusus	Arsip terkait perpustakaan khusus
PK.13.02		V	c.	Perpustakaan Sekolah	Arsip terkait perpustakaan sekolah
PK.13.03		V	d.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	Arsip terkait perpustakaan perguruan tinggi

PK.14		V	2	Akreditasi Perpustakaan	arsip terkait dengan permintaan akreditasi, pemberian akreditasi, dan pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi.
PK.14.00		V	a.	Permintaan akreditasi	arsip terkait permintaan akreditasi
PK.14.01		V	b.	Pemberian akreditasi	arsip terkait pemberian akreditasi
PK.14.02		V	c.	Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi	arsip terkait pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi
PK.15		V	3	Pangkalan Data Perpustakaan	arsip terkait dengan nomor pokok perpustakaan dan perpustakaan berbasis wilayah
PK.15.00		V	a.	Nomor Pokok Perpustakaan	arsip terkait dengan nomor pokok perpustakaan
PK.15.01		V	b.	Perpustakaan Berbasis Wilayah	arsip terkait dengan perpustakaan berbasis wilayah

PK.16		V	4	Pemasyarakatan Minat Baca	arsip terkait dengan pemasyarakatan minat baca
PK.17		V	5	Organisasi Perpustakaan	arsip terkait dengan organisasi perpustakaan
PK.17.00		V	a.	Forum Perpustakaan Umum	arsip terkait dengan Forum Perpustakaan Umum
PK.17.01		V	b.	Forum Perpustakaan Khusus	arsip terkait dengan Forum Perpustakaan Khusus
PK.17.02		V	c.	Forum Perpustakaan Sekolah	arsip terkait dengan Forum Perpustakaan Sekolah
PK.17.03		V	d.	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi	arsip terkait dengan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi
PK.17.04		V	e.	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca	arsip terkait dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

PK.17.05		V	f.	Organisasi Perpustakaan Lainnya	arsip terkait dengan Organisasi Perpustakaan Lainnya
PK.18		V		B. Pengembangan Pustakawan	Arsip terkait pengembangan pustakawan
PK.18.00		V		Sertifikasi Tenaga Perpustakaan	arsip terkait dengan sertifikasi tenaga perpustakaan
PK.18.01		V		Pembinaan Tenaga Perpustakaan	arsip terkait dengan pembinaan tenaga perpustakaan
PK.18.02		V		Penerbitan Jurnal	penerbitan jurnal
PK.18.03		V		Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan	arsip terkait dengan penilaian jabatan fungsional pustakawan.
			a.	Tim Penilai Instansi/Perpustakaan Nasional	
			b.	Tim Penilai Pusat	
PK.19		V		Pemasyarakatan	arsip terkait dengan pemasyarakatan

PK.20		V		Evaluasi Tenaga Perpustakaan	arsip terkait dengan evaluasi tenaga perpustakaan
PK.21		V		Pangkalan data Tenaga Perpustakaan	arsip terkait dengan pangkala data tenaga perpustakaan
PK.22		V		Pangkalan data Tim Penilai Pustakawan	arsip terkait dengan pangkalan data tim penilai pustakawan

**ARSIP DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SURAKARTA
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**

DAFTAR PUSTAKA

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	9	10	11	12
Biasa / terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa / terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

				Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait
Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/ atau ketertiban umum	Unit Pengolah Terkait

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SISTEM KEAMANA**

URUSAN PENA

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN
	2			3	4

PM	V			PENANAMAN MODAL	
PM.00		V		KEBIJAKAN	
PM.00.00			V	A. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan tentang penanaman modal
PM.00.01			V	B. Penyiapan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan kebijakan tentang penanaman modal
PM.00.02			V	C. Perumusan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan perumusan kebijakan tentang penanaman modal
PM.00.03			V	D. Masukan dan Dukungan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan masukan dan dukungan kebijakan tentang penanaman modal
PM.00.04			V	E. Penetapan NSPK	Arsip yang berkaitan dengan penetapan NSPK
PM.01		V		PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	
PM.01.00			V	A. Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan industri agribisnis, energi dan sumber daya mineral

					1) Agribisnis	Arsip yang berkaitan dengan Industri agribisnis yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan peternakan
					a) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan	
					b) Kelautan, Perikanan dan Peternakan	
					2) Energi	Arsip yang berkaitan dengan industri energi yang meliputi energi terbarukan dan energi tak terbarukan
					a) Energi Terbarukan	
					b) Energi Tak Terbarukan	
					3) Sumber Daya Mineral	Arsip yang berkaitan dengan industri sumber daya mineral yang meliputi mineral logam dan mineral non logam
					a) Mineral Logam	
					b) Mineral Non Logam	
PM.01.01			v	B.	Perencanaan Industri Manufaktur	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan industri manufaktur yang meliputi industri logam, mesin, tekstil, aneka, kimia, alat transportasi dan telematika
					1) Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka	Arsip yang berkaitan dengan industri logam, mesin, tekstil dan aneka

					a) Industri Logam dan Mesin	
					b) Industri Tekstil dan Aneka	
					2) Industri Kimia	Arsip yang berkaitan dengan industri kimia yang meliputi industri kimia dan industri kimia dasar
					a) Industri Kimia Dasar	
					b) Industri Barang Kimia dan Farmasi	
					3) Industri Alat Transportasi dan Telematika	Arsip yang berkaitan dengan industri alat transportasi dan telematika
					a) Industri Alat Transportasi	
					b) Industri Telematika	
PM.01.02			v	C.	Perencanaan Jasa dan Kawasan	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan jasa dan kawasan yang meliputi jasa perdagangan, pariwisata, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan jasa lainnya serta perencanaan kawasan ekonomi
					1) Jasa Perdagangan dan Pariwisata	Arsip yang berkaitan dengan jasa perdagangan dan pariwisata
					a) Jasa Perdagangan	
					b) Jasa Pariwisata	

					2) Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Lainnya	Arsip yang berkaitan dengan jasa kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan jasa lainnya
					a) Jasa Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan	
					b) Jasa Lainnya	
					3) Kawasan Ekonomi	Arsip yang berkaitan dengan kawasan ekonomi yang meliputi kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi lainnya
					a) Kawasan Ekonomi Khusus	
					b) Kawasan Ekonomi Lainnya	
PM.01.03			v	D.	Perencanaan Infrastruktur	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan infrastruktur yang meliputi, infrastruktur transportasi darat, jalan, jembatan, energi, sumber daya air, transportasi laut, udara dan infrastruktur lainnya
					1) Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan dan Jembatan	Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi darat, jalan dan jembatan yang meliputi infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian serta infrastruktur jalan dan jembatan
					a) Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkeretaapian	
					b) Infrastruktur Jalan dan Jembatan	

				2) Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air	Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur energi dan sumber daya air yang meliputi infrastruktur energi dan infrastruktur sumber daya air
				a) Infrastruktur Energi	
				b) Infrastruktur Sumber Daya Air	
				3) Infrastruktur Transportasi Laut, Udara dan Infrastruktur Lainnya	Arsip yang berkaitan dengan infrastruktur transportasi laut, udara dan infrastruktur lainnya yang meliputi infrastruktur transportasi laut, transportasi udara dan infrastruktur lainnya
				a) Infrastruktur Transportasi Laut	
				b) Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya	
PM.02		v		PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
PM.02.00			v	A. Deregulasi Penanaman Modal	Arsip tentang deregulasi penanaman modal menyangkut sektor primer, sekunder dan tersier
				1) Sektor Primer	Arsip tentang deregulasi penanaman modal menyangkut sektor primer diantaranya pertanian, kelautan, perikanan, energi, sumber daya mineral dan kehutanan
				a) Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
				b) Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan	
				2) Sektor Sekunder	Arsip tentang deregulasi penanaman modal menyangkut sektor sekunder diantaranya industri logam, mesin, transportasi, telematika, agro, kimia, tekstil dan aneka
				a) Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	

					b) Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	
					3) Sektor Tersier	Arsip tentang deregulasi penanaman modal menyangkut sektor tersier diantaranya pariwisata, perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, pekerjaan umum dan jasa lainnya
					a) Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi	
					b) Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya	
PM.02.01			v		B. Pengembangan Potensi Daerah	Arsip tentang pengembangan potensi daerah menyangkut sektor primer, sekunder dan tersier
					1) Sektor Primer dan Tersier	Arsip tentang pengembangan potensi daerah menyangkut sektor primer dan tersier
					a) Sektor Primer dan Tersier	
					b) Sektor Tersier	
					2) Sektor Sekunder	Arsip tentang pengembangan potensi daerah menyangkut sektor sekunder
					a) Sektor Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika	
					b) Sektor Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka	
PM.02.02			v		C. Pemberdayaan Usaha	Arsip tentang pemberdayaan usaha menyangkut pembinaan dan penyuluhan, kemitraan usaha, dan pelayanan usaha

					1) Pembinaan dan Penyuluhan	Arsip tentang pemberdayaan usaha menyangkut pembinaan dan penyuluhan
					a) Pembinaan	
					b) Penyuluhan	
					2) Kemitraan Usaha	Arsip tentang pemberdayaan usaha menyangkut kemitraan usaha
					a) Sektor Primer dan Tersier	
					b) Sektor Sekunder	
					3) Pelayanan Usaha	Arsip tentang pemberdayaan usaha menyangkut pelayanan usaha
					a) Sektor Primer dan Tersier	
					b) Sektor Sekunder	
PM.03		v			PROMOSI PENANAMAN MODAL	
PM.03.00			v		A. Pengembangan Promosi	Arsip tentang pengembangan promosi yang meliputi strategi promosi, target promosi, dan daya saing promosi
					1) Analisis Strategi Promosi	Arsip tentang pengembangan promosi yang menyangkut analisis strategi promosi
					a) Analisis Target Promosi	
					b) Analisis Daya Saing Promosi	

					2) Fasilitas Promosi Luar Negeri	Arsip tentang pengembangan promosi yang menyangkut fasilitas promosi luar negeri
					a) Wilayah Amerika dan Eropa	
					c) Wilayah Asia, Pasifik dan Afrika	
PM.03.01			v		B. Promosi Sektoral	Arsip tentang promosi sektoral meliputi industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan, serta industri manufaktur dan infrastruktur
					1) Promosi Industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan	Arsip tentang promosi sektoral yang menyangkut promosi industri Sumber Daya Alam, Jasa dan Kawasan
					a) Industri Sumber Daya Alam	
					b) Jasa dan Kawasan	
					2) Promosi Industri Manufaktur	Arsip tentang promosi sektoral yang menyangkut promosi industri manufaktur
					a) Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	
					b) Industri Manufaktur Lainnya	
					3) Promosi Infrastruktur	Arsip tentang promosi sektoral yang menyangkut promosi industri infrastruktur
					a) Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan	

					b) Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya	
PM.03.02			v		C. Fasilitas Promosi Daerah	Arsip tentang promosi daerah yang meliputi daerah Sumatera dan Kalimantan, Jawa dan Bali, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua
					1) Wilayah Sumatera dan Kalimantan	Arsip tentang fasilitas promosi daerah yang meliputi daerah wilayah Sumatera dan Kalimantan
					a) Wilayah Sumatera	
					b) Wilayah Kalimantan	
					2) Wilayah Jawa dan Bali	Arsip tentang fasilitas promosi daerah yang meliputi daerah wilayah Jawa dan Bali
					a) Wilayah DKI, Jabar dan Banten	
					b) Wilayah Jateng, DIY, Jatim dan Bali	
					3) Wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	Arsip tentang fasilitas promosi daerah yang meliputi daerah wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua
					a) Wilayah Sulawesi dan Maluku	
					b) Wilayah Nusa Tenggara dan Papua	
PM.03.03			v		D. Pameran dan Sarana Promosi	Arsip tentang pameran dan sarana promosi yang meliputi pameran, media cetak dan media elektronik

					1) Pameran	Arsip tentang pameran dan sarana promosi melalui pameran yang meliputi penyusunan program, monitoring, penyelenggaraan dan evaluasi
					a) Penyusunan Program dan Monitoring	
					b) Penyelenggaraan dan Evaluasi	
					2) Media Cetak	Arsip tentang pameran dan sarana promosi melalui media cetak yang meliputi materi promosi, publikasi dan distribusi
					a) Materi Promosi	
					b) Publikasi dan Distribusi	
					3) Media Elektronik	Arsip tentang pameran dan sarana promosi melalui media elektronik yang meliputi materi promosi dan pelayanan informasi
					a) Materi Promosi	
					b) Pelayanan Informasi	
PM.04		v			KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	
PM.04.00			v		A. Kerja Sama Bilateral dan Multilateral	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama bilateral dan multilateral yang meliputi kerja sama bilateral wilayah Amerika, Eropa, Asia, Pasifik, Afrika dan kerja sama multilateral

					1) Kerja Sama Bilateral Wilayah Amerika dan Eropa	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama bilateral yang meliputi wilayah Amerika dan Eropa
					a) Kerja Sama Wilayah Amerika	
					b) Kerja Sama Wilayah Eropa	
					2) Kerja Sama Bilateral Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama bilateral meliputi wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
					a) Kerja Sama Wilayah Asia	
					b) Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika	
					3) Kerja Sama Multilateral	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama multilateral yang meliputi kerja sama organisasi PBB dan kerja sama organisasi Non PBB
					a) Kerja Sama Organisasi PBB	
					b) Kerja Sama Organisasi Non PBB	
PM.04.01			v		B. Kerja Sama Regional	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama regional yang meliputi kerja sama regional ASEAN, kerja sama sub regional ASEAN dan kerja sama intra kawasan
					1) Kerja Sama Regional ASEAN	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama regional ASEAN yang meliputi kerja sama ASEAN dan kerja sama sub regional ASEAN

					a) Kerja Sama ASEAN	
					b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN	
					2) Kerja Sama Sub Regional ASEAN	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama sub regional ASEAN yang meliputi kerja sama sub regional ASEAN wilayah barat Indonesia dan kerja sama sub regional ASEAN wilayah timur Indonesia
					a) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia	
					b) Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia	
					3) Kerja Sama Intra Kawasan	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama intra kawasan yang meliputi kerja sama APEC dan kerja sama ASEM dan kawasan lainnya
					a) Kerja Sama APEC	
					b) Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya	
PM.04.02			v		C. Kerja Sama Dunia Usaha Internasional	Arsip yang berkaitan dengan kerja sama dunia usaha internasional yang meliputi asosiasi dan lembaga bisnis serta lembaga keuangan
					1) Asosiasi dan Lembaga Bisnis	Arsip yang berkaitan dengan asosiasi dan lembaga bisnis
					a) Asosiasi Bisnis	
					b) Lembaga Bisnis	

					2) Lembaga Keuangan	Arsip yang berkaitan dengan lembaga keuangan yang meliputi lembaga perbankan dan lembaga non perbankan
					a) Lembaga Perbankan	
					b) Lembaga Non Perbankan	
PM.05		v			PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
PM.05.00			v		A. Pelayanan Aplikasi	Arsip tentang pelayanan aplikasi di sektor primer dan tersier, serta sekunder
					1) Aplikasi Sektor Primer dan Tersier	Arsip tentang pelayanan aplikasi di sektor primer dan tersier, yang meliputi aplikasi baru, aplikasi perluasan dan aplikasi perubahan
					a) Aplikasi Baru	
					b) Aplikasi Perluasan	
					c) Aplikasi Perubahan	
					2) Aplikasi Sektor Sekunder	Arsip tentang pelayanan aplikasi di sektor sekunder, yang meliputi aplikasi baru, aplikasi perluasan dan aplikasi perubahan
					a) Aplikasi Baru	
					b) Aplikasi Perluasan	
					c) Aplikasi Perubahan	
PM.05.01			v		B. Pelayanan Perizinan	Arsip tentang pelayanan perizinan di sektor primer dan tersier, dan sekunder

					1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	Arsip tentang pelayanan perizinan di sektor primer dan tersier yang meliputi perizinan di bidang peternakan, perkebunan, pariwisata, prasarana, kehutanan, perikanan, perhubungan, telekomunikasi, pertambangan dan energi serta pertambangan dan aneka jasa
					a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	
					b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	
					c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	
					2) Perizinan Sektor Sekunder	Arsip tentang pelayanan perizinan di sektor sekunder yang meliputi perizinan di bidang industri mesin, industri logam dan barang logam, industri kimia dan barang kimia serta industri aneka
					a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	
					b) Industri Kimia dan Barang Kimia	
					c) Industri Aneka	
PM.05.02			v		C. Pelayanan Fasilitas	Arsip tentang pelayanan fasilitas perizinan di sektor primer dan tersier, dan sekunder
					1) Perizinan Sektor Primer dan Tersier	Arsip tentang pelayanan fasilitas perizinan di sektor primer dan tersier yang meliputi fasilitas perizinan di bidang peternakan, perkebunan, pariwisata, prasarana, kehutanan, perikanan, perhubungan, telekomunikasi, pertambangan dan energi serta pertambangan dan aneka jasa
					a) Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana	

					b) Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi	
					c) Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa	
					2) Perizinan Sektor Sekunder	Arsip tentang pelayanan fasilitas perizinan di sektor sekunder yang meliputi fasilitas perizinan di bidang industri mesin, industri logam dan barang logam, industri kimia dan barang kimia serta industri aneka
					a) Industri Mesin, Logam dan Barang Logam	
					b) Industri Kimia dan Barang Kimia	
					c) Industri Aneka	
PM.06		V		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
PM.06.00			V	A	Pemantauan Penanaman Modal	Arsip tentang pemantauan penanaman modal
PM.06.01			V	B	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal	Arsip tentang sosialisasi ketentuan penanaman modal
PM.06.02			V	C	Fasilitasi Penyelesaian Masalah	Arsip tentang fasilitasi penyelesaian masalah

PM.06.03			V		D	Pengawasan Penanaman Modal	Arsip tentang pengawasan penanaman modal
PM.06.04			V		E	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	Arsip tentang pencabutan/pembatalan perizinan penanaman modal
PM.06.05			V		F	Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal	Arsip tentang kualifikasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
PM.07		V		DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
PM.07.00			V		A	Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal;	Arsip tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal
PM.07.01			V		B	Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal	Arsip tentang pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal

PM.07.02			V	C	Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal	Arsip tentang penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal
PM.07.03			V	D	Pemuktahiran data dan informasi penanaman modal	Arsip tentang pemuktahiran data dan informasi penanaman modal
PM.07.04			V	E	Perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal	Arsip tentang perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal
PM.07.05			V	F	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal	Arsip tentang pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal

**ARSIP DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH
AN DAN AKSES ARSIP**

ANAMAN MODAL

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS				
KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	9	10	11	12

Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Tergantung pada jenis arsip yang lebih spesifik	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP D
SISTEM KEAMANAN DAN /
SEKTOR PEREKOMO
URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAN, PENERAPA**

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN
1	2			3	4
PN	V			PENELITIAN, PENGKAJIAN,	
PN.00		V		1. Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan , penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan , penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi

PN.00.00			V	A.	Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan	Arsip yang berkaitan dengan Pengkajian dan pengusulan kebijakan
----------	--	--	---	----	---	---

PN.00.01			V		B.	Penyiapan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan 'Penyiapan kebijakan
----------	--	--	---	--	----	---------------------	---

PN.00.02			V		C.	Perumusan dan penyusunan bahan	Arsip yang berkaitan dengan 'Perumusan dan penyusunan bahan
----------	--	--	---	--	----	--------------------------------	---

PN.00.03			V		D.	Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan 'Pemberian masukan/uji petik/hearing dan dukungan dalam penyusunan kebijakan
----------	--	--	---	--	----	---	--

PN.00.04			V		E.	Penetapan dalam bentuk NSPK	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan dalam bentuk NSPK
----------	--	--	---	--	----	-----------------------------	---

				F.	Evaluasi Kebijakan	Arsip mengenai perumusan kebijakan penelitian meliputi evaluasi kebijakan
PN.01		V			2. Penelitian dan pengkajian	Arsip yang berkaitan dengan Penelitian dan pengkajian

PN.01.00			V	A.	Rencana Kerja	Arsip yang berkaitan dengan Master plan/rencana strategis, Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP), Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) dan Perijinan penelitian
					1. Master plan/rencana strategis	Arsip yang berkaitan dengan Master plan/rencana strategis
					2. Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP)	Arsip yang berkaitan dengan Rencana kerja tahunan : proposal/idea concept paper (ICP)
					3. Berkas/kontrak MoU kerjasama/ <i>material transfer agreement (MTA)</i>	Arsip yang berkaitan dengan Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA)

				4.	Perijinan penelitian	Arsip yang berkaitan dengan Perijinan penelitian
PN.01.01			V	B.	Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain.	Arsip yang berkaitan dengan surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain.
PN.01.02			V	C.	Pelaksanaan penelitian/pengkajian	Arsip yang berkaitan dengan Prosedur/petunjuk, Data primer, Log Book, Studi kelayakan, Instrumen penelitian, Pelaksanaan survey, Laporan hasil pendataan/survey, dan Analisis/pengolahan data
				1.	Prosedur/petunjuk	Arsip yang berkaitan dengan Prosedur/petunjuk

	2.	Data primer	Arsip yang berkaitan dengan Data primer
	3.	Log Book	Arsip yang berkaitan dengan Log Book
	4.	Studi kelayakan	Arsip yang berkaitan dengan Log Book, Studi kelayakan
	5.	Instrumen penelitian	Arsip yang berkaitan dengan Instrumen penelitian

				6.		Arsip yang berkaitan dengan Pelaksanaan survey,
					Pelaksanaan survey	
				7.		Arsip yang berkaitan dengan Laporan hasil pendataan/survey
					Laporan hasil pendataan/survey	
				8.		Arsip yang berkaitan dengan Analisis/pengolahan data
					Analisis/pengolahan data	
PN.01.03			V	D.	Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi	Arsip yang berkaitan dengan 'Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi meliputi Laporan hasil penelitian dan hasil luaran dan Rekomendasi

				1.	Laporan hasil penelitian dan hasil luaran	Arsip yang berkaitan dengan 'Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi meliputi Laporan hasil penelitian dan hasil luaran
				2.	Rekomendasi	Arsip yang berkaitan dengan 'Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi meliputi Rekomendasi
PN.01.04			V	E.	Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan	Arsip yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan
PN.02		V			3. Pengembangan dan Inovasi	Arsip mengenai pengembangan dan inovasi

PN.02.00			V	A.	Rencana kerja	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan inovasi seperti rencana kerja
----------	--	--	---	----	---------------	--

PN.02.01			V	B.	Administrasi pengembangan dan inovasi	Arsip yang berkaitan dengan administrasi pengembangan dan inovasi
----------	--	--	---	----	---------------------------------------	---

PN.02.02			V	C	Pelaksanaan	Arsip yang berkaitan dengan pelaksana
----------	--	--	---	---	-------------	---------------------------------------

PN.02.03			V	D.	Hasil pengembangan/inovasi	Arsip yang berkaitan dengan hasil pengembangan/inovasi
----------	--	--	---	----	----------------------------	--

					- Laporan pelaksanaan	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan inovasi meliputi laporan pelaksanaan
PN.03		V			4. Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan	Arsip yang berkaitan dengan Dokumen penerapan / pemanfaatan/ pendayagunaan/ replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan

PN.03.00			<p>V A. Dokumen penerapan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>	<p>Arsip yang berkaitan dengan penerapan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>
PN.03.01			<p>V B. Dokumen pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>	<p>Arsip yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>
PN.03.02			<p>V C. Dokumen pendayagunaan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>	<p>Arsip yang berkaitan dengan pendayagunaan hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>
PN.03.03			<p>V D. Dokumen replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan)</p>	<p>Arsip yang berkaitan dengan Dokumen replikasi / prototipe hasil penelitian/pengkajian/perekayasaan/pengembangan/inovasi : masyarakat, dunia industri, pemerintahan</p>

PN.04		V		5. Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Arsip yang berkaitan dengan Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
PN.04.00		V		A. Advokasi dan fasilitasi penelitian	Arsip yang berkaitan dengan Advokasi dan fasilitasi penelitian
PN.04.01		V		B. Pengembangan dan inovasi	Arsip yang berkaitan dengan Pengembangan dan inovasi
PN.05		V		6. Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

PN.05.00			V	A.	Promosi	Arsip yang berkaitan dengan Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.05.01			V	B.	Pemasyarakatan	Arsip yang berkaitan dengan pemasyarakatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.06			V	7. Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi		Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.06.00			V	A. Pembinaan penelitian/pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi		Arsip yang berkaitan dengan Pembinaan penelitian/pengkajian, ilmu pengetahuan dan teknologi

PN.06.01			V	B. Pembinaan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.07		V		8. Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PN.07.00			V	A. Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Jaringan Sistem Nasional Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PN.07.01			V	B. Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Jaringan Sistem Nasional Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

PN.07.02			V	C. Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Jaringan Sistem Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
PN.08		V		9. Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.08.00			V	A. Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Data dan informasi hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.08.01			V	B. Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Data dan informasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

PN 08.02			V	C. Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Data dan informasi hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.09			V	10. Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.09.00			V	A. Penerbitan: jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus	Arsip yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Penerbitan : jurnal/buletin ilmiah, bahan publikasi khusus)
PN.09.01			V	B. Leaflet dan booklet	Arsip yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (leaflet dan booklet)

PN.09.02			V	C.	Kamus istilah	Arsip yang berkaitan dengan Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (kamus istilah)
PN.10			V		11. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)	Arsip yang berkaitan dengan Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
PN.11			V		12. Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.11.00			V	A.	Forum komunikasi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Forum komunikasi penelitian

PN.11.01			V	B. Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Forum komunikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.11.02			V	C. Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Arsip yang berkaitan dengan Forum komunikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
PN.12			V	13. Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK	Arsip yang berkaitan dengan Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
PN.12.00			V	A. Jasa laboratorium pengujian	Arsip yang berkaitan dengan Jasa laboratorium pengujian,

PN.12.01			V	B.	Jasa teknologi produksi	Arsip yang berkaitan dengan Jasa teknologi produksi
PN.12.02			V	C.	Jasa studi	Arsip yang berkaitan dengan Jasa studi
PN.12.03			V	D.	Jasa penyewaan peralatan	Arsip yang berkaitan dengan Jasa penyewaan peralatan
PN.12.04			V	E.	Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi	Arsip yang berkaitan dengan Jasa perbantuan tenaga ahli/profesi

PN.12.05			V	F.	Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi	Arsip yang berkaitan dengan Jasa sertifikasi/kalibrasi dan sertifikasi.
PN.12.06			V	G.	Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi	Arsip yang berkaitan dengan Buku rekaman barang yang diuji/dikalibrasi
PN.13			V		14. Sertifikasi personil peneliti	arsip yang berkaitan dengan sertifikasi personil peneliti
PN.14			V		15. Akreditasi laboratorium	arsip yang berkaitan dengan akreditasi laboratorium

DINAMIS PEMERINTAHAN DAERAH

AKSES ARSIP

INIAN

AN, SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH
KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
5	6	7	8	9	10

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
---------------	--------------------------------------	---------	--	-----------------------	--

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	
Biasa/terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Tidak memiliki dampak yang dapat merugikan perseorangan, lembaga dan negara.	Unit Pengolah Terkait	

**RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DINAS
SISTEM KEAMANAN DAN AKSES**

URUSAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS DOKUMEN/ARSIP	URAIAN	KLASIFIKASI KEAMANAN
						5
1	2			3	4	5

PP	V			PENCARIAN DAN PERTOLONGAN			
PP.00		V		Kebijakan Pencarian Dan Pertolongan		Biasa/Terbuka	
PP.00.00			V	1	Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kebijakan pencarian dan pertolongan meliputi kebijakan	
PP.00.01			V	2	Penyiapan kebijakan		
PP.00.02			V	3	Perumusan dan penyusunan bahan		
PP.00.03			V	4	Pemberian masukan dan dukungan		
					Potensi Pencarian dan Pertolongan		
				A	Sarana dan Prasarana		
				1	Rencana dan Standardisasi		
PP.01		V		a	Perencanaan dan analisa kebutuhan		
PP.01.00					- Kajian Kebutuhan Peralatan	Arsip yang berkaitan dengan kajian kebutuhan peralatan	Biasa/Terbuka
PP.01.01					- Spesifikasi Rencana Peralatan yang dibutuhkan	Arsip yang berkaitan dengan spesifikasi rencana peralatan yang dibutuhkan	Biasa/Terbuka
PP.02				b	Standardisasi, dan inventarisasi		

PP.02.00					- Standarisasi Peralatan	Arsip yang berkaitan dengan standarisasi peralatan	Biasa/Terbuka
PP.02.01					- Daftar Inventarisasi Peralatan	Arsip yang berkaitan dengan daftar inventarisasi peralatan	Biasa/Terbuka
PP.03				2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Darat, laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan prasarana Darat, Laut, Udara dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	Biasa/Terbuka
					- Manual Book		
					- Jadwal Pemeliharaan		
					- Laporan		
PP.04		V		3	Pengawakan dan perbekalan		
PP.04.00			V	a.	Pengawakan	Arsip yang berkaitan dengan Pengawakan	Biasa/Terbuka
					Awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat laut dan udara		
					Kebutuhan awak sarana Pencarian dan Pertolongan darat, laut dan udara		
					Bahan pembinaan awak sarana darat, laut dan udara		
PP.04.01			V	b.	Perbekalan	Arsip yang berkaitan dengan perbekalan	Biasa/Terbuka

						Perbekalan dalam menunjang kegiatan operasi dan pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan		
						Daftar perbekalan		
						Inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan		
						Bahan pelaksanaan pembinaan inventarisasi sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan		
PP.05		v		B		Bina Ketenagaan dan Pemasarakatan		
PP.05.00			v		1	Rencana Pendidikan dan Pelatihan	Arsip yang berkaitan dengan rencana pendidikan dan pelatihan	Biasa/Terbuka
					a	Kurikulum dan Silabus		
					b	Evaluasi dan Monitoring		
PP.05.01			v		2	Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan	Biasa/Terbuka
					a	Penyiapan Tenaga Pencarian dan Pertolongan		
						Pengolahan Data Tenaga		
					b	Penyiapan Potensi Pencarian dan Pertolongan		
						Pengolahan Data Potensi		
PP.05.02			v		3	Pemasarakatan dan Sertifikasi		

				a	Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)	Arsip yang berkaitan dengan Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan)	Biasa/Terbuka
				b	Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	Arsip yang berkaitan dengan sertifikasi pencarian dan pertolongan	Biasa/Terbuka
PP.06		V			Operasi Pencarian dan Pertolongan		
				A	Operasi dan Latihan		
PP.06.00		V		1	Perencanaan dan Standardisasi	Arsip yang berkaitan dengan perdan standarisasi	Biasa/Terbuka
				a	Perencanaan dan Evaluasi		
				b	Standardisasi Operasi dan Latihan SAR		
PP.06.01		V		2	Penyelenggaraan Operasi SAR		

				a	Pengerahan Potensi SAR	Arsip yang berkaitan dengan pengerahan potensi SAR	Biasa/Terbuka
				b	Pengendalian Operasi SAR	Arsip yang berkaitan dengan pengendalian operasi SAR	Biasa/Terbuka
				c	Evaluasi Operasi	Arsip yang berkaitan dengan Evaluasi Operasi	Biasa/Terbuka
PP.06.02		V	3		Siaga dan Latihan		
				a	Siaga		
					- Laporan harian	Arsip yang berkaitan dengan laporan harian	Biasa/Terbuka

					- Laporan bulanan	Arsip yang berkaitan dengan laporan bulanan	Biasa/Terbuka
					- Laporan tahunan	Arsip yang berkaitan dengan laporan tahunan	Biasa/Terbuka
					- Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan Evaluasi	Biasa/Terbuka
PP.06.03		V		b	Latihan		
					- Lokal	Arsip yang berkaitan dengan latihan lokal	Biasa/Terbuka

						- Nasional	Arsip yang berkaitan dengan latihan nasional	Biasa/Terbuka
						- Internasional	Arsip yang berkaitan dengan latihan internasional	Biasa/Terbuka
						B Komunikasi		
PP.07		V				1 Rencana Pengembangan dan		
PP.07.00			V			a Perencanaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi	Arsip yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan sistem komunikasi	Biasa/Terbuka
						Analisa Kebutuhan		

PP.07.01			V		b	Standardisasi dan Evaluasi	Arsip yang berkaitan dengan standarisasi dan evaluasi	Biasa/Terbuka
PP.08			V		2	Operasi Komunikasi		
PP.08.00			V		a	Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)	Arsip yang berkaitan dengan operasi peralatan komunikasi (Berita SAR)	Biasa/Terbuka

PP.08.01		V		b	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)	Arsip yang berkaitan dengan operasi peralatan Deteksi dini (Berita SAR)	Biasa/Terbuka
PP.08.03		V		c	Registrasi BEACON	Arsip yang berkaitan dengan Registrasi BEACON	Biasa/Terbuka
PP.09	V		3		Inventarisasi dan Pemeliharaan		
PP.09.00		V		a	Inventarisasi Perangkat Komunikasi	Arsip yang berkaitan dengan inventarisasi perangkat komunikasi	Biasa/Terbuka

PP.09.01		V		b	Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	Arsip yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan komunikasi	Biasa/Terbuka
			C. Data dan Informasi				
PP.10		V		1	Pengembangan Sistem Informasi		
PP.10.00		V		a	Perangkat Lunak	Arsip yang berkaitan dengan perangkat lunak	Biasa/Terbuka

PP.10.01			V		b	Perangkat Keras	Arsip yang berkaitan dengan perangkat keras	Biasa/Terbuka
PP.11			V	2		Pelayanan Informasi		
PP.11.00			V		a	Penyajian dan pelayanan Data Informasi	Arsip yang berkaitan dengan penyajian dan pelayanan data informasi	Biasa/Terbuka

PP.11.01		V		b	Laporan dan Pembuatan Dokumentasi (Data Base)	Arsip yang berkaitan dengan laporan dan pembuatan dokumentasi (Database)	Biasa/Terbuka
----------	--	---	--	---	---	--	---------------

SIS_TEM PEMERINTAHAN DAERAH

ARSIP

LONGAN

SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS			MASUKAN DARI DAERAH
HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
6	7	8	9

Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU 14/2008 "seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "kajian yang mendasari terbitnya kebijakan"		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "data perbendaharaan atau inventaris"		

Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "data perbendaharaan atau inventaris"		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "data perbendaharaan atau inventaris"		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan		

	informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		

Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "		
Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik	Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta berdasarkan Pasal 10 UU 14/2008 <i>juncto</i> Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "data perbendaharaan atau inventaris"</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik "</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		
<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		

<p>Penentu kebijakan, Pelaksana kebijakan, Pengawas internal/eksternal, Penegak hukum, Publik</p>	<p>Informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi No 1/2010 "informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya"</p>		
---	---	--	--

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
PEMERINTAHAN DAERAH
URUSAN SOSIAL**

KODE KLASIFIKASI	P	S	T	JENIS ARSIP/DOKUMEN	URAIAN	SISTEM KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS					MASUKAN DAERAH
						KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10

SO	V			SOSIAL							
SO.00		V		Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan	Arsip yang berkaitan dengan kegiatan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan meliputi pengkajian dan pengusulan kebijakan, penyiapan kebijakan, perumusan kebijakan, masukan dan dukungan kebijakan, norma standar prosedur kriteria (NSPK)	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
						terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait	
						Rahasia	Penentu kebijakan, Pengawas internal/eksternal, penegak hukum	Tertutup	Memiliki dampak yang dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy		

SO.00.00			V		Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan pengkajian dan pengusulan kebijakan sosial urusan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
SO.00.01			V		Penyiapan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan penyiapan kebijakan sosial urusan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit pengolah terkait
SO.00.02			V		Perumusan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dalam hal rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdaya sosial dan juga penanggulangan	terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit pengolah terkait
SO.00.03			V		Masukan dan Dukungan Kebijakan	Arsip yang berkaitan dengan berbagai masukan dan dukungan yang didapat sebelum adanya penetapan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.00.04			V		Penetapan NSPK	Arsip yang berkaitan dengan Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tiap-tiap kebijakan sosial yang sudah ditetapkan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
	V				REHABILITASI SOSIAL						
SO.01		V			Kesejahteraan Sosial Anak						

SO.02		V		Rehabilitasi Sosial						
SO.02.00			V	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental yang meliputi dalam panti dan luar panti	Arsip yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental yang meliputi dalam panti dan luar panti	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.02.01			V	Kelembagaan dan advokasi sosial	Arsip yang berkaitan dengan kelembagaan dan advokasi sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.02.02			V	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	Arsip yang berkaitan dengan asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.03		V		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial						
SO.03.00			V	Gelandangan, pengemis dan pemulung	Arsip yang berkaitan dengan gelandangan, pengemis dan pemulung	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.03.01			V	Tuna susila dan korban trffking perempuan	Arsip yang berkaitan dengan tuna susila dan korban trffking perempuan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.03.02			V	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	Arsip yang berkaitan dengan berkas warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.03.03			V	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait
SO.04		V		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA						
SO.04.00			V	Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat	Arsip yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait

SO.04.01		V		Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	Arsip yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.05		V		Pelayanan sosial lanjut							
SO.05.00		V		Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Arsip yang berkaitan dengan pelayanan sosial dalam dan luar panti	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.05.01		V		Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.05.02		V		Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Arsip yang berkaitan dengan advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
				PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
SO.06		V		Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	Arsip yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial meliputi bimbingan dan standarisasi, perizinan dan pengumpulan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.07		V		Perlindungan Sosial Korban							
SO.07.00		V		Perlindungan sosial korban tindak kekerasan meliputi pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi	Arsip yang berkaitan dengan perlindungan sosial korban tindak kekerasan meliputi pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.07.01		V		Perlindungan sosial pekerja migran meliputi penampungan dan pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi	Arsip yang berkaitan dengan perlindungan sosial pekerja migran meliputi penampungan dan pemulihan sosial, pemulangan dan reintegrasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

SO.07.02		V		Evaluasi dan pelaporan meliputi kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Arsip yang berkaitan dengan evaluasi dan pelaporan meliputi kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.08	V			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial							
SO.08.00		V		Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	Arsip yang berkaitan dengan ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.08.01		V		Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Arsip yang berkaitan dengan tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.08.02		V		Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	Arsip yang berkaitan dengan dengan pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.08.03		V		Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Arsip yang berkaitan dengan kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.09	V			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam							
SO.09.00		V		Kesiapsiagaan dan mitigasi	Arsip yang berkaitan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.09.01		V		Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	Arsip yang berkaitan dengan tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.09.02		V		Pemulihan sosial dan penguatan sosial	Arsip yang berkaitan dengan pemulihan sosial dan penguatan sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.09.03		V		Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Arsip yang berkaitan dengan kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.10	V			Jaminan Sosial							

SO.10.00			V		Sseleksi dan vrifikasi	Arsip yang berkaitan dengan seleksi dan vrifikasi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.10.01			V		Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	Arsip yang berkaitan dengan asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.10.02			V		Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	Arsip yang berkaitan dengan bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.10.03			V		Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	Arsip yang berkaitan dengan kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
	V				PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN							
SO.11		V			Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial							
SO.11.00			V		Ketahanan keluarga meliputi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga	Arsip yang berkaitan dengan ketahanan keluarga meliputi bimbingan kesejahteraan sosial keluarga, konsultasi dan advokasi keluarga	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.11.01			V		Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	Arsip yang berkaitan dengan asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.11.02			V		Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	Arsip yang berkaitan dengan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

SO.11.03			V		Kemitraan dunia usaha meliputi kerjasama, bimbingan sosial	Arsip yang berkaitan dengan kemitraan dunia usaha meliputi kerjasama, himbungan sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.11.04			V		Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	Arsip yang berkaitan dengan karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.12		V		Pemberdayaan komunitas adat terpencil								
SO.12.00			V		Persiapan pemberdayaan meliputi identifikasi, analisis	Arsip yang berkaitan dengan persiapan pemberdayaan meliputi identifikasi, analisis	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.12.01			V		Pemberdayaan sumber daya manusia meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia adat terpencil, pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil	Arsip yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia meliputi pemberdayaan sumberdaya manusia adat terpencil, pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.12.02			V		Penggalian dan pengembangan potensi meliputi penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Arsip yang berkaitan dengan penggalian dan pengembangan potensi meliputi penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan, pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.12.03			V		Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil meliputi keserasian sosial, penguatan sosial	Arsip yang berkaitan dengan keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil meliputi keserasian sosial, penguatan sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

SO.12.04			V		Kerjasama kelembagaan meliputi kerjasama kelembagaan, pemantaua, evaluasi dan pelaporan	Arsip yang berkaitan dengan kerjasama kelembagaan meliputi kerjasama kelembagaan, pemantaua, evaluasi dan pelaporan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.13		V			Penanggulangan Kemiskinan							
SO.13.00			V		Identifikasi dan analisis	Arsip yang berkaitan dengan identifikasi dan analisis	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.13.01			V		Pengembangan kapasitas meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kapasitas usaha	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas meliputi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kapasitas usaha	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.13.02			V		Penataan sosial lingkungan kumuh meliputi bimbingan sosial, pengembangan lingkungan sosial	Arsip yang berkaitan dengan penataan sosial lingkungan kumuh meliputi bimbingan sosial, pengembangan lingkungan sosial	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.13.03			V		Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas meliputi advokasi sosial, pengembangan aksesibilitas	Arsip yang berkaitan dengan advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas meliputi advokasi sosial, pengembangan aksesibilitas	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.14		V			Kepahlawanan, Keperintisan							
SO.14.00			V		Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan meliputi pengangkatan, penghargaan, kesejahteraan	Arsip yang berkaitan dengan penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan meliputi pengangkatan, penghargaan, kesejahteraan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

SO.14.01			V		Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan meliputi identifikasi, pendayagunaan	Arsip yang berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan meliputi identifikasi, pendayagunaan	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.14.02			V		Pengembangan kesetiakawanan sosial meliputi penggalian nilai, pelestarian nilai	Arsip yang berkaitan dengan pengembangan kesetiakawanan sosial meliputi penggalian nilai, pelestarian nilai	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	
SO.14.03			V		Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional meliputi pengelolaan taman makan pahlawan nasional utama, standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Arsip yang berkaitan dengan pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional meliputi pengelolaan taman makan pahlawan nasional utama, standarisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit pengolah terkait	

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal
BUPATI DELI SERDANG

ASHARI TAMBUNAN

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	
3.	Kadis Perpustakaan dan Arsip	
4.	Kepala Bagian Hukum	